

Jurnal Demokrasi Sosial

Daftar Isi

Pengantar Redaksi 4

Laporan Utama

Diskusi Tematik: Pemimpin Tanpa Visi dan Arah 6

Laporan Utama

PEMIMPIN TANPA VISI: Quo vadis Indonesia? 22

Artikel

PENTINGNYA IDEOLOGI Ivan Hadar 28

Wawancara

Faisal H. Basri: Pemimpin jangan durhaka pada bangsanya 31

Wawancara

Prof Dr. Musa Asy'arie: Kepemimpinan dan Pemiskinan Bangsa 38

Artikel

R. Ramli dan P. Nuryadin: Kegagalan Solusi Moneteris dan Neoliberal di Indonesia: Kerawanan dalam Bungkus Baru 34

Profil

Pergerakan Indonesia 50

Resensi

Membangun Alter-Hegemon 54

Dewan Redaksi:

Amir Effendi Siregar (Ketua),
Ivan Hadar (Wakil Ketua),
Faisal Basri,
Nur Iman Subono,
Ari Sudjito.

Pelaksana Redaksi:

Azman Fajar (Koordinator),
Puji Riyanto (Redaksi),
Launa (Redaksi).

Alamat Redaksi:

Jalan Bangka IIC No. 4
Pela Mampang, Jakarta
Selatan Telp : 021-71469596;
Fax: 021 – 7196924,

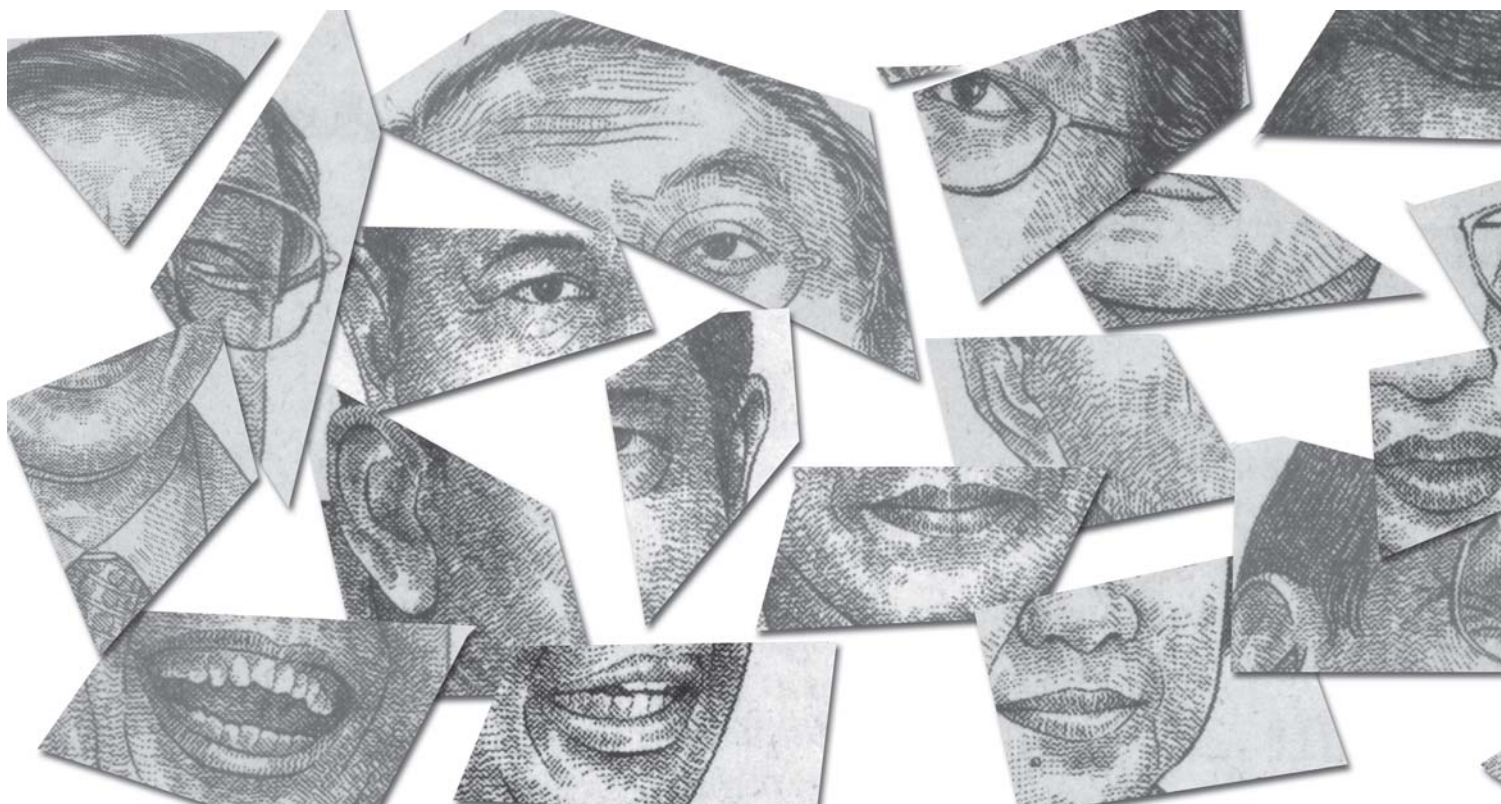
Jalan Kemang Selatan II
No. 2A, Jakarta 12730
Tel: 021 - 7193711 (hunting)
Fax: 021 – 71791358

Penerbit

Pergerakan Indonesia dan
Komite Persiapan Yayasan
Indonesia Kita

ISSN: 1978-9084





S a l a m

2

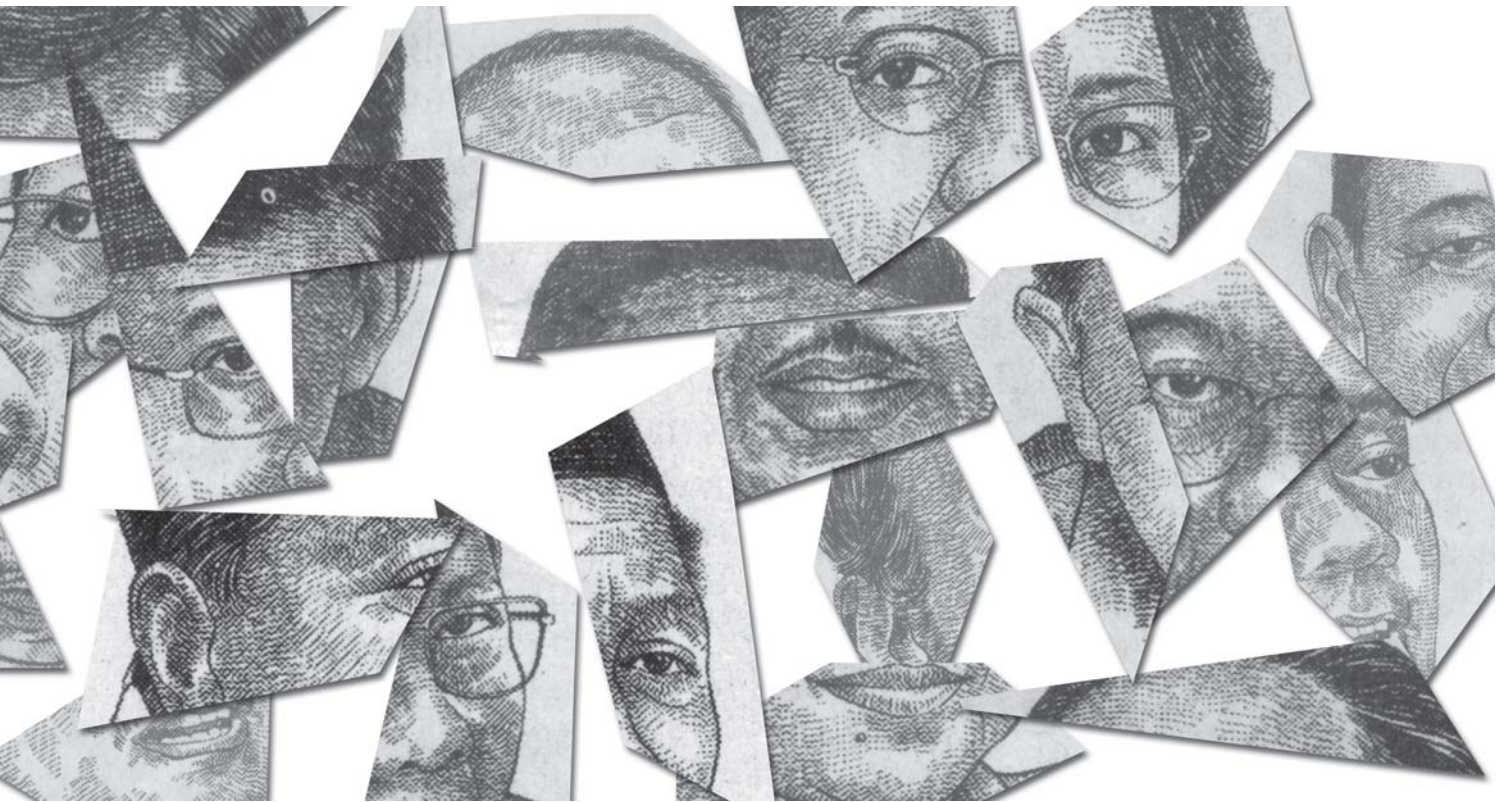
Jika dihitung sejak turunnya Soeharto, maka reformasi telah berjalan selama kurang lebih 9 tahun. Namun, hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, kita belum mengetahui secara jelas menyangkut apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh bangsa dan negara ini. Tentu saja, bila kita bertanya kepada para pemimpin, maka mereka pasti mempunyai jawaban atas pertanyaan tersebut, diantaranya adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur. Jawaban semacam ini sangatlah kabur. Kita mengharapkan jawaban yang jelas dan dapat diukur, tidak sekedar pernyataan retorik seperti itu. Sebagai contoh, misalnya, apa yang ingin dicapai oleh bangsa dan negara ini pada tahun 2010, 2015 atau bahkan 2020? Bagaimana usaha meningkatkan *Gross National Income* kita, yang kini lebih

rendah daripada Philipina, Tiongkok, bahkan mulai dikejar oleh Vietnam? Bagaimana dengan pengurangan angka kemiskinan? Bagaimana mengatasi pengangguran? Bagaimana dengan penegakan hukum? Puluhan pertanyaan masih bisa kita ajukan buat para pemimpin kita, dan tampaknya para pemimpin kita tidak mempunyai jawaban yang konkret.

Situasi semacam ini tentu mengundang pertanyaan di masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu masalah yang diduga sangat penting adalah tidak konsistennya para pemimpin dalam melaksanakan apa yang tertulis dengan apa yang dikerjakan. Persoalan lain menyangkut ketidakjelasan filsafat dan paradigma serta konsep yang melandasi seluruh kegiatan dan program negara. Ketidakmampuan para pemimpin

dalam melakukan koordinasi dan ketidakberanian mengambil keputusan serta sikap juga menjadi persoalan yang tidak kalah pentingnya.

Undang Undang Dasar '45, baik yang lama maupun yang telah diamandemen, jelas memberikan landasan konstitusional bahwa negara ini harus dibangun berdasarkan prinsip yang menjamin hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya. Pasal 33 dan 34 UUD 45, misalnya, secara sangat jelas meminta pemimpin negara ini membangun negara yang berkeadilan sosial dan ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan pada prinsip ekonomi pasar ortodoks yang bisa menciptakan monopoli baru oleh segelintir orang ("*private sector*") yang justru bisa menyebabkan jurang ekonomi sosial semakin tinggi. Dalam kaitan ini,



J u m p a

monopoli negara dan monopoli sektor swasta sama berbahayanya.

Sayangnya, pemimpin negara ini tidak melaksanakan amanat UUD '45 secara konsekwen dan konsisten. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan ekonomi lebih banyak didominasi oleh program dan kegiatan yang didasarkan pada pemikiran ekonomi pasar ortodoks. Kalaupun ada program sosial dan ekonomi untuk masyarakat bawah, maka lebih bersifat "charity" bukannya program ekonomi, sosial, politik dan budaya yang menyeluruh dan utuh sebagaimana diamanatkan UUD '45.

Atas alasan inilah, edisi perdana JURNAL DEMOKRASI SOSIAL mengundang berbagai pihak untuk mendiskusikan masalah tersebut. Beberapa pembicara dan partisipan yang diundang diantaranya adalah Prof. Dr. Franz Magnis-

Suseno dari STF Driyarkara, Arie Sudjito dari FISIPOL UGM, Boni Hargens dari FISIP UI, Imam Yudotomo dari CSDS Yogyakarta, Ivan A. Hadar dari Ide Indonesia, M. Azman Fajar dari Pergerakan Indonesia, Hariyadi Wirawan dari FISIP UI, dan lain sebagainya.

Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai hal yang cukup menarik yang merentang dari masalah-masalah sosial-ekonomi, sipil dan politik, serta kebudayaan. Hasil diskusi tersebut dapat dibaca pada jurnal edisi perdana kali ini, dan harapannya dapat memberikan semacam gagasan atau sumbang saran bagi perbaikan Indonesia pada masa yang akan datang. Bagaimanapun tidaklah mungkin membangun Indonesia tanpa visi, terlebih dalam era sekarang ini dimana pasar menjadi kekuatan dominan yang mempengaruhi hampir semua

dimensi kehidupan manusia. Negara harus mengambil peranan sebagaimana amanat undang-undang dasar '45 dan tidak melepasnya begitu saja pada mekanisme pasar, *laissez-faire*. Ini hanya mungkin jika elit politiknya mempunyai visi dan komitmen yang kuat.

Selanjutnya, demi memperkaya gagasan dan kedalaman analisis, redaksi juga memuat beberapa tulisan hasil wawancara dengan Prof. Dr. Musa As'Arie dan Faisal Basri. Redaksi juga memuat hasil kajian Rizal Ramli dan P. Nuryadin dari ECONIT Advisory Group. Mudah-mudahan gagasan-gagasan yang tertuang dalam jurnal edisi perdana ini bermanfaat. Selamat membaca!!

Redaksi

Diskusi Tematik:

Pemimpin tanpa visi dan arah

Pengantar Redaksi

Visi seorang pemimpin akan mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam mendorong kemajuan sebuah bangsa. Namun sayangnya, dalam konteks Indonesia, sejak reformasi hingga sekarang, belum ditemukan sosok pemimpin yang visioner yang mampu memberi arah akan kemana negeri ini sebenarnya hendak dibawa. Tampaknya, para pemimpin belum mempunyai konsep dan paradigma yang jelas guna menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi Bangsa Indonesia seperti kemiskinan dan pengangguran, demokatisasi politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, tim redaksi mengundang berbagai tokoh dan pakar di bidang sosial-budaya, politik, dan juga ekonomi guna mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia tersebut, utamanya kaitannya dengan visi seorang pemimpin. Dalam kesempatan tersebut, diundang sebagai narasumber Prof. Dr. Franz Magnis-Suzeno dari STF Driyarkara dan Boni Hargens dari FISIP Universitas Indonesia. Selain itu, diskusi juga mengundang berbagai elemen masyarakat yang selama ini concern terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia, diantaranya adalah Ari Sudjito (FISIPOL-UGM), Ivan A. Hadar (Ide Indonesia), Thamrin Ananda (Partai Rakyat Aceh), Saiful Bahari (PPR), Hariyadi Wirawan (FISIP UI), Nur Iman Subono (Demos), Azman Fajar (Pergerakan Indonesia), Syaiful Bahari (Partai Perserikatan Rakyat), Imam Yudotomo (CSDS), Sukma Widyanti (Pergerakan Indonesia), Kemala Sophia (MBRC FISIP UI), Amir Effendi Siregar (praktisi media), Friedrich-Ebert-Stiftung, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah hasil diskusi tersebut.

4

Moderator (Ivan A. Hadar)

Selamat malam. Sebenarnya, ada beberapa pembicara yang akan kita undang dalam diskusi kali ini. Diantaranya adalah Pak Faizal Basri yang rencananya mau berbicara soal ekonomi, tapi sayangnya, menurut teman-teman dekatnya, baru tiba dari luar kota, dan katanya juga kurang sehat. Jadi, terpaksa tidak bisa hadir. Kemudian dari bidang

politik, rencananya Pak Eko Prasjo, tapi kita beruntung karena ada penggantinya, yaitu Mas Boni Hargens, dan yang ketiga dari bidang sosial budaya kita sangat gembira karena Romo Magnis bisa hadir pada hari ini, dan nanti bisa ngomong-ngomong kenapa menolak *Bakrie Award*.

Sebenarnya, inisiatif untuk melakukan diskusi seperti ini bagian dari perjalanan panjang atau setengah panjang dari

teman-teman yang punya visi, kira-kira, tidak melepas ekonomi menjadi *laissez fire*, lepas tangan segala-galanya. Negara harusnya berperan cukup penting meskipun kita tahu bahwa negara, kalau kita ambil kasus Indonesia- bukan negara sebenarnya, tetapi pemerintah- sering kali bermasalah. Tapi, tetap saja masih ada keyakinan bahwa seharusnya negara berperan aktif dalam, katakanlah, paling



tidak, menengahi antara yang ekstrim, antara yang kaya dan miskin, dan sebagainya. Nampaknya, banyak yang mengatakan bahwa sejak kemerdekaan kita mempunyai arah, tapi makin lama, paling tidak setelah reformasi, arahnya tidak begitu jelas. Oleh karena itu, mungkin diskusi ini bisa menjadi bagian dari rencana atau upaya sebagian teman untuk memberikan solusi dalam masalah tersebut.

Kita mulai dari pertanyaan yang paling aktual hari ini, yakni mengapa Romo Magnis menolak (*Bakrie award*). Ini serius karena kaitannya dengan korporasi yang cukup besar, kaitannya dengan bencana- katakanlah bencana buatan manusia meskipun sebagian mengatakan bencana alam, kaitannya dengan lambannya pemerintah atau negara untuk mengantisipasi dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat *basic*. Bagaimana ketika rakyatnya menderita, ketika ada sesuatu yang salah, itu perlu dibenahi. Jadi, gaya-gaya tebar pesona dan sebagainya mungkin bukan waktunya lagi.

Ada yang setuju dengan langkah Romo, tetapi sebagian yang menerima hadiah mengatakan tidak. Terutama lembaga penelitian kalau nggak salah mengatakan, “Ya.. *Award* ini bisa jadi untuk memancing masyarakat, termasuk pemerintah supaya memberikan perhatian yang lebih kepada lembaga penelitian karena di Indonesia lembaga penelitian memang kurang diperhatikan”. Alasannya bisa macam-macam, tapi alasan yang mendasar ada kaitannya dengan yang dikatakan Romo Magnis meskipun tidak melihat secara langsung bahwa di Lapindo ada sesuatu yang belum tuntas dilakukan oleh, katakanlah, perusahaan tersebut. Di Indonesia, saya pikir, kalau dilihat dari segi sosial budaya dan ekonomi tentu saja ini salah satu *case* yang menarik bagaimana negara, misalnya, seharusnya berperan, bagaimana pemerintah yang mewakili masyarakat seharusnya berperan. Mungkin dari sudut pandang seperti itu tidak kaitannya dengan pribadi Romo, tetapi lebih kepada pertimbangan filosofis di belakang penolakan Romo, dan itu mungkin bisa dikembangkan

mengenai bagaimana seharusnya peran negara untuk mengantisipasi berbagai hal yang sebenarnya di Indonesia cukup aktual.

Saya pikir mungkin pengantar seperti itu, sedikit provokasi, tetapi mudah-mudahan bisa mengungkit semangat. Silahkan.

Romo Magnis

Menurut saya, di Indonesia, lebih daripada sekedar penolakan hadiah. Hari-hari ini saya terus dikerubungi media yang ingin tahu dan semua tentu ingin memancing saya untuk mengutuk Bakrie. Namun baiklah, mungkin saya dapat menceritakannya meskipun sedikit.

Saya tidak tahu persis, mungkin pada bulan Mei pernah datang dari *Freedom* menyindir kepada saya, tetapi waktu itu saya tidak memperhatikan dan lupa, dan sebenarnya juga tidak tahu apa yang diomongkan. Pada tanggal 18/17, saya ke Bandung karena ada suatu urusan bisnis. Waktu itu, saya mendapat pertanyaan, “Kamu akan dapat hadiah itu, dan bagaimana apakah kamu terima atau tidak?” Saya bertanya, “dapat hadiah apa

... sebuah negara seperti Indonesia dan bangsa seperti Indonesia jangan mengharapkan bisa secara lurus tanpa kesulitan dalam 60 tahun menjadi sebuah bangsa besar dan negara yang mantap.

ya?" "Hadiah Bakrie". Saya pikir beberapa jam lalu menulis surat kepada *Freedom Institute* bahwa saya, andaikata itu betul, tidak akan menerima hadiah tersebut. Kemudian, saya mengusulkan supaya mereka tidak mengumumkan saja, tapi mengumumkan orang lain. Jadi, saya tidak ada masalah dengan hadiah itu. Saya kira gagasan hadiah seperti itu ada benarnya. Saya juga tidak keberatan konglomerat memberikan hadiah semacam itu agar orang-orang kaya tidak terfokus pada kekayaan, dan itu terpuji. Tetapi, saya lalu menulis kurang lebih begini, "Ini Bakrie memang berkaitan dengan Lapindo, dan apakah Lapindo memang sepenuhnya bertanggung jawab atau tidak atas lumpur di Sidoarjo bukan urusan saya menilai. Namun yang jelas, masih ada ribuan korban yang belum dibantu, dan saya tidak bisa menerima hadiah yang berkaitan dengan sebuah perusahaan yang terlibat di dalam masalah itu. Saya tidak bisa sampai hati, dan dianggap tidak solider. Itu saja."

Lalu, *Freedom Institute* masih datang pada 18 pagi karena sorenya saya ke Italia. Rizal datang ke tempat saya pada permulaan Juli dan mengatakan bisa menerima. Jadi, itu *story*-nya, dan saya tidak keberatan orang lain menerimanya. Waktu itu, saya juga tidak tahu apakah ada orang lain karena saya sebenarnya tidak mau membuat orang lain merasa tidak enak menerimanya karena saya menolak dan saya kira itu memang terjadi. Saya tidak bisa mengubah itu, dan saya kira lebih penting tetap setia pada orang-orang yang menjadi korban. Jadi, itu kurang lebih situasi saya.

Moderator

Saya ingat waktu ada diskusi antara Romo dengan, kalau tidak salah, Komaruddin Hidayat. Ini kaitannya dengan tema hari ini, pemimpin tanpa visi. Menurut Mas Komar, dia keliling ke Turki, China, Vietnam, dan sebagainya. Kalau di Vietnam ada Paman Hoo, di China ada Mao, di Turki ada Atatürk. *Nah*, dia

merindukan di Indonesia ada pemimpin, tentu saja kaitannya dengan visi dan bukan hanya sekedar pemimpin kharismatik, yang bisa membawa negeri ini keluar dari krisis. Dalam uraiannya, Ia sangat pesimistis karena dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan tadi nampaknya Indonesia sangat jauh. Namun, saya dengar dalam diskusi tersebut bahwa Romo Magnis cukup optimistis.

Romo Magnis

Saya tidak optimis 90 %, tetapi antara 60-65%. Namun, saya berpendapat bahwa ada sebuah tendensi untuk melumpuhkan diri sendiri dengan pesimistis. Ada dua atau mungkin tiga pertimbangan. Satu diantaranya sangat prinsipil. *Pertama*, sebuah negara seperti Indonesia dan bangsa seperti Indonesia jangan mengharapkan bisa secara lurus tanpa kesulitan dalam 60 tahun menjadi sebuah bangsa besar dan negara yang mantap. Jerman, misalnya, memerlukan dua kali untuk mencoba demokrasi. Percobaan pertama tahun 1918, dan menghasilkan salah satu petaka umat manusia terbesar, yaitu nazisme, Perang Dunia Kedua, *holocaust*, dan sebagainya. Itu sebuah negara yang relatif telah mengikuti irama modernisasi. *Nah*, baru kedua kalinya berhasil. Perancis, tentu saja, tidak terkecuali. Mereka mengalami banyak peristiwa. Saya sendiri tidak kaget bahwa Indonesia dan banyak negara di dunia ikut mengalami modernisasi sebagai lebih dari paksaan dari luar daripada kebutuhan irama perkembangannya sendiri, dan ini membuatnya banyak mengalami kesulitan.

Alasan *kedua*, Indonesia belum pernah mempunyai konsensus sedemikian besar mengenai demokrasi seperti sekarang. Hizbut Tahrir mungkin tidak terlibat dalam konsensus itu, dan mungkin masih ada satu-dua kelompok lagi. Namun, kita simak bahwa tahun 50-an mayoritas penduduk Indonesia tidak mendukung

demokrasi. Waktu itu, mendukung Masyumi dan PSI kecil, juga Partai Katolik dan Partai Protestan (Parkindo). Namun, partai besar seperti PNI, PKI, dan NU mendukung Soekarno ketika menghapus demokrasi dengan mengatasnamakan demokrasi terpimpin. Tentu saja, ini sebuah kemajuan besar. Demokrasi kita banyak sekali cacat sama sekali tidak perlu disangkal, tapi ada sesuatu yang positif. Misalnya, tahun '99/2000, kita banyak berbicara mengenai disintegrasi bangsa, tetapi sekarang tidak ada lagi. Memang, bahaya disintegrasi dan masalah masih ada di Papua. Aceh barangkali betul-betul telah dapat diatasi. Di lain provinsi, saya tidak melihat masalah yang serius. Masalah pusat dan daerah belum teratasi, otonomi daerah sebagian tidak berhasil, tapi tidak berarti bahwa otonomi daerah salah. Mungkin caranya belum begitu bagus. Konflik kekerasan juga berkurang.

Saya juga melihat, misalnya, perkembangan dalam Islam. Islam akan selalu, dalam pandangan saya, memainkan peranan yang menentukan. Adalah cukup menarik bahwa tendensi-tendensi keislaman- katakanlah fundamentalis keras, ekstremis, dan sebagainya- tidak kelihatan mengalami kemajuan yang begitu mengkhawatirkan. Saya kira masih akan bertambah, dan akan mencapai di sebuah level yang lebih tinggi. Kita ambil contoh PKS, menurut saya, maksimal paling sekitar 20%.

Saya juga melihat ada sesuatu yang menarik dalam Islam. Jika saya melihat dari Islam *mainstream*, Muhammadiyah dan NU, mereka tidak begitu ketakutan dengan ekstremis, tetapi dengan salafisme. Mereka takut dicuri masjidnya dan sebagainya. Saya sudah cukup sering mendengar cerita semacam itu di Jawa Timur, "masjid kami diambil alih". Di situ, saya melihat, di pihak Islam moderat, Islam normal di Indonesia, telah mengidentifikasi dirinya dengan Indonesia dan strukturnya, termasuk sekarang dengan Pancasila.

Lalu, alasan saya yang ketiga berkenaan dengan nasionalisme Indonesia. Saya tidak pernah setuju dengan pandangan bahwa nasionalisme Indonesia sudah mati meskipun seringkali dikatakan demikian. Namun, dalam semua situasi dimana Indonesia ditantang, nasionalisme muncul lagi dalam konflik, dalam berbagai gerakan daerah dan sebagainya. Mungkin sangat mengerikan Kristen-Islam saling bunuh, tapi keluar dari Indonesia mereka tidak. Jadi, sebetulnya, persatuan Indonesia lebih mantap daripada yang sering dipikirkan. Itu kelihatan kalau orang Indonesia bertemu di luar negeri, orang Melayu Indonesia merasa lebih dekat dengan orang Batak, Jawa atau Flores daripada dengan Melayu Malaysia. Padahal, budayanya sama.

Ini mungkin secara singkat tiga alasan mengapa saya berpendapat dengan segala macam masalah bahwa saya tetap optimistis Indonesia akan berhasil mengatasi masalahnya.

Moderator

Dengan catatan bahwa demokrasi tidak dibajak oleh para elit yang kemudian memberikan ruh, mengarahkan pada hal-hal yang bertolak belakang dan bahkan kontra produktif dengan demokrasi itu sendiri.

Pada masa Soekarno, saya ingat waktu masih kecil ketika mendengar Soekarno berpidato di Radio pada 17 Agustus maka nampaknya rasa bangga sebagai orang Indonesia sangat tinggi. Kita dengan tekun mendengarnya dan merasa bahwa Indonesia di mata bangsa dan negara lain sangat bermartabat. Namun sekarang ini, 17-an lebih dimaknai sebagai makan krupuk, pasang bendera, dan lain sebagainya. Mungkin, visinya belum ada sehingga sebagai warga Indonesia belum bisa dipersatukan dengan visi tertentu, apakah ideologi atau apapun namanya yang membuat mayoritas masyarakatnya bisa bangga. Itu

mungkin sebagian kritik dari apa yang dikatakan positif oleh Romo.

Romo Magnis

Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Kalau tadi saya mengatakan 65%, maka harus dimaknai sebagai sebuah proses dan karenanya bisa menurun. Saya sendiri melihat bahaya terbesar yang dihadapi Indonesia adalah korupsi karena memperlemah bangsa dari segala sudut. Dalam hal ini, saya berpendapat jika kejujuran atau ketidakjujuran menjadi sistem maka akan menjadi gawat bagi sebuah sistem apapun karena kejujuran bukan hanya masalah moral, tetapi kemanusiaan fundamental. Oleh karena itu, jika korupsi tidak segera dapat diatasi, maka seluruh kemampuan kita akan hilang, kompetensi akan hilang, dan sebagainya. *Kedua*, saya setuju sekali jika krisis menjadi masalah. Kita mengalami krisis moralitas elit, dan ini bisa menghancurkan kenegaraan kita.

Moderator

Saya ingin diskusi ini aktif. Tadi, pendekatannya memang agak konvensional karena modelnya mengajukan pertanyaan kemudian Romo mengungkapkan pemikirannya. Saya kira bebas saja, siapa yang mau memberikan masukan, pemikiran, tidak harus menanggapi, tapi memperkaya. Silahkan teman-teman. Ini kaitannya lebih ke sosial budaya. Terkait dengan *social capital* yang ternyata masih ter-*fragmented*, dimana-mana ada yang bisa dikembangkan, tapi belum *tune in* satu dengan lainnya, belum terkoordinir, belum *inter change* atau apapun istilahnya sehingga belum bisa menjadi sesuatu yang menjadi pendorong sehingga *social capital* bisa menjadi lebih dari sekedar dari apa yang ada sekarang. Kalau dikaitkan dengan budaya terlepas apakah budaya atau tidak, tapi kalau orang Indonesia ke Jerman atau Filipina dimana sistemnya telah berjalan maka

manusianya bisa *tune in* di dalamnya. Ketika “budaya” atau sistem di Indonesia *semrawut*, maka semuanya ikut *semrawut*.

Dalam pengantar diskusi ini, mungkin kita dapat mengambil contoh UU '45 pasal 33. Sebenarnya, kalau dilihat lebih seksama, maka pasal ini bisa mengatur kehidupan ekonomi secara lebih sosial. Namun pada kenyatannya, pemimpin tidak konsisten antara apa yang dikatakan dengan yang dijalankan. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai filsafat, paradigma, dan konsep yang jelas sebagai landasan kegiatan. Dalam hal ini, ada sesuatu yang hilang, tidak nyambung. Apakah ini mengenai keberanian mengambil keputusan, dan ada kaitannya dengan SBY ataukah tidak? Namun, mestinya ada keberanian seperti jaman Megawati, misalnya. Silahkan, teman.

Saiful Bahari

Romo tadi menyebut soal menguatnya kelompok-kelompok fundamentalis. Ini tidak perlu dikhawatirkan karena masih ada kelompok NU dan Muhammadiyah. Saya kira yang perlu diamati adalah krisis ekonomi dan sebagainya menyangkut pola pandang masyarakat. Menguatnya gagasan fundamentalis, menurut saya, harus dilihat dari dua hal. *Pertama*, kelompok Islam yang cukup besar, yaitu NU dan Muhammadiyah gagal dalam mengartikulasikan simbol nilai-nilai dan pandangan-pandangannya dalam masyarakat yang berada di tingkat paling bawah. Ini sangat berpengaruh sekali dalam kelanjutan demokrasi karena berkaitan dengan proses kemajuan dan penghambatan demokrasi. Oleh karena itu, kalau dua kelompok besar ini gagal maka, saya kira, menjadi masalah serius yang perlu kita antisipasi.

Kedua, bukan hanya gagal mengartikulasi, tapi, seperti yang tadi disinggung Romo Magnis, bahwa di desa-desa dan di kampung-kampung kumuh dimana simbol-simbol agama yang dulu

didominasi oleh dua organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah- NU lebih banyak di wilayah pedesaan dan Muhammadiyah lebih banyak di wilayah perkotaan-sekarang sudah diambil alih sebagian besar oleh mereka. Kelompok-kelompok fundamentalis ini sudah masuk ke pesantren-pesantren, dan kyai-kyai yang dulu kiblatnya jelas sekarang sudah memiliki suatu cara pandang yang berbeda.

Selain itu, persoalan lain yang cukup serius adalah kegagalan mereka juga diimbangi oleh kelompok pro-demokrasi dalam mengartikulasikan keresahan masyarakat di tingkat bawah. Kalau pada era tahun 50-an, 60-an, terdapat ideologi-ideologi sekuler yang begitu mampu mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi dari lapis bawah, tapi sekarang, seperti yang sudah disinggung di awal, kelompok-kelompok pro-demokrasi berada di tingkat menengah. Akibatnya, mereka tidak mempunyai akar dan cabang di tingkat paling bawah. Makanya, ruang sosial yang berada di lapis bawah hanya dikuasai oleh kelompok yang kemungkinan besar telah bergeser ke fundamentalis. Oleh karena itu, saya kira kita tidak bisa mengabaikan satu analisis dan juga koreksi lebih jauh yang menyatakan bahwa lembaga keagamaan yang disebut moderat ini-NU dan Muhammadiyah- perlu mengoreksi diri.

Boni Hargens

Saya ingin memberi komentar soal Islam. Akhir era tahun 90-an, memang ada kecenderungan yang sangat tampak bahwa Islam mulai bergerak dengan semangat dan niat politik yang diterjemahkan secara keseluruhan dalam partai politik dan gerakan yang mereka buat. Pada era 80'an, gerakan dan semangat tersebut diredam sedemikian rupa oleh Orde Baru sehingga konflik negara versus Islam menjadi konflik batin. Dalam pandangan saya, fenomena tahun '90 dan setelahnya merupakan

fenomena memperebutkan Indonesia karena kelompok-kelompok yang beragam ini bertarung satu sama lain, mengklaim Indonesia, dan ingin menguasai dengan ideologinya masing-masing. Ini karena antara Islam dan negara salurannya masih kabur, gelap. Antara Islam dengan negara tidak ada proses pencerahan. Dalam tubuh Islam, belum ada penyadaran organisatoris, sedangkan di level negara tidak ada penghargaan yang cukup komprehensif menyangkut Islam sebagai sebuah agama atau aliran hidup. Jadi, sampai hari ini, hubungan antara negara dan Islam sangat kabur.

Moderator

Romo, konon pemimpin itu cermin bagi rakyat. Apakah rakyat yang salah sehingga pemimpinnya yang diangkat seperti itu?, dan walaupun pemimpinnya diganti apakah situasinya akan berubah? Apakah memang perlu proses panjang seperti tadi telah dijelaskan bahwa Indonesia harus belajar seperti Jerman dengan mengalami beberapa kali kegagalan untuk maju?

Romo Magnis

Menurut saya, tidak. Kita tidak bisa mengatakan rakyat salah karena mempunyai pemimpin seperti sekarang. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan. Jelas, sistem memang tidak menguntungkan. Orde Baru tidak memberi banyak ruang agar pemimpin bisa berkembang, dan kita mempunyai pilihan yang sangat sedikit. Di negara ini, sebetulnya, ada cukup banyak orang yang andai kata diberi kesempatan memimpin akan memberikan hasil yang lebih baik. Memang harus diakui bahwa presiden kita sekarang lemah dan menjengkelkan, tetapi bukan sebuah malapetaka. Barangkali, sistem yang ada belum mampu memberikan ruang yang cukup bagi kemunculan pemimpin-pemimpin alternatif. Bayangkan, dalam sebuah pemilihan yang akan datang, kita harus

memilih antara SBY dan Megawati. Itu masih mungkin.

Amir Effendi Siregar

Romo, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Indonesia merdeka periode '50-'59 bahkan sampai tahun 60-an, rasanya pusat-pusat kebudayaan tidak hanya di Jakarta, tetapi ada di Medan, Padang, Makasar, Manado, dan Surabaya. Di Medan banyak orang Batak, banyak tokoh-tokoh budaya, dan dari sana muncul tokoh-tokoh besar, budayawan besar, seperti Sultan Takdir. Di Jawa, juga ada tokoh besar. Pramudya Ananta Toer, misalnya, juga tokoh besar. Umumnya, budayawan-budayawan besar ini merasa Indonesia. Mereka merasa Indonesia dimanapun berada. Menurut Romo, apakah benar ada suatu sistem yang merusak meskipun dalam hal ini tidak untuk di-*blame*, yakni Orde Baru yang sangat otoritarian dan komersial. Persoalan ini kemudian berusaha dipecahkan dengan desentralisasi untuk memunculkan kembali *diversity-diversity*. Bagaimana menurut Romo?

Romo Magnis

Mungkin yang lain mau menjawab.

Ari Sudjito

Pada dasarnya, krisis moral di kalangan masyarakat dirasakan, terutama, pada saat politik belum bisa menjawab kebutuhan. Dalam berbagai *event*, teman-teman mencoba membuat penghubung antara perubahan politik dengan usaha menjaga suasana ekonomi yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Kadang, saya merasa bahwa Orde Baru meninggalkan bercak-bercak begitu banyak di masyarakat yang sebetulnya mengurangi imajinasi untuk maju. Sebenarnya, rakyat mengetahui hal itu. Namun, tidak ada pilihan untuk keluar secara radikal. Radikalisme di kalangan masyarakat belum meyakinkan. Dalam tiga tahun terakhir, rakyat makin frustrasi sebagai

akibat masih terpuruknya situasi ekonomi di negeri ini.

Saya mempunyai riset mengenai munculnya perda syari'ah, soal formalisasi agama di beberapa provinsi. Sebenarnya, ini bukan kehendak *society*, tapi paket politik nasional yang pada saat amandemen UUD '45 gagal. Kemudian, paket-paket tersebut disebarkan ke daerah, dan kemudian dijadikan sebagai alat "jualan". Oleh karenanya, tidak ada hubungannya dengan ideologi *society* dan pilihan formalisasi. Sebaliknya, lebih merupakan refleksi kepentingan eliti-elit lokal. Kita tidak perlu terlalu risau mengenai apakah masyarakat mengakui formalisasi agama, dalam hal ini Islam, sebagai pilihan. Ini karena tidak ada akar sosiologis, kultural ataupun historis yang mampu menjelaskan hal tersebut. Namun, yang saya risaukan adalah kefrustasian yang berkembang pada masyarakat akan melahirkan dis-orientasi di tingkat *society* sebagai akibat menularnya kerusakan struktur politik formal ke masyarakat bawah. Sementara pada waktu bersamaan, ketahanan sosial di aras lokal mulai tergerus oleh problem-problem kemiskinan, persoalan kelangkaan, yang tidak mengalami perubahan meskipun telah dilakukan pilkada dan sebagainya. Kondisi ini bercampur aduk, dan, seperti diungkapkan Bung Saiful, gerakan pro-demokrasi gagal dalam membuat panduan atau *map* untuk menolong masyarakat keluar dari kefrustasian semacam itu.

Oleh karena itulah, kita perlu melakukan *mapping* ulang mengenai problem-problem yang tadi telah disebutkan. Pilihan-pilihan rakyat yang pragmatis sebenarnya bukan tidak tahu akan masalah, tapi lebih karena tidak adanya daya kekuatan untuk mengubah secara radikal. Selanjutnya, mereka mendelegasikan kepada elit-elit lokal atau demokrasi representasi walaupun representasi yang dimaksudkan tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat itu sendiri.

Di negara ini, sebetulnya, ada cukup banyak orang yang andai kata diberi kesempatan memimpin akan memberikan hasil yang lebih baik. Memang harus diakui bahwa presiden kita sekarang lemah dan menjengkelkan, tetapi bukan sebuah malapetaka. Barangkali, sistem yang ada belum mampu memberikan ruang yang cukup bagi kemunculan pemimpin-pemimpin alternatif. Bayangkan, dalam sebuah pemilihan yang akan datang, kita harus memilih antara SBY dan Megawati. Itu masih mungkin.

Untuk keluar dari situasi semacam ini, menurut saya, lokus negosiasi seyogianya disebar, tidak hanya di pusat. Otonomi daerah sebagai ruang negosiasi sebagai upaya mendemokratisasi yang selanjutnya ditujukan untuk menjawab kesejahteraan gagal karena masih terfomalisasi. Kita harus mencegah tingkat resiko rusaknya *local institution* atau *social capital*. Jika tidak, maka saya khawatir penularan ini akan semakin berat di tingkat *society*. Sekarang, ada *moment* perubahan UU 32/2004. Kalau dulu UU 22/1999 dari *setting* otonomi lalu resentralisasi UU 32. Sekarang, mau dipecah menjadi 3, yakni UU Pilkada, UU Desa, dan UU tentang otonomi daerah atau pemerintahan daerah. Namun, ketiganya mempunyai nalar dan kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. UU Pilkada yang mempunyai kepentingan partai politik, UU pemerintahan daerah yang mempunyai kepentingan bupati, dan UU tentang desa yang mempunyai kepentingan kabupaten karena kabupaten selama ini belum mengakui desa sebagai institusi pemerintahan. Jadi, ada dua hal pokok yang perlu digarisbawahi, yakni menyebar ruang negosiasi dan mencegah kerusakan *local institution*.

Ketiga, membuat *road map* untuk mencari jalan tengah karena sekarang mengajak rakyat marah tidaklah sukar? Persoalannya siapa yang mengajak? Bupati yang kalah dengan mudah bisa memberi uang dan mengajak rakyat untuk marah. Kalau yang mengajak marah orang yang mempunyai komitmen demokrasi bisa ditunjukkan jalannya. Kalau tidak? Saya tidak tahu.

Moderator

Boni, tadi Romo mengatakan ada krisis moralitas elit. Itu elit siapa? Apakah kita juga termasuk? Jadi, kalau nanti kita masuk dalam kekuasaan, maka akan masuk juga. Riset Demos seperti apa? Apakah ada semacam *mapping*?

Nur Iman Subono

Demos telah mengadakan survei di 33 provinsi dari tahun 2002-2005. Tahun 2007 kita sudah mulai melakukan penelitian yang hampir sama dengan yang dilakukan sebelumnya dengan melihat *trend* atau gejala-gejala baru. Tapi, diantara dua penelitian besar itu kita juga melakukan penelitian lainnya. Salah satu tuntutannya adalah perlunya *repositioning*.

Sebagai contoh, dulu teman-teman yang mengelola atau mendorong teman-teman di sektor buruh, sekarang sektor buruhnya mempunyai organisasi sendiri. Rekan Saiful menjawab perubahan ini dengan mentransformasikan kawan-kawannya di LSM menjadi partai politik. Ini bisa menjadi salah satu solusi. Namun, di titik lain, kita menemukan beberapa kasus dimana organisasi rakyat punya kesadaran politik yang lebih maju dibandingkan dengan teman-teman LSM seperti Serikat tani atau nelayan.

Kelemahan lain adalah mereka masih terjebak pada *single* isu. Mas Ari benar, kekuatan mereka untuk menerobos tidak terlalu besar. Padahal, rekomendasi yang ditawarkan adalah upaya mengombinasikan beberapa isu. Misalnya, teman-teman di serikat buruh masih belum mau bekerja sama dengan teman-teman yang digerakkan oleh anti korupsi karena dianggap isunya tidak berhubungan. Padahal, sangat berhubungan. Rekomendasi kita adalah memberikan semacam informasi kepada mereka bahwa itu justru yang sebetulnya bisa menandingi elit, yang tadi dikatakan mengalami krisis moral di tingkat lokal.

Kedua, sebenarnya, beberapa studi kasus yang diteliti Demos merupakan eksperimentasi demokrasi di tingkat lokal yang paling mengagumkan. Sebagai contoh, teman-teman generasi muda Hindu di Bali bertarung di tingkat lokal karena ternyata desentralisasi hanya memberikan kesempatan kepada elit-elit Bali yang kastanya tinggi sehingga mereka merebutnya melalui dekonstruksi

teologi. Teman-teman di Sumatera Barat melihat Nagayo menjadi salah satu kajian mereka tahun 2010 untuk menjadi basis komunitas. Mereka cukup berhasil untuk kasus-kasus korupsi di Sumatera Barat. Anggota DPRD masuk penjara. Ide mereka kemudian diambil oleh teman-teman di Aceh, tapi untuk eksekutifnya sehingga Abdullah Puteh masuk penjara.

Eksperimen-eksperimen ini sebetulnya harus menjadi *consent* kita karena benar-benar luar biasa. Mereka mencari celah-celah di saat ketidakberdayaan atau kemampuan mereka untuk melawan masih belum kuat. Jadi, saya seperti Romo masih optimistis jika melihat kasus-kasus lokal tersebut. Memang, kita tidak tahu daya tahan mereka atas "godaan" karena penelitian di Bengkulu memperlihatkan model seperti ini paling mudah goyah, terutama di tingkat kota karena ada politik uang dan premanisme. Di pedesaan, di gunung, mereka cukup punya keberanian untuk melawan.

Imam Yudotomo

Kalau saya melihat sebetulnya kita tidak perlu merasa aneh kenapa pemimpin sekarang seperti itu. Ini karena merupakan produk Orde Baru. Jika dilihat dari usianya, pemimpin Indonesia semuanya merupakan produk Orde Baru. Alumni Orde Baru yang sangat ketat dalam melaksanakan kebijakan depolitisasi yang mengarah kepada de-ideologisasi dan de-organisasi. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran kenapa pemimpin kita tidak mempunyai visi. Jadi, menurut saya, yang penting sebetulnya bagaimana melakukan pendidikan politik. Kita harus mempunyai model pendidikan politik yang menghidupkan kembali ideologi-atau jika ideologi mungkin mengerikan-maka cita-cita. Rakyat sekarang tidak mempunyai cita-cita, pemimpin-pemimpin kita tidak mempunyai cita-cita. Menurut saya, cita-cita itu penting. Dulu, Soekarno, Syahrir, Hatta, Tan Malaka mempunyai cita-cita

yang jelas. Sekarang, kita tidak mempunyai cita-cita. Persoalannya adalah bagaimana memimpin negara tanpa mempunyai cita-cita? Padahal, cita-cita akan menumbuhkan visi dan segala macamnya. Jadi, menurut saya, ini merupakan generasi yang hilang. Kita mungkin sudah melakukan pemilihan umum, tapi kita harus mulai dengan pendidikan politik yang jelas.

Moderator

Setelah kemerdekaan kita mempunyai cita-cita, katakanlah, membangun jembatan emas, negara yang sejahtera, sifatnya bisa merangkum, merangkul sangat banyak kekuatan, tapi sekarang ini nampaknya tidak ada. Tadi, Bung Imam mengatakan bangsa ini perlu cita-cita. Cina mempunyai cita-cita, ingin menjadi kekuatan ekonomi terbesar. Namun sebenarnya, ini merupakan kelompok elit di atas yang mencoba menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dan mengimplementasinya. Vietnam ketika menang perang meskipun babak belur, melalui kelompok elitnya, juga mempunyai cita-cita, yaitu membangun Vietnam. Apakah ada kaitannya dengan budaya karena konon ada yang bilang budaya Korea sangat teruji, alot, dan sebagainya. Vietnam juga begitu sehingga Amerika meskipun dengan bomnya yang ratusan juta ton tidak mampu memenangkan peperangan. Di Indonesia, mungkin Romo bisa menjelaskan sebagai ahli kebudayaan Jawa, apakah terdapat hubungan dengan budaya yang ideal? Apakah ada kaitan antara budaya atau yang lebih konkret nilai-nilai, yang mampu memperkuat sosial kapital tadi. Bisa memiliki cita-cita yang ditopang bersama, dan mampu melakukan sesuatu yang besar karena negeri ini besar secara spasial, secara geografis besar, dari segi jumlah rakyatnya juga besar, dan dari segi sumber daya alamnya juga besar, segala-galanya besar. Namun, dalam hal yang sederhana, misalnya, negosiasi dengan

bangsa-bangsa lain sangat lemah, kalah terus. Dengan negara di segi tiga, Malaysia, Brunei ataupun Singapura seringkali kalah. Belum lagi dengan negara besar seperti Amerika dan seterusnya.

Amir Efendi Siregar

Saya tambah sedikit apa yang disampaikan Bung Imam tadi. Tanpa visi, misalnya, tidak ada cita-cita. Sebenarnya, dulu ketika pendiri republik ini bicara besar, mereka semua nampaknya mempunyai cita-cita, dan kemudian mereka tuang ke dalam konstitusi, dalam pembukaan UUD '45 dan seterusnya. Pada era tahun 50-59an, kita masuk ke demokrasi, yang kita sebut demokrasi liberal. Mereka tuangkan dalam konstitusi RIS. Kembali tahun '59, melalui dekrit kita kembali ke UUD '45.

Bagi saya, sebenarnya, cita-cita untuk republik ini hanya yang tertulis. Sekarang! Tidak masuk dalam pikiran, tidak masuk dalam hati para pemimpin. Saya juga tidak mengerti apakah amandemen 1,2,3,4, hanya di mulut yang kemudian dituangkan dalam tulisan? Dalam praktiknya, tidak ada hubungan antara yang tertulis dengan yang dilakukan. Ini yang sebenarnya terjadi, yang kita sebut tanpa *vision*. Sebagai contoh, dalam bidang media. Konstitusi kita jelas mengatakan bahwa kita bukan liberal, tetapi sosial demokrat yang ditunjukkan pasal 33-34. Itu *clear*. Pembukaan UUD '45 itu *clear*, tapi dalam praktiknya media dibiarkan *private*. Betul-betul sangat liberal dan hampir-hampir terjadi dimana-mana. Padahal, kalau pemimpinnya mempunyai *vision*, mengerti masalah dan sesuai dengan konstitusi yang dia buat, *diversity of voices* harus tetap dijaga.

Peserta

Konstitusi bukan mereka yang membuat, tapi dibuat oleh pendahulu-pendahulu mereka.

Kita harus mempunyai model pendidikan politik yang menghidupkan kembali ideologi-atau jika ideologi mungkin mengerikan-maka cita-cita. Rakyat sekarang tidak mempunyai cita-cita, pemimpin-pemimpin kita tidak mempunyai cita-cita

Amir Efendi Siregar

Tapi bukankah mereka melakukan amandemen? *Diversity of voice* harus dijaga, tapi yang terjadi tidak demikian. Sebaliknya, di bidang televisi, sudah ada usaha tertulis dalam membuat *diversity of voice*, *diversity of ownership*, *diversity of content* melalui undang-undang, tetapi tidak diimplemen-tasikan. Inilah *problem* yang kita hadapi. Apa yang tertulis hampir tidak mempunyai kesesuaian dengan apa yang dilakukan, dan itu terjadi di hampir semua lini. Saya setuju dengan Boni ataupun Ari mungkin harus lewat lokal, dan tidak berharap lagi dari atas karena di tingkat lokal masih ada regulasi-regulasi yang dapat dipraktikkan.

Sukma Widyanti

Menyambung mengenai lokal tadi, sekarang sering diungkap *local wisdom*. Bagaimana nilai-nilai lokal harus diangkat, harus dilestarikan, tapi *in other hand* saya melihat sebagai ancaman. Sebuah Bangsa Indonesia kemudian memunculkan nilai-nilai tradisional lama yang penuh dengan nilai-nilai feodalisme. Dalam hal ini, bukankah tidak semua nilai lokal adalah baik? Di sana, kental sekali nilai feodalisme, yang kondisi politik sekarang membuat pemimpin-pemimpin lama lagi yang naik ke atas; para raja-raja, para lalu atau apapun namanya yang pada dasarnya adalah golongan priyayi di masing-masing wilayah sehingga menutup lagi akses masyarakat bawah untuk bisa menempati posisi sebagai pemimpin. Dalam pemahaman saya, nilai-nilai lokal ini menjadi *blunder*. Inilah yang harus diarahkan oleh pemimpin nasional. Masalahnya, bukan ada budaya 1 atau budaya 2 yang semua bersaing, dan bukan lagi merupakan kekayaan Indonesia. Menurut saya, pemimpin nasional yang baik adalah yang bisa menegaskan bahwa kita beda, tapi tetap Indonesia yang mempunyai nilai-nilai Pancasila yang harus dijaga bersama.

Amir Efendi Siregar

Saya menambahkan sedikit. *Diversity of voices*-nya sekarang ini mati. Coba lihat TV kalau indikatornya media. Hampir tiap lebaran yang keluar Jakarta pulang ke kampung, buat apa untuk orang Riau, tidak ada gunanya. Selain itu, suaranya sama, tidak ada bedanya dengan jaman otoritarian. Media cetak orientasinya 60% berada di Jakarta. Kalau kita lihat, maka budaya lainnya tidak ada. Kalau di negara-negara, katakanlah, Skandinavia, Swedia, misalnya, negara turun tangan untuk menghidupkan *diversity of voices* dengan membantu koran-koran kecil. Ini karena koran-koran tersebut tidak bisa *compete* dengan koran-koran *mainstream*. Oleh karena itu, harus ada *limited state intervention* untuk menghidupkan *diversity of voices*. Di negara kita, bukannya begitu, tetapi *free fight*. Di negara-negara Eropa Barat, khususnya negara-negara Skandinavia sebagaimana disebutkan di awal, dibantu lewat *training*, *event*, dan lain sebagainya supaya *diversity of voices* timbul.

Ari Sudjito

Sebetulnya, yang terjadi selama ini adalah desentralisasi otonomi dan demokrasi sebagai sesuatu yang terpisah-pisah. Memang ada desentralisasi secara formal, tapi sebenarnya dari sistem negara ke negara, terus dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Otonomi dalam hal keuangan dan yang lainnya, tapi masih merupakan *bad sending* di tingkat lokal. Demokrasi yang saya bayangkan dalam era reformasi, misalnya, ada ruang yang tersedia. Jadi, masyarakat bisa merumuskan kebijakan pembangunan daerah, dan ini tidak tercermin dengan konkret. Oleh karena itu, pekerjaan rumah kita terbesar salah satunya adalah bagaimana mencegah pembajakan-pembajakan di aras lokal yang sebetulnya dilakukan dengan penuh kecurigaan kepada *society*?

Kebangkitan lokal berdasarkan sentimen etnis atau lokal sangat sedikit sekali. Kalaupun ada hanya *event-event* partai politik, dan itu pun tidak terekspresikan dalam *policy* dan praksis. Oleh karena itu, ruang negosiasi yang dulu sempat dibuka pada awal reformasi, saat ini, mari kita hidupkan dalam kerangka membela rakyat atau komunitas dengan desentralisasi. Itu artinya kecenderungan berorganisasi, komunitas diubah dengan pendidikan politik, mendemokrasikan mereka. Gejala etnisitas yang muncul tersebut jangan sampai menjadi stigma untuk kemudian membuat niat baik desentralisasi dan demokrasi berhenti. Pada tahun 2004, misalnya, pada waktu pemilihan presiden, semua calon presiden membuat risalah dirinya ada kaitannya dengan raja-raja. Itu sebetulnya merupakan siasat. Dalam hal ini, elit mencoba menenggelamkan inisiatif ke-Indonesia-an dari lokal yang sudah berkembang.

Saya setuju dengan Bang Amir. Kemarin ada cerita salah seorang teman yang mau menginisiasi TV lokal, tapi tidak ada ruang karena sudah dibeli oleh RCTI, SCTV, dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa udara saja sudah ada kapling-kapling-nya, laut apalagi. Untuk menyediakan ruang negosiasi ini, kadang-kadang kita baru berfikir lokal ketika rakyat sudah betul-betul marah. Aceh baru diberikan otonomi setelah "perang" habis-habisan. Nanti Papua juga begitu. Sebetulnya, ini tidak perlu terjadi kalau bangsa kita mempunyai pemimpin yang bisa merekam arus bawah. Laut kelihatannya tenang, tapi di bawah hangat sekali, sesuatu yang terjadi pergolakan. Saya menilai masih cukup, sebetulnya, kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Hanya saja, antara *set up* kelembagaan dengan *value* harus disambungkan karena seseorang melihat sentralisasi demokrasi sedang merayakan oligarki, dan merayakan sentralisasi yang cara kerjanya dipindah ke daerah.

Moderator

Romo Karl Mark bilang, struktur itu mempengaruhi manusianya. Kalau orang beragama bilang, manusia moralnya harus diperbaiki, kalau kita moderatlah, yang berada di tengah-tengah. Bagaimana Bung Boni, ahli politik Indonesia, apakah karena strukturnya yang salah? Jika dilihat partai politik, maka hampir semuanya kerakyatan. Golkar kerakyatan, PDIP, sampai yang baru dari Bung Saiful juga kerakyatan.

Boni Hargens

Saya mulai dengan cerita. Saya pernah diancam oleh Ketua Fraksi Demokrat beberapa bulan yang lalu karena saya bilang presiden seperti supir bajaj. Jadi, kalau jalan mau belok kiri atau kanan, maka kita tidak tahu karena tidak ada lampu *sign*-nya dari pemerintah. Kalau mau belok kiri atau kanan hanya presiden dan Tuhan yang tahu. Pernyataan saya ini dikutip oleh *Koran Tempo* dan beberapa koran lain. Lantas, saya diancam oleh Ketua Fraksi karena menghina presiden. Saya bilang, “Bapak terima kasih karena dalam satu minggu baru bilang mengancam saya”.

Bagi saya, Indonesia memang masih sebuah persoalan. Sebentar lagi kita merdeka, 17 Agustus. Saya ingat ada perdebatan serius pada tahun 1930-an. Sutan Takdir Alisyahbana berantem dengan Supomo Purwacaraka hingga menyangkut: “Apakah sebelum 1908 sudah Indonesia atau bukan?” Purwacaraka mengatakan bahwa Indonesia Majapahit dan Hayam Wuruk berantem untuk Indonesia, tapi bagi STA tidak. Indonesia baru ada sejak tahun 1908 dan setelahnya. Poin STA, Indonesia adalah sesuatu yang dibentuk secara sadar, disepakati bersama, bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Jadi, inti bernegara dan berbangsa adalah kesadaran dan penyadaran. Dalam hal ini, saya agak kurang setuju dengan Anderson yang menyatakan bahwa keberadaan sebuah bangsa ditentukan oleh

kemampuannya untuk membayangkan dirinya sebagai bangsa, *imagined community*, dan pembayangan horizontal. Pembayangan itu, bagi saya, harus selalu horizontal dan vertikal. Horizontal tidak hanya ke depan, tapi juga ke belakang. Kalau kita mau bertahan sebagai bangsa, maka tidak hanya berfikir apakah kita mampu membayangkan diri. Persoalannya adalah mengapa kita harus membayangkan diri sebagai bangsa (Indonesia)?, dan kalau energi membayangkan diri sebagai bangsa seperti dalam kuadran itu S+, sementara energi untuk tidak membayangkan diri karena kekecewaan seperti ketidakadilan dan segala macam itu, S-, dan *point*-nya adalah enam, katakan, dan ke kanan adalah 5 maka hasil dari berbangsa kita adalah -1. Kita gagal. Saya kira Anderson tidak memikirkan persoalan ini.

Lalu, soal keberbangsaan yang dibayangkan vertikal. Di sinilah, perlunya kepemimpinan politik. Bagaimana kepemimpinan politik bisa merangsang rakyat untuk berfikir menjadi bangsa, menjadi Indonesia. Maka, kepemimpinan politik paling dasar harus menjawab dasar dari bernegara, yaitu kemakmuran dan keadilan. Baru kedua adalah memberikan visi mau kemana kita ke depan, dan Indonesia adalah suatu persoalan karena satu hal dasar, menurut saya, selain kepemimpinan politik, cita-cita kolektifnya tidak ada. Kita tidak mempunyai citra kolektif sebagai suatu bangsa. Citra kolektif ini saya bagi tiga, yakni masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kalau citra kolektif masa lalu, katakanlah, kita sepakat bahwa sebagai bangsa yang sama-sama dijajah, dan seterusnya. Namun, dalam pemahaman saya, alasan ber-Indonesia tidak hanya cukup hanya sama-sama dijajah. Aceh tidak secara riil dijajah, dan Papua pun berhak mendefinisikan diri sebagai bukan bagian dari Indonesia yang dijajah. Maka, mereka dapat mengatakan bukan bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mencari satu dasar yang solid untuk

Diversity of voice harus dijaga, tapi yang terjadi tidak demikian.

Sebaliknya, di bidang televisi, sudah ada usaha tertulis dalam membuat diversity of voice, diversity of ownership, diversity of content melalui undang-undang, tetapi tidak diimplementasikan. Inilah problem yang kita hadapi.

bersepakat bahwa kita adalah Indonesia. Itu adalah pondasi yang harus dinamis dan harus di-redefinisi.

Saya kira, kita perlu mengatakan bahwa kita sudah sepakat pada masa lalu. Sejak dulu, proklamasi kemerdekaan sudah menjadi dasar berbangsa. Oleh karena itu, harus terus dihidupkan dan mesti dikritisi. Di sinilah, perlu yang namanya pendidikan politik agar ada nilai-nilai politik kenegaraan yang ditransfer ke dalam pendidikan. Mengapa kita harus hormat kepada merah putih, mengapa Pancasila harus dipegang, dan, saya rasa, kita gagal dalam hal itu. Pancasila belum menjadi pedoman hidup. Sebaliknya, masih menjadi wacana, masih menjadi tameng, bahkan menjadi topeng sehingga ketika ruang kebebasan dibuka semua orang berbicara sembari memakai peci yang lain, jubah yang lain, dan sebagainya. Lalu, kita pun bingung, apakah Pancasila mempunyai bentuk ataukah tidak? Masihkah kita yakin bahwa Pancasila menjadi dasar untuk tetap maju sebagai Indonesia, dan saya rasa, hari ini, kita berada di wilayah persimpangan itu? Mau maju, tapi masih di tempat, dan ini bersumber pada kepemimpinan politik yang tidak jelas.

Moderator

Sekarang, ada yang mengatakan bahwa di Indonesia hanya ada satu partai politik, PKS. Dulu, pernah ada PKI. Pertanyaannya adalah apakah memang bangsa ini kira-kira masih memerlukan pemimpin yang kharismatik, otoriter atau bagaimana? Romo Magnis sebagai ahli budaya Jawa yang sangat terkenal barangkali bisa menjelaskan.

Romo Magnis

Sangat sulit dijawab. Kalau kita mempunyai seorang pemimpin yang kuat, mempunyai kepribadian, cita-cita dan keyakinan, pemimpin semacam itu bisa berfungsi dalam kediktatoran dan sebuah demokrasi. Demokrasi juga tergantung pada pemimpin. Kalau kualitas pemimpin

baik, maka saya kira apa yang disebut sebagai sisa-sisa feodalistik tidak menjadi masalah malah bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat karena kebijakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Sekarang, seakan-akan kita mengharapkan seorang pemimpin yang lebih baik, seorang pemimpin yang segar. Ditinjau dari perspektif teori politik, sesuatu yang cukup konyol karena merupakan harapan, dan tidak mempunyai unsur dalam teori. Itu unsur penting yang sangat sulit ditentukan. Saya kira kualitas pemimpin tidak bisa dijelaskan dengan budaya. Karena bisa saja, seorang Pak Harto yang memang punya banyak kelemahan, tapi dia seorang Jawa tulen yang dalam arti tertentu hebat, sama sekali tidak bisa disangka. Jadi, sulit sekali. Kita memang harus membangun struktur politik dan mengharapkan kebijakan ekonomi yang membuat rakyat bisa sibuk.

Saya ingat dalam sebuah pertemuan Rabu-an, dan itu sudah lama terjadi. Pertemuan di rumah Pak Imaduddin dan dihadiri oleh diantaranya Eki Syahrudin. Ia mengatakan, "Kalian bisa pilih, Gus Dur atau Amin Rais. Pilih Amin Rais yang omong keras, tapi orangnya terlalu sibuk mencari duit. Pilih Gus Dur bagus-bagus, tapi orangnya membakar gereja."

Yang saya ingat mengenai orang-orang Muhammadiyah yang berada di kota, yang *nota bene*, tidak terlibat dalam pembunuhan komunis '65 karena mereka semua dagang, pokoknya sibuk. Orang seperti itu sangat penting. Kalau NU bagus-bagus, tapi harus hati-hati karena ikut terlibat pembunuhan komunis. Mungkin, kehidupan pertanian tidak memberikan peluang kepada masyarakat karena ternyata kita tidak mempunyai kebijakan ekonomis yang membuat orang daerah menciptakan lebih banyak uang. Prioritas pada daerah tidak ada sehingga di daerah Jawa Tengah yang kita lihat hanya orang tua, orang muda lebih suka tinggal di daerah paling kumuh di kota.

Itu lebih baik bagi mereka daripada menggarap sawah atau ladang. Ini sebetulnya masalah kebijakan ekonomi. Andaikata di desa diciptakan lebih banyak uang, orang juga akan ke desa secara otomatis.

Nur Iman Subono

Kaitannya dengan komentar Boni, saya ingin bertanya lebih jauh bahwa Pancasila memang belum menjadi milik bersama karena setelah Soeharto turun semua orang buka identitas dan ideologinya masing-masing. Tapi, saya kira kita harus membedakan Pancasila pada periode Soekarno dan pada periode Soeharto. Seingat saya, pada masa Soekarno, jelas. Karena kemajemukan masyarakat, Pancasila dipakai sebagai panduan. Tapi, pada masa Pak Harto, Pancasila dipakai sebagai alat untuk menyatukan orang. Menjadi acuan selama kurang lebih 30 tahun. Pancasila sudah diceraibut dari fungsi sebelumnya sehingga wajar kalau sekarang ini orang belum merasa memilikinya karena trauma. Misalnya, ide negara yang kuat, semua orang trauma. Negara yang kuat tidak berarti menjadi otoriter, tapi semua memiliki kekhawatiran. Penelitian Demos di tingkat lokal menemukan adanya semacam kerja sama yang *unholy alliance* antara komunalisme, sektarianisme dengan bisnis. Keduanya saling menopang. Masyarakat benar-benar dikepong.

Selanjutnya, merespon Sukma tadi. Saya termasuk orang yang memang hati-hati dengan *local wisdom* karena menjebak. Kita jangan membayangkan desa seperti waktu SD. Sebuah desa yang tenang dan harmonis. Sebaliknya, desa pun penuh pergolakan. Jadi, kita harus selalu memeriksa yang disebut dengan nilai-nilai lokal. Kita harus selalu memeriksa apakah nilai-nilai lokal ini dipromosikan secara demokratis atau tidak? Kalau nilai lokal melahirkan feodalisme ataupun raja maka saya agak ragu. Seperti telah disampaikan Ivan,

memang ada *ending* ketika situasi patron itu buruk, dan mereka melawan dengan mencari alternatifnya melalui patron baru. Sekali lagi, seperti yang diungkapkan Mas Ari, ketidakberdayaan menyebabkan mereka sering kali harus pragmatis. Padahal, kita ingin ada pengorganisasian, punya visi dan dilakukan secara demokratis. Namun, mereka berpacu dengan waktu, dikepong oleh komunal-komunal yang masuk di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten.

Moderator

Saya menambahkan sedikit. Indonesia tidak berada di bumi yang vakum, ada kaitannya dengan pengaruh dari luar. Amerika Serikat merupakan contoh yang menarik bagaimana pengumpulan kekuatan ekonomi yang dikenal dengan pembangunan dalam negeri, *free fight capitalism*, tapi ada gerakan lokal. Bagaimana dengan Indonesia apakah seperti itu? Barangkali, pengalaman Bung Ari di lapangan atau memang ada sesuatu yang belum matang?

Boni Hargens

Masalah kita adalah elitisme yang masih mendominasi di segala ruang, dan bahkan judul diskusi ini juga mencerminkan bahwa kita semua penganut pandangan elit yang percaya bahwa perubahan hadir dari kepemimpinan kolektif, dari atas. Buku **Max Lane** menurut saya sangat bagus, "Bangsa yang Belum Selesai". *Point* menarik buku itu adalah ketika ia mengatakan, "perubahan itu datang dari bawah dan jangan terlalu percaya pada sistem, jangan terlalu percaya kepada kepemimpinan kolektif, tidak hanya itu yang memerdekakan kita". Saya kira, kalau kita berani mengubah arah bandul ini maka akan terlihat jelas arah perubahan. Selama ini, kita masih begitu percaya kepada kepemimpinan. Maka, dalam ruang inilah, diskusi kita soal lokal *value*, dan segala macam perlu diperlihatkan dan diperdayakan. Karena sepanjang sekian

dekade kita ber-Indonesia, nilai lokal ini tidak pernah terekspresikan secara merdeka, selalu disaring, dan kemudian dibentuk ulang oleh rejim sehingga yang terlihat adalah budaya nasional yang samar-samar.

Saya ingat perdebatan dan diskusi di departemen dalam negeri tahun 2005 ketika diundang guna merumuskan etik politik nasional. Perdebatan yang tidak tuntas dalam diskusi tersebut adalah budaya nasional Indonesia itu apa? Budaya lokalkah? Apakah perekatan budaya lokal menjadi budaya nasional merupakan sesuatu yang bersenyawa atau hanya berkumpul begitu saja? Kalau bersenyawa maka hal ini mengandaikan bahwa budaya nasional merupakan sesuatu yang lain lagi, bukan sekedar kumpulan dari lokalitas-lokalitas. Saya kira, kita juga bingung dalam hal ini, dan memang budaya Indonesia yang benar-benar Indonesia tidak ada, pasti adalah budaya inter-lokal dan ditambah lagi dengan pengaruh global.

Tadi ada diskusi juga di Jakarta Media Center yang hadir dari NU, Ahmad Baso, dan Profesor Munir. Diskusi tersebut cukup marak karena ada buku terbaru tentang *Islam in Asia*, dan buku tersebut ditulis oleh orang Barat. Di situ, katanya, NU diposisikan moderat. NU itu seksi dan oleh Barat digiring sedemikian rupa untuk mendukung liberal dan segala macam. Dalam hal ini, NU merasa dirugikan. Namun, menurut saya, itu resiko paling buruk keberadaan NU di Indonesia karena menjadi salah satu alternatif terbaik untuk saat ini dalam penguatan demokrasi. Tapi, apakah nilai-nilai lokal kita hanya sejauh ini, dan saya kira ruang-ruang ini perlu terus dihidupkan dan diberdayakan?

Hariyadi Wirawan

Artinya, pada tahun 1908, ketika kita bertemu Jong Java dan kawan-kawan, dan sebagainya dimulai dari elit, tetapi 100 KM dari pertemuan itu tidak ada yang

berbicara bahwa kita akan bersatu sebagai sebuah bangsa.

Waktu kesepakatan Timor-Timur dulu, kita bilang rakyat Timor-Timur ingin berintegrasi dengan Indonesia. Padahal, hanya sebelas orang, tapi kesepakatan awal memang bangsa kita mencari bentuk dari hasil begitu panjang penjajahan bangsa asing, dan merasa bahwa kita adalah orang yang terpinggirkan. Oleh karena itu, *somehow*, mendorong kebersamaan diantara sebagai orang yang tertindas, yang kemudian disebut sebagai *nation building*. Proses ini tidak pernah tuntas, tetapi mentah di tengah jalan karena pada saat proses sedang berlangsung, saya pikir, Soeharto merusak segalanya. Masuklah budaya dengan nuansa politik yang kental. Barangkali, dia tidak suka dengan Soekarno sehingga situasinya dibalik. Akibatnya, muncullah individualisme yang mementahkan semua premis tentang kebangsaan yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk menjadi satu bangsa.

Kita juga tidak berupaya menjadi semacam amal dan nasib sebagai suatu nilai baru, tetapi sampai pada syarat saja kita sudah merasa *on the right post*. Masalahnya, Soeharto mengajarkan kepada kita, dan inilah yang ditinggalkan oleh beliau bahwa pencapaian suatu tingkat kemakmuran bisa melalui koridor individual, meninggalkan banyak kebersamaan yang telah dibina Soekarno. Indonesia sekarang ini mengisinya lagi dengan nilai-nilai luar. Vakum ini diisi dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya global. Masuklah fundamentalisme, masuk ekstrimisme, yang kiri-kanan-tengah. Saya ingat betul waktu saya masih kecil adalah tidak masalah dengan latar belakang. Sekarang, berkenalan dengan orang akan ditanya, 'Anda lebaran atau natalan?' "Kenapa anda bertanya seperti itu? Kalau saya natalan apakah Anda menjauhi saya, kalau saya lebaran apakah Anda menjauhi saya?" Tergantung dari mana posisinya. Menurut saya, ini adalah salah satu ciri

bangsa yang *insecure*, tidak aman sehingga rasa ketidakamanan tersebut dianggap sebagai situasi yang sangat jelek. Bangsa yang kemaruk, bangsa yang tidak mau memberikan kesempatan kepada saudara-saudara lain untuk bisa menikmati kesetaraan dan sebagainya. Jadi, kalau kita melihat orang desa tidak peduli pada yang lain sebenarnya dimulai dari masukan nilai demokrasi yang keliru, demokrasi diimpor begitu saja. Banyak kasus terjadi bahwa bangsa yang mempraktikkan demokrasi liberal semacam itu, dan dilaksanakan pada situasi yang tidak tepat maka akan mengalami kehancuran. Rusia mengalami hal itu, dan Cina belajar bahwa demokrasi tidak bisa dipakai pada saat perut masih kosong sementara kita sudah berjingkrak-jingkrak memuji demokrasi pada saat derajat kita masih “keleleran”. Akibatnya, demokrasi hanyalah satu tempat dimana kita bisa mempraktikkan kemunafikan seluas-luasnya. Bangsa kita, mohon maaf, sangat munafik.

Moderator

Tadi Romo geleng-geleng kepala waktu dibilang, “buat apa demokrasi kalau perut masih kosong, mungkin mempunyai definisi demokrasi yang berbeda?”.

Romo Magnis

Saya juga tidak begitu setuju pemilihan Soekarno. Menurut saya, tahun '65 Soekarno sudah membawa bangsa ini ke kehancuran. Kalau terjadi pembunuhan semacam ini, maka persatuan tidak berhasil seperti waktu itu, apalagi orang kelaparan belum sekelaparan tahun '61, '62 dimana orang dari Gunung Kidul dibawa ke Yogyakarta, dan diturunkan di jalan-jalan supaya bisa makan dari tempat sampah karena di Gunung Kidul sudah tidak ada makanan lagi. Bagi saya, tidak begitu gampang. Soeharto dulu mulai dengan pembangunan, dan akhirnya orang bisa makan, dan saya tidak mau menyangkal bahwa ada banyak yang

salah. Soeharto tidak tepat jika dituduh seorang individualis, dalam hal itu, memang merupakan salah satu dosa beliau. Mengenai demokrasi lantas alternatifnya bagaimana, apakah kita menawarkan Pak Habibie untuk menjadi diktator saja? Secara konkret, apakah pada tahun 1998 kita memilih demokrasi liberal, tetapi setelah Pak Harto pergi kita tidak mau sistem itu lagi?

Memang, saya melihat ada masalah. Demokrasi ibarat sistem berjalan, rakyat membawa diri cukup baik, ada masalah mungkin warisan Soeharto atau mungkin juga warisan feodal jaman Belanda. Belanda juga membeli *pangreh projo* untuk menjadi kaki tangannya, untuk mengeksploitasikan rakyat. Menurut saya, lebih *complicated*, dan saya tidak mau menentang itu. Saya berpendapat pilihan demokrasi perlu disukseskan. Memang, kita harus mencari cara bagaimana negara seluas Indonesia mau bersatu kalau orang tidak bisa mengungkapkan diri secara demokratis? Bukankah Pak Harto pun akhirnya juga tidak berhasil.

Imam Yudotomo

Sebenarnya, konsep Romo Mangun yang negara federal kalau mau dipimpin dengan cara demokratis.

Azman Fajar

Saya cuma melanjutkan Bung Haryadi. Kalau kita lihat ada kekhasan negara-negara yang awalnya dikuasi oleh rejim otoritarian dan beralih ke sistem demokrasi. Dalam pandangan saya, ada beberapa hal yang perlu dilihat. *Pertama*, mereka justru mengharap demokrasi liberal tidak hanya pada sistem politik, tapi juga pada sistem ekonominya. Saya kira tidak hanya kasus Indonesia, tapi hampir semuanya, termasuk Amerika Latin sebelum munculnya kekuatan politik baru. Sebelum itu, saya kira mereka hampir sama dengan kita. *Nah*, sebenarnya, masalahnya terletak pada basis sosial politik, struktur politik kita sudah hancur sejak krisis.

Persoalan lain adalah terjadinya proses manipulasi kesadaran atas instrumental demokrasi. Ini menjadi penting. Pada tahun 2004, orang ramai-ramai dalam pilpres, parlemen, dan pilkada. Padahal sebelum itu, mereka menggugat, *complain* pada Golkar, pada PDIP, dan lain sebagainya. Tingkat partisipasi pemilu dan juga pilkada, yang terakhir DKI termasuk tinggi. Artinya, masyarakat siap dari segi partisipasi politik. Tapi, setelah itu, mereka mulai menggerutu, mulai *complain*, dan sebagainya. Instrumen ini begitu masifnya sehingga mereka (para elit politik partai) mampu memanipulasi kesadaran politik rakyat untuk kemudian mengulangi lagi 5 tahun yang akan datang.

Saya kira ada masalah dalam proses demokrasi kita, yakni tidak dibarengi dengan proses pengorganisasian, pembangunan kesadaran politik baru rakyat sehingga tidak nyambung, dan hanya menjadi *event-event*. *Ya* udahlah, setiap lima tahun sekali bagi-bagi uang lalu selesai. Tapi, tidak melahirkan satu sistem yang membuat kesadaran politik baru.

Memang, ini satu pertanyaan besar bagi kita, saya waktu ketemu teman-teman dari Amerika Latin kalau dilihat konteks politiknya maka sebenarnya mereka juga hancur. Dilindas habis oleh rejim militer walaupun tidak habis betul seperti kita. Tapi, dalam waktu 10 tahun-12 tahun, mereka cepat bangkit dan tidak hanya mampu memunculkan tokoh-tokoh alternatif seperti Lula ataupun Evapo Morales, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran politik rakyat. Jadi, ada satu mekanisme kerja politik yang terputus. Dalam beberapa kali diskusi, saya menyampaikan bahwa sepertinya kita terjebak dalam instrumentalisme demokrasi ini. Misalnya, mengenai keputusan MK kemarin, soal calon independen. Saya tidak yakin apakah ruang politik ini bisa dipakai dengan baik oleh kelompok-

kelompok pro-demokrasi. Menurut saya, ini yang perlu dicermati sehingga arah demokrasi liberal sebenarnya memang mempunyai kaitan dengan kepemimpinan politik.

Sejak tahun '99, jamannya Habibie bahkan sampai sekarang, tidak ada perubahan. Rata-rata pemimpin kita, apapun itu, apakah berbicara mengenai isu kerakyatan atau apapun, pada dasarnya, paradigmanya tetap, yang pro pasar dalam bentuk investasi, utang, dan kemudian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, tidak ada satu *platform* ekonomi yang betul-betul meradikal yang mampu melakukan perubahan secara mendasar meskipun resiko politiknya tinggi. Kita dapat melihat pengalaman *land reform* dan nasionalisasi yang menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara pemimpin yang progresif, termasuk partai-partai yang progresif dengan partai-partai yang betul-betul memanipulasi dalam segi bahasa-bahasa politik kerakyatan. Ini menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang, jika kita masih berfikir tentang siapa yang populer tanpa melihat satu *platform* yang radikal dalam pengertian paradigma ekonomi, maka kita akan kembali seperti semula. Perbedaannya terletak pada pilihan-pilihan yang kita ambil.

Boni Hargens

Soal angka pemilih yang 70%, menurut saya, belum membanggakan karena kita belum tahu persis berapa persen yang di-*mobilize* dan berapa persen yang serius mau memilih. Maka, buat saya, harus dipisah-pisahkan antara partisipasi yang pinggir dan yang *genuine*. Itu persoalan pertama.

Lalu kemudian, bicara demokrasi akan mempunyai dampak-dampaknya. Ada yang bilang bahwa demokrasi sebenarnya merupakan tirani mayoritas. Kalau Indonesia, bukan tirani mayoritas, tetapi tirani legitimasi karena pemilihan langsung membuat pemimpin politik

mempunyai legitimasi, dan karenanya bisa berbuat apa saja.

Kedua, saya teringat buku terbarunya Huntington. Dia mengutip penelitian rekannya, di Amerika. Si peneliti soal Amerika ini mengajukan pertanyaan ke berbagai ragam kulit, *what are you?* Yang dari Meksiko bilang *i'am Amerika*. Lalu, datang yang agak sipit dari China, *what are you?* Mereka bilang *i'am Amerika*. Datang lagi ke yang dari Philipina, dan peneliti ini mendapatkan jawaban yang sama. Dia datang tiga kali dengan pertanyaan yang sama, dan jawabannya pun sama. Lantas, ia menyimpulkan bahwa nasionalitas ke-Amerika-an lebih kuat daripada lokalitas di Amerika, dan Indonesia sebaliknya.

Amir Efendi Siregar

Saya hanya ingin menambahkan. Demokrasi itu, dalam pikiran saya, sebuah keharusan. Persoalannya adalah meletakkan posisi dominan antara *private sector* dengan negara. Di sini, kadang-kadang orang melarikannya secara ekstrim pada dominasi *private sector*. Padahal, dominasi *private* semacam ini di Amerika sendiri sudah dilakukan koreksi besar-besaran. Menurut pemikiran saya, yang dikatakan orang neolib dan seterusnya, sebenarnya, adalah konsep liberal ortodoks yang dilarikan ke negara-negara luar. Padahal, di negaranya sendiri, interaksi antara *rule private sector* dengan negara sudah dikikis habis-habisan.

Sebagai contoh, kembali ke bidang media. Di Amerika, media pada awalnya didominasi *private sector*, TV, dan seterusnya. Banyak orang tidak puas. Akhirnya, ada interaksi baru sehingga *public braodcasting service* lahir sebagai protes terhadap dominasi *private sector*. Di Eropa Barat, kasusnya agak lain. Di Eropa Barat ketika negara otoriter jatuh, yang dominan adalah *public service braodcasting*. Namun, orang tidak puas hanya dengan itu maka lahir yang disebut dengan *private sector*, dalam konteks media eletronik, terutama di Eropa Barat

baru berusia 15 tahun. Dengan demikian, demokrasi yang kita bicarakan sebenarnya adalah bagaimana Indonesia memilih dimana *rule private sector* diperkenankan, tapi tidak dilepas. *State sector* juga harus memenuhi peranan yang cukup penting untuk menjaga keselamatan publik yang dalam UUD '45 sudah digariskan dengan jelas.

Selanjutnya, *state* harus diterjemahkan secara modern. *Balancing* tidak lagi dapat dianggap dalam terminologi *Montesque* biasa, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Balancing* harus mampu melahirkan suatu institusi negara yang *kuasi yudicial*, yang *kuasi eksekutif*. Di negara-negara Barat, institusi-institusi semacam ini sudah dibentuk guna melakukan *check and balances* secara lebih baik. Jadi, negara tidak lagi diterjemahkan sebagai *goverment*, pemerintah maksud saya. Namun, termasuk di dalamnya KPI, KPU, dan lain sebagainya.

Moderator

Dan, ini demokrasi sosial.

Amir Efendi Siregar

Sebenarnya, ada satu contoh menarik. Saya juga mempelajari China. Dia otoritarian, tapi dari segi ekonomi secara perlahan-lahan berubah, dan ini tertuang dalam konstitusi. Dulu, dia sebut sebagai *socialis economy*, tapi beberapa tahun dia revisi menjadi *market economy is complementary to the socialis economy*, terus dia koreksi lagi *market economy is nature companents of socialis economy*, sekarang diubah menjadi *socialis market economy*.

Moderator

Kalau soal ekonomi yang dibawa, saya mempunyai pengalaman di Maluku Utara. Konflik yang terjadi di daerah tersebut hingga saling membunuh pada waktu ada kegiatan ekonomi bersama maka lokalitasnya menjadi hilang. Jadi, yang tadinya *separate* menjadi bergabung

kembali. Ketiadaan kegiatan membuat masalah kehidupan memuncak, dan isu-isu primordial menjadi mudah tersulut. Di Indonesia, barangkali, disebabkan oleh ekonomi yang masih tidak jelas. Masyarakat bawah tidak mempunyai pekerjaan dan kehidupannya susah sehingga ketika, misalnya, di Maluku Utara terjadi konflik yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi maka ketika ada pekerjaan yang diinisiasi bersama menjadi *adem-adem ayam*, menjadi baik.

Boni Hargens

Saya kira tidak begitu signifikan jika dikaitkan dengan ekonomi karena banyak diantara mereka yang terdidik dan berasal dari kelas ekonomi mapan. Ini sudah menjadi cara berfikir yang permanen. Hampir pasti menjadi fakta sosial sehingga susah diubah, dan ini kesalahan negara karena dari awal tidak ada proses pendidikan yang sistemik, dimana orang diajarkan berfikir dari dasar bahwa mereka harus demokratis. Misalnya, di sekolah dasar, orang harus terbiasa untuk tidak mencibirkan bibir ketika dia berbeda agama atau tidak mempertanyakan hal yang sangat sensitif seperti SARA. Menurut saya, ini merupakan kesalahan negara.

Nur Iman Subono

Romo Mangun menulis satu buku, hal yang disebut Indonesia 1 dan Indonesia 2. Pada dasarnya, apa yang dikhawatirkan Boni memang ada. Ini bukan kesalahan negara, tapi *inhernt* negara. Kalau kita di Maluku maka akan mengaku sebagai orang Maluku, tapi kalau di Jerman akan mengaku sebagai orang Indonesia. Penelitian Demos yang pertama seperti itu. Bagaimana orang mempunyai beberapa identitas. Romo Mangun adalah orang yang mengatakan bahwa tidak selalu Indonesia 1 yang dibayangkan yang berbasis pada etnisitas atau agama. Itu bertentangan dengan Indonesia 2 yang melihat Indonesia secara lebih luas.

Generasi setelah kita lebih *world wide* melihatnya karena ada internet, dibandingkan dengan identitas-identitas yang dulu diwariskan Jong Java, Joing Sumatra, dan sebagainya. Saya kira riset Demos juga ingin mengatakan bahwa kita tidak selalu harus menabrakkan antara identitas ke-Indonesia-an dengan yang berbasis etnisitas atau agama karena tidak produktif. Sebaliknya, bisa juga bersifat konstruktif. Oleh karena itu, saya tidak berpretensi mengambil kesimpulan hitam putih, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa politik identitas yang tadi disebutkan memang ada.

Ari Sudjito

Kalau kita tarik ke belakang, Orde Baru memang selalu menjadi sumber masalah, termasuk mengenai carut marutnya reproduksi identitas. Ini terjadi karena negara tidak memberi ruang demokratis dalam hubungan antarkelompok. Selain juga, yang tidak kalah penting, reproduksi pengetahuan yang membelanggu. Saya menyebutnya sebagai rejim pengetahuan yang biasanya menjadi *supporting* sebuah sistem, baik demokratis maupun otoriter? Pada masa Orde Baru, intelektual mempunyai peran yang cukup kuat dalam melakukan rekayasa. Ketika kebangkrutan struktur ekonomi dan kebudayaan terjadi besar-besaran maka, dalam pandangan saya, pada dasarnya kebangkrutan ikatan kita berbangsa juga direproduksi dalam struktur pengetahuan, sadar ataupun tidak.

Sekarang ini, yang berlangsung adalah orang baru merayakan kebebasan, banyak orang bicara soal demokrasi, ataupun soal hak kita untuk beridentitas. Namun pada kenyataannya, tidak terdapat tukar-menukar pengetahuan atau bertransaksi untuk kepentingan bersama, yang kemudian menjadi energi untuk bergerak bersama. Ini terjadi dalam banyak bidang dan kelompok seperti NGO, media massa, dunia politik, dan lain sebagainya.

Sekarang ini, kita memerlukan kemasan baru karena baik orang-orangnya ataupun jurus/ilmu yang digunakan untuk pemberdayaan politik pada dasarnya untuk melawan Orde Baru. Padahal, musuh-musuh demokrasi berpencair Mereka semakin canggih, demikian juga dalam bidang ekonomi.

Dalam dunia politik, ketika aktornya diserang maka mereka bisa berpindah dan bermutasi sehingga menjadi berserakan dimana-mana. Oleh karena itu, kita perlu mengenali dengan cara mendengarkan apa yang sedang berlangsung di masyarakat. Kita memerlukan jurus-jurus baru. Dengan demikian, jika Demos NGO, maka jangan hanya menjadi pemain di tepian demokrasi, tetapi harus masuk. Jika tidak masuk ke arena, maka harus berani mencari apa dapat dimanfaatkan.

Kemala Sophia

Sangat menarik dan sangat merangsang sebetulnya apa yang kita perbincangkan malam ini karena satu hal yang sangat besar, sangat kompleks, dan juga pembicaraannya bisa sangat panjang. Mungkin hanya satu pendapat singkat bahwa dalam politik tidak pernah ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Yang lebih mengerikan lagi kalau kepentingan ini diwujudkan dalam kepentingan yang sifatnya material seperti *power* atau keuntungan ekonomi. Celakanya, inilah yang terjadi selama ini. Berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan tadi maka saya menyimpulkan bahwa ada hal yang pragmatis yang bisa kita ambil, yakni bahwa apapun kepentingannya maka harus menjadi hal yang dipercayai bersama, yang kita percayai sebagai suatu hal yang baik karena latar belakang yang sangat beragam, baik dari segi ideologi, pandangan, dan sebagainya. Kepentingan tersebut bermacam-macam, dan inilah yang membuat bermacam warna-warni, baik dan buruk.

Jadi, mungkin *value* tersebut yang harus dipersamakan: apa kepentingannya,

dan ini yang mendasari mana kawan atau lawan. Saya setuju bahwa ruang negosiasi antarelit dengan yang di level *grass root* harus dikembangkan, dan jangan hanya dijadikan sebagai jargon-jargon politik.

Boni Hargens

Ini sebenarnya yang membuat agama menjadi membosankan. Sekarang, kita lebih sering menggunakan *motto* teh botol Sosro, apa pun makanannya minumnya teh botol Sosro. Apapun persoalannya maka agama meski menjadi jawaban final, ruang refleksi yang paling nyaman meski persoalannya serius. Ruang agama menjadi membosankan bahkan lebih dari membosankan karena politik telah menembusnya sehingga agama menjadi ruang yang sangat kotor. Selain itu, yang ingin saya tekankan, agama menjadi organisasi dan pengorganisasian dan tidak lagi bertindak sebagai ajaran. Politik, pada sisi yang lain, sudah menjadi ruang privat. Dalam situasi semacam ini, politik menjadi mewah, tertutup, dan sangat mahal. Oleh karenanya, demokrasi yang akan dibangun mestinya ditujukan untuk merebut kembali ruang politik yang diprivatisasi oleh elit menjadi ruang publik.

Thamren Ananda

Saya ingin *share* sedikit mengenai persoalan nasionalisme secara menyeluruh dengan persoalan kebudayaan tadi. Memang, jadi hal yang menarik untuk didiskusikan apalagi kalau melihat fenomena di berbagai daerah di Indonesia, misalnya, di Papua, Aceh, dan sebagainya. Memang, di sini, saya melihat kita tidak bisa memisahkan antara fakta-fakta, misalnya, kalau Bung Boni menjelaskan jika orang China di Amerika ditanya maka mereka akan menjawab sebagai orang Amerika, dan orang Afrika ditanya maka akan menjawab orang Amerika, lalu persoalannya adalah mengapa hal ini berbeda dengan Indonesia. Kalau ada orang Cina ditanya maka akan tetap menjawab orang Cina.

Menurut saya, ini berkait dengan kesatuan ekonomi.

Di Indonesia, ada kesatuan ekonomi diantara orang Cina dari Sabang sampai Marauke. Orang Cina mempunyai kesatuan ekonomi yang utuh. Hal sama juga saya contohkan di Aceh kenapa daerah perbatasan rasa kedaerahannya sangat lemah sehingga rasa separatisme atau kekuatan separatisme atau GAM tidak kuat, berbeda dengan daerah lain. Ini karena daerah perbatasan tersebut mempunyai kesatuan ekonomi, dan kesatuan ini kuat diantara orang-orang yang berada di daerah perbatasan. Selain kesatuan ekonomi, ada faktor lain yang harus dilihat, yaitu kesatuan psikologis. *Nah*, ini yang banyak terjadi di seluruh daerah di Indonesia bukan hanya Aceh dan Papua. Banyak orang merasa, secara psikologis, berbeda dengan orang yang di pusat. Orang-orang yang di daerah merasa miskin sehingga muncul anekdot orang *ndeso*. Pembedaan psikologis ini membuat mereka tidak merasa memiliki rasa nasionalisme.

Kemudian, kalau dilihat dari hal yang lain, misalnya, kesatuan wilayah, kenapa, kesatuan psikologis hanya muncul pada satu wilayah tertentu dan kenapa perlawanan di Aceh tidak merambat sampai ke Medan atau yang lebih dekat, yakni Deli Serdang? Bukankah ini berarti tidak ada kesatuan wilayah. Berdasarkan hal ini, saya melihat bahwa setiap persoalan tidak dapat dilihat secara parsial. Menurut saya, berbagai penyebab yang membuat rakyat tidak merasa memiliki nasionalisme karena ada kesenjangan sosial yang sangat luas ditambah dengan persoalan psikologis dan ekologis yang berbeda.

Persoalan kepemimpinan memang menjadi masalah dalam membangun demokrasi di Indonesia. Namun, saya melihat tidak hanya sebatas itu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ari mengenai fragmentasi, dan saya juga sepakat dengan yang disampaikan Bung Boni bahwa kita tidak

dapat mengharapkan perubahan yang datang semata-mata dari atas, tetapi harus digerakkan dari bawah. Cuma problemnya, selama ini, hampir semua orang mengaku bekerja melakukan perubahan dari bawah, dan fragmentasi ini terjadi. Dengan demikian, bukan tidak ada gerakan di Indonesia bahkan sebenarnya subur meskipun ada pasang surutnya. Mungkin ada perlawanan, tapi sifatnya kecil saja, dan dalam lingkup daerah masing-masing seperti di Riau yang kemarin sempat memunculkan sebagai calon gubernur independen. Menurut saya, ini hanya merupakan perlawanan pribadi, dan tidak menjadi gerakan bersama. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi bagaimana menghancurkan fragmentasi ini.

Di luar itu, ada problem lain, yakni kita semua berbicara perubahan, tapi sayangnya tidak terlibat dalam satu sistem yang menuju perubahan, misalnya, partai politik, DPR. Sebagai contoh, NGO, misalnya, yang selalu berbicara, “kita harus membongkar bla..bla.....” dalam konteks pelanggaran HAM, KKN, dan sebagainya. Mereka menyusun *draft*, tetapi yang melaksanakan DPR. Jadi, terserah DPR. Begitu pun ketika berbicara partai politik bahwa Partai Golkar salah, tetapi ironisnya basis yang kita organisir sudah menjadi milik Golkar. Sepertinya tidak ada alternatif lain. Barangkali, ini yang harus kita pikirkan, yakni jangan hanya mengkritik. Ayo kita maju satu langkah, ayo kita melakukan perubahan bersama.

Azman Fajar

Saya akan mulai dengan satu pertanyaan, siapapun presidennya apakah laki-laki ataupun perempuan apakah akan mampu keluar dari persoalan apabila mereka masih berada di bawah tekanan internasional? Katakanlah, kita mengenal istilah neoliberal yang dibangun pada tahun 1944, kemudian ada tiga besar yang jelas-jelas menjadi agennya, yaitu *World Bank* sebagai wadah bermainnya

United State, IMF sebagai ladang garapan Eropa, dan ADB yang dijalankan atas kepentingan Jepang. Seperti kita ketahui, World Bank dalam setiap skema pinjaman selalu mensyaratkan *good corporate governance*. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapat pinjaman, dan karenanya akan memunculkan defisit dalam neraca pembayaran. IMF juga begitu. *Letter of intent* yang ternyata mensyaratkan adanya pencabutan subsidi-subsidi sosial seperti pencabutan subsidi listrik, bahan bakar (BBM), kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Apabila presiden terpilih ternyata harus mengikuti semua skema-skema itu, dan tidak bisa melepaskan diri maka saya agak pesimistis. Malah, *optimisme saya hanya berkisar pada angka 20%* saja. Sebaliknya, apabila kita berani melawan seperti Evo Morales, yang juga ditekan oleh gerakan globalisasi dan neoliberal maka rasa optimistis itu akan meningkat menjadi lebih dari 60 %.

Sementara jika ditinjau dari sisi politik, ada dua persoalan yang kait-mengait. Selama ini, kita tidak pernah mempertanyakan akuntabilitas seseorang yang akan memimpin. Padahal, di beberapa negara, persoalan akuntabilitas merupakan hal yang utama. Ketika calon pemimpin pernah membuat skandal maka besar kemungkinan akan gagal sebagai akibat skandalnya tersebut. Jika dia melakukan korupsi, maka akan tenggelam karena korupsi yang pernah dilakukannya tersebut. Namun, di Indonesia, meskipun orang pernah membunuh jutaan nyawa belum tentu dihukum. Ketika dia beristri lebih dari tiga mungkin tidak akan dipersoalkan. Di negara ini, nampaknya, akuntabilitas tidak pernah menjadi masalah, dan ini berkembang karena rakyat, di sisi *grass root*, terlalu *permissif*.

Misalnya saja rakyat tetap memberi kesempatan ketika PKPB muncul, bahkan Hartono bilang, "Saya antek-antek Soeharto", dan semua orang tetap bersifat *permissif*. PKPB tetap dipilih. Mereka

dapat suara karena masyarakat terlalu *permissif*, dan ini terjadi karena pendidikan politik yang sangat lemah di tingkat masyarakat sendiri. Oleh karena itu, ketika harus memilih maka masyarakat pun bingung apakah saya ikut pendidikan politik yang membuat saya jadi lebih berani atau saya memilih lebih baik memilih sesuatu yang lebih membuat perut saya kenyang. Terjadilah perkelahian antara idealisme melawan pragmatisme. Dalam banyak hal, pragmatisme menang. Partai mana yang bisa memberikan kaos lebih banyak, memberikan uang lebih banyak, dan memberikan kesempatan untuk menjadi caleg itulah yang akan dipilih. Mereka tidak lagi mendasarkan diri atas ideologi seperti pancasila, komunisme, sosial demokratik atau ideologi-ideologi lain.

Lantas, apakah ke depan kita akan melakukan hal yang akan kita rancang sendiri atau kita cukup memadukan persoalan-persoalan yang kita padukan dari dunia luar seperti negara-negara lain? Amerika, misalnya, selalu mempunyai *common issue*. Mereka selalu mempunyai *common enemy*, dari situ lantas nasionalisme mereka tumbuh.

Suatu contoh sederhana tentang hal tersebut diatas, ketika Tim nasional PSSI mampu mengalahkan Bahrain maka mereka dipuji seperti pahlawan. Ini terjadi karena kita tidak mempunyai figur yang harus dipahami sebagai pahlawan. Melihat SBY kalah dalam Sipadan dan Ligitan, orang tidak lagi mengelukan dia sebagai seorang panutan, sebagai orang yang tegas. Kemudian, dalam persoalan Ambalat, kita pun tidak melakukan apa-apa terhadap negara kecil, bernama Malaysia, tidak ada satu hal yang menyatukan kita dan kita kehilangan kesempatan untuk membangun solidaritas nasional.

Ke depan, kita butuh yang namanya *common issues* atau isu-isu bersama menyangkut apa yang bisa mempersatukan kita dalam membentuk nasional. Selanjutnya, kita memerlukan

common interest, yakni apa cita-cita kita, apa visi kita ke depan. Bahkan, mungkin perlu adanya *common enemy*. Betapa sebenarnya harga diri kita sudah diinjak-injak oleh negara seperti Australia. *Quote and quote* mungkin kita tidak mengatakan berperang, tetapi setidaknya kita dapat mengatakan bahwa ada negara tertentu yang mencoba mencabik-cabik bangsa kita. Lantas, terakhir, kita perlu merumuskan apa yang disebut dengan *common strategy*, yakni bagaimana semua pihak bersedia bekerja sama untuk menggolkan apa yang menjadi cita-cita pembukaan UUD '45.

Imam Yudotomo

Saya protes dengan pernyataan yang terlalu menghina rakyat, yang dibilang bahwa rakyat hanya memilih yang ngasih kaos dan segala macam. Saya rasa tidak pantas berbicara begitu karena jika kita ingin membangun kekuatan dari bawah, maka kita harus percaya kepada rakyat sebagai pijakan utama. Jika tidak percaya sama rakyat, maka celakalah kita.

Yang kedua barangkali memang perubahan harus dari bawah, tapi kita juga membutuhkan pemimpin-pemimpin. Pengalaman kami di Pergerakan Sosialis, misalnya, pada saat kita sudah punya cabang dimana-mana, kita harus punya pemimpin nasional. Celaknya, orang-orang yang kita anggap pantas untuk menjadi pemimpin nasional ternyata tidak mau. Mereka lebih senang menunggu telepon dari SBY bagaimana bisa jadi menteri. Ini pengalaman riil dan tidak perlu menyebut nama, tapi kira-kira seperti itu.

Menurut saya, pemimpin nasional perlu. Kita perlu menghadapi pemilihan umum tahun 2009. Kita menjadi kekuatan politik di tingkat lokal. Orang yang punya, misalnya, anggota 30-40 ribu sudah mulai berfikir, "Ini orang sosial demokrat tidak bisa bikin partai, gua nggak bisa dapat apa-apa". Kemudian, mereka bergabung dengan PDIP, ikut dengan partai ini atau itu. Dalam situasi

semacam ini, hancurlah kita. Maka, kita tidak usah membuat suatu perubahan harus dari bawah. Sebaliknya, perubahan itu harus berlangsung simultan, dari atas perlu dan dari bawah juga.

Seperti contoh, misalnya, ada teman kita di Batak, dan sudah mempunyai anggota 35 ribu kepala keluarga. Ini menjadi masalah. Mau menjadi anggota DPR harus ikut partai, mau jadi bupati juga tidak bisa, maka akhirnya bagaimana kalau jadi lurah saja? Sekarang, ada sepuluh yang dicalonkan organisasi tani di situ, tujuh orang kira-kira punya *kans* untuk bisa menjadi lurah. Saya kira, ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif yang bisa dikerjakan. Terobosan peningkatan kesadaran rakyat untuk bermain politik pada aras lokal, dan ini sudah mulai dilakukan. Selain itu, saya ingin mengoreksi Mas Hargens mengenai Islam pada masa Orde Baru. Islam pada jaman Orde Baru tidak selalu dipojokkan karena separuh dari Orde Baru dapat dikatakan

sebagai era Islam, yang masuk melalui ICMI.

Peserta

Islam Politik

Imam Yudotomo

Apapun namanya, tapi paling tidak mereka mengaku merepresentasikan Islam. Jadi, sebetulnya, kekuatan politik Islam bertanggung jawab juga pada Orde Baru. Isu bahwa Islam dipojokkan terus-menerus sangatlah tidak benar. Dalam era terakhir Orde Baru, Islam berkuasa. Mau jadi rektor kalau tidak berasal dari ICMI maka tidak bisa.

Boni Hargens

Kita dapat melihat sejarah ketika Pancasila dijadikan asas tunggal, dan ini menimbulkan kritik di kalangan Islam. Saya mempunyai dugaan kuat bahwa pembentukan Petrus yang dipimpin BN Moerdani tahun '83 lalu ditutup tahun '85 dengan jumlah korban yang mati

sekitar 8.500 bukan GALI (Gabungan Anak-Anak Liar), tetapi ada dan mungkin banyak yang Islam politik. Peristiwa Tanjung Priok barangkali dapat dimaknai dalam konteks ini, dan ini dapat dianggap sebagai salah satu titik ledak dari Islam dan negara.

Moderator

Ini waktunya sudah larut, tetapi tadi cukup menarik. Kita memang masih percaya pada rakyat, dan harus percaya kepada rakyat dan memang sebagian dari kita optimis bahwa ke depan ada cukup banyak hal-hal yang, katakanlah, bisa dikembangkan dan menjadi sesuatu yang kalau dikelola dengan baik, diorganisir, dan ruang negosiasinya dibuka maka akan dapat berkembang menuju perbaikan. Tadi juga disebutkan bahwa tidak hanya rakyat bawah, tapi juga yang di atas perlu. Saya kira demikian, dan terima kasih.

PEMIMPIN TANPA VISI: Quo vadis Indonesia?

Pengantar Redaksi:

Tulisan berikut merupakan hasil rangkuman dari diskusi bertajuk “Pemimpin tanpa visi dan arah” yang sekaligus menjadi judul rubrik Laporan Utama Bagian 1, pada Jurnal Edisi kali ini.

22

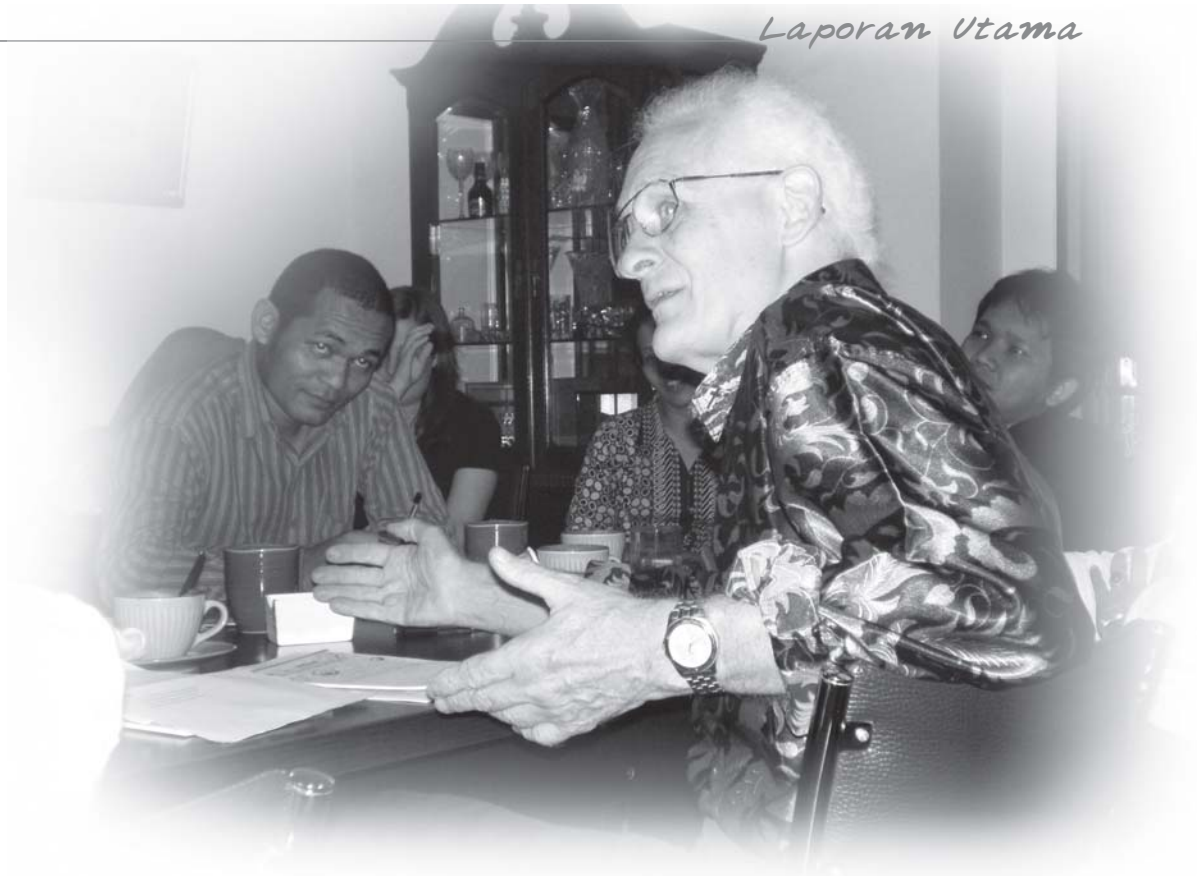
Dalam pandangan banyak orang, Bangsa Indonesia semakin lama sepertinya semakin tidak mempunyai arah. Pada masa reformasi sekarang ini, tampaknya, arah kemana Bangsa Indonesia hendak menuju sepertinya menjadi semakin tidak jelas. Ini terjadi karena para elit politik yang memimpin negeri ini tidak mempunyai visi yang jelas, yang dapat dijadikan panduan segenap masyarakat untuk melangkah. Sikap, tindakan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak didasari oleh filsafat dan paradigma serta konsep yang jelas. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan jika Boni Hargens mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan seperti layaknya sopir bajaj. Jika ingin belok kiri atau kanan, maka kita tidak tahu karena tidak ada lampu *sign*-nya dari pemerintah.

Kritik semacam ini muncul karena lemahnya visi dan rendahnya kemampuan para pemimpin dalam melakukan koordinasi dan ketidakberanian mengambil keputusan serta sikap sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah

menjadi lebih bersifat parsial dibandingkan dengan sebagai suatu kebijakan yang utuh dan menyeluruh. Ivan A. Hadar, selaku moderator, mengemukakan bahwa pada kenyataannya pemimpin tidak konsisten antara apa yang dikatakan dengan yang dijalankan. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai filsafat, paradigma, dan konsep yang jelas sebagai landasan kegiatan sehingga ada sesuatu yang hilang atau tidak nyambung.

Salah satu penyebab miskinnya *vision* ini diantaranya adalah ketiadaan cita-cita. Menurut Imam, pemimpin-pemimpin kita tidak mempunyai cita-cita. Padahal, cita-cita menumbuhkan visi. Soekarno, Syahrir, Hatta, ataupun Tan Malaka mempunyai cita-cita, dan karenanya mempunyai visi yang jelas. Visi ini kemudian dituangkan dalam konstitusi negara, yakni UUD 1945. Di era sekarang, tampaknya, cita-cita hanya tertulis dalam konstitusi. Dalam praktiknya, sebagaimana dikemukakan Amir Effendi Siregar, tidak ada hubungan antara yang tertulis dengan yang dilakukan. Dalam

bidang media, misalnya, konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa paradigma ekonomi dan politik bukanlah liberal, tetapi sosial demokrat yang ditunjukkan pasal 33-34. Namun dalam praktiknya, dibiarkan *private* dan betul-betul sangat liberal. Padahal, kalau pemimpinnya mempunyai *vision*, mengerti masalah, dan sesuai dengan konstitusi yang dibuat, *diversity of voices* harus tetap dijaga. Amir Effendi Siregar mencontohkan kasus yang terjadi dalam industri televisi. Menurutnya, sudah ada usaha tertulis dalam membuat *diversity of voices*, *diversity of ownership*, dan *diversity of content* melalui undang-undang, tetapi tidak diimplementasikan. Di negara-negara Skandinavia, misalnya, negara turun tangan untuk menghidupkan *diversity of voices* dengan membantu koran-koran kecil mengingat koran-koran tersebut tidak mampu berkompetisi dengan koran-koran *mainstream*. Oleh karena itu, menurutnya, harus ada *limited state intervention* untuk menghidupkan *diversity of voices*.



Pada dasarnya, sebagaimana dikemukakan moderator, Ivan A. Hadar, cita-cita sebuah bangsa tidak senantiasa merefleksikan keseluruhan cita-cita dan pandangan masyarakat. Dalam banyak kasus, cita-cita tersebut milik sekelompok elit yang kemudian ditransformasikan ke masyarakat. Cina, misalnya, mempunyai cita-cita, yakni ingin menjadi kekuatan ekonomi terbesar yang sebenarnya merupakan cita-cita sekelompok elit yang mencoba menerapkannya dalam kebijakan ekonomi. Vietnam ketika menang perang meskipun babak belur, melalui kelompok elitnya juga mempunyai cita-cita, yaitu membangun Vietnam. Cita-cita inilah barangkali yang membuat kedua negara tersebut mampu berkembang dengan pesat. Bahkan, mereka mampu menyaingi GNP Indonesia yang telah lebih dahulu mengalami kemerdekaan dan pembangunan. Cina tidak diagukan lagi. Ia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dalam satu dekade belakangan. Dalam kaitan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kejelasan

visi para pemimpin mempunyai kontribusi yang tidak sedikit bagi kemajuan sebuah bangsa.

Begitu krusialnya kejelasan visi seorang pemimpin, maka menjadi penting untuk mendiskusikan masalah tersebut. Ada setidaknya tiga persoalan yang ingin dijawab. *Pertama*, bagaimanakah seharusnya visi seorang pemimpin tersebut? *Kedua*, dalam konteks Indonesia, faktor-faktor apa yang menghambat kemunculan pemimpin yang visioner tersebut? *Ketiga*, ke depan, apa yang harus dilakukan sehingga Bangsa Indonesia mempunyai arah yang jelas dalam, tentu saja, mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Orde Baru sebagai Sumber Masalah

Ada salah seorang pegamat yang mengatakan bahwa pembicaraan apapun mengenai Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dari Orde Baru karena kuatnya pengaruh rejim ini ke dalam hampir semua kehidupan masyarakat. Termasuk

dalam hal ini, kurangnya pemimpin yang tidak mempunyai visi. Dalam kaitan ini, Imam mengemukakan bahwa kita tidak perlu heran mengapa elit politik tidak mempunyai visi yang jelas. Ini karena, menurutnya, pemimpin-pemimpin yang sekarang merupakan produk Orde Baru. Mereka adalah alumni Orde Baru yang sangat ketat dalam melaksanakan kebijakan depolitisasi yang mengarah kepada de-ideologisasi dan de-organisasi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Romo Magnis. Ia mengatakan bahwa Orde Baru tidak memberi banyak ruang agar pemimpin bisa berkembang. Akibatnya, kita mempunyai pilihan yang sangat sedikit meskipun, sebenarnya, ada banyak orang yang berkualitas yang jika diberi kesempatan untuk memimpin akan memberikan hasil yang lebih baik. Namun sayangnya, Sistem yang ada pada waktu itu, dan juga sekarang belum mampu memberikan ruang yang cukup bagi kemunculan pemimpin-pemimpin alternatif. Pada masa Orde Baru, kemunculan pemimpin alternatif akan selalu mendapatkan hambatan dari rejim

Demokrasi juga tergantung pada pemimpin. Kalau kualitas pemimpin baik, maka saya kira apa yang disebut sebagai sisa-sisa feodalistik tidak menjadi masalah malah bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat karena kebijakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat

Orde Baru. Selama lebih dari tiga dekade, masyarakat Indonesia tidak pernah diberi pilihan. Orang-orang yang mempunyai potensi untuk “menyaingi” dirinya dihancurkan oleh rejim.

Di sisi lain, Orde Baru, dalam bahasa Ari Sudjito, meninggalkan bercak-bercak begitu banyak di masyarakat yang sebetulnya mengurangi imajinasi untuk maju. Lebih jauh, Arie Sudjito mengatakan bahwa jika kita tarik ke belakang, maka Orde Baru memang selalu menjadi sumber masalah, termasuk mengenai carut-marutnya reproduksi identitas. Ini terjadi karena negara tidak memberi ruang demokratis dalam hubungan antarkelompok.

Sementara itu, dalam pandangan Hariyadi, Soeharto telah memangkas proses *nation building* yang telah dirintis oleh Soekarno. Suatu nilai kebersamaan. Sebaliknya, Soeharto mengajarkan bahwa pencapaian suatu tingkat kemakmuran bisa dicapai melalui koridor individual, meninggalkan banyak kebersamaan yang telah dibina Soekarno. Menurut Hariyadi, Indonesia sekarang ini mengisi kevakuman yang terjadi dengan nilai-nilai luar, yakni dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya global seperti fundamentalisme, ekstrimisme, yang kirkanan-tengah, dan lain sebagainya.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak dilaksanakan secara konsekwen. Bahkan, jika dibandingkan dengan pada masa Soekarno, maka implementasi Pancasila pada masa Orde Baru lebih buruk. Nur Iman Subono mengemukakan bahwa pada masa Soekarno Pancasila dipakai sebagai panduan karena kemajemukan masyarakat, sedangkan pada masa Soeharto Pancasila dipakai sebagai alat untuk menyatukan orang. Menjadi acuan selama kurang lebih 30 tahun sehingga Pancasila sudah dicerabut dari fungsi sebelumnya. Akibatnya, sekarang ini, orang belum merasa memiliki Pancasila karena trauma. Dengan kata lain, Pancasila belum menjadi pedoman hidup,

tetapi baru sebatas menjadi wacana, masih menjadi tameng, bahkan menjadi topeng sehingga, seperti dikemukakan Boni Hargens, ketika ruang kebebasan dibuka maka semua orang berbicara sambil memakai peci yang lain, jubah yang lain, dan sebagainya. Mereka meninggalkan Pancasila. Dalam situasi semacam ini, menurut Boni Hargens, muncul pertanyaan apakah Pancasila mempunyai bentuk? Masihkah kita yakin bahwa Pancasila menjadi dasar untuk tetap maju sebagai Indonesia? Kepemimpinan yang tidak jelas membuat situasinya menjadi lebih buruk.

Perlunya Pemimpin Visioner

“Demokrasi juga tergantung pada pemimpin. Kalau kualitas pemimpin baik, maka saya kira apa yang disebut sebagai sisa-sisa feodalistik tidak menjadi masalah malah bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat karena kebijakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat”, demikian dikemukakan oleh Romo Magnis. Dalam konteks Indonesia, keberadaan pemimpin yang visioner sangat penting karena beberapa alasan. *Pertama*, keberadaan pemimpin nasional merupakan keharusan. Merujuk pada pengalamannya di Pergerakan Sosialis, Imam Yudotomo mengemukakan bahwa ketika cabang gerakan telah berada dimana-mana maka seorang pemimpin nasional sangatlah diperlukan. Tanpa itu, sebuah gerakan tidak akan berhasil, terlebih ketika kita harus menghadapi pemilihan umum maka keberadaan seorang pemimpin nasional yang berkualitas menjadi mutlak diperlukan. Sayangnya, ketika di Indonesia terdapat pemimpin yang berkualitas maka ia lebih suka menunggu telepon untuk menjadi menteri dibandingkan dengan mengambil peran sebagai pemimpin nasional. *Kedua*, dalam masyarakat majemuk yang sedang mengalami transisi demokrasi seperti sekarang, keberadaan pemimpin sangat penting dalam memandu kemunculan nilai-nilai lokal yang bisa jadi sangat

kontraproduktif. Sukma Widyanti dengan tegas mengatakan bahwa pemimpin nasional yang baik adalah yang bisa menegaskan bahwa kita beda, tapi tetap mempunyai nilai-nilai Pancasila yang harus dijaga bersama. Dengan kata lain, seorang pemimpin perlu dalam rangka memelihara pluralitas. Menurut Sukma Widyanti, lokalitas atau *local wisdom* memang harus dijaga, tetapi bukan nilai-nilai lokal yang syarat dengan nilai feodalisme. Seperti dikemukakan Nur Iman Subono, kita harus memeriksa ulang nilai-nilai lokal apakah dipromosikan dengan cara demokratis ataupun tidak. Dengan demikian, seorang pemimpin harus mampu mengarahkan “kebangkitan” kembali nilai-nilai lokal yang feodalistik ini sehingga konstruktif terhadap usaha-usaha membangun bangsa. Namun sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Seringkali, elit-elit lokal sengaja mereproduksi nilai lokal yang feodalistik ini demi keuntungan pribadi sehingga, dalam kondisi politik sekarang, seperti dikemukakan Sukma, membuat pemimpin-pemimpin lama lagi yang naik ke atas; para raja-raja, para lalu, dan lain sebagainya sehingga menutup akses rakyat untuk menjadi pemimpin. *Ketiga*, kepemimpinan politik penting dalam konteks pembangunan bangsa (*imagined community*). Boni Hargens mengatakan bahwa Indonesia adalah sesuatu yang dibentuk secara sadar, disepakati bersama, bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Jadi, menurut Boni Hargens, inti bernegara dan berbangsa adalah kesadaran dan penyadaran. Dalam hal ini, Boni Hargens agak kurang setuju dengan pandangan Anderson yang menyatakan bahwa keberadaan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuannya untuk membayangkan dirinya sebagai bangsa, *imagined community*, dan pembayangan tersebut bersifat horizontal. Menurut Boni Hargens, pembayangan sebagai sebuah bangsa haruslah bersifat horisontal dan vertikal sekaligus. Pembayangan horizontal tidak

hanya ke depan, tapi juga ke belakang, dan kepemimpinan politik penting dalam konteks pembayangan secara vertikal. Menurut Boni Hargens, kepemimpinan politik harus mampu merangsang rakyat untuk berfikir menjadi bangsa, menjadi Indonesia. Maka, kepemimpinan politik paling dasar harus menjawab dasar dari bernegara, yaitu kemakmuran dan keadilan. Selanjutnya, memberikan visi mau kemana ke depan. Dalam kaitan ini, Boni Hargens mengemukakan bahwa Indonesia menghadapi dua persoalan, yakni kepemimpinan politik dan ketiadaan cita-cita kolektif. Citra kolektif ini dibagi menjadi tiga, yakni masa lalu, sekarang, dan masa depan. Citra kolektif masa lalu, barangkali, dapat disepakati sebagai bangsa yang sama-sama dijajah. Namun, ia menegaskan bahwa alasan ber-Indonesia tidak hanya cukup hanya sama-sama dijajah. Ini karena Aceh tidak secara riil dijajah, dan Papua pun berhak mendefinisikan diri sebagai bukan bagian dari Indonesia yang dijajah sehingga mereka dapat mengatakan bukan bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, Boni Hargens menegaskan perlunya Bangsa Indonesia mencari satu dasar yang solid untuk bersepakat bahwa kita adalah Indonesia. Ini merupakan pendasaran yang harus dinamis dan harus didefinisi.

Lebih lanjut, Boni Hargens mengemukakan bahwa jika proses pembayangan nasionalisme diibaratkan dalam suatu kuadran maka nasionalisme Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalau kita mau bertahan sebagai bangsa, maka tidak cukup hanya berfikir apakah kita mampu membayangkan diri. Persoalannya adalah mengapa kita harus membayangkan diri sebagai bangsa? Kalau energi membayangkan diri sebagai bangsa seperti dalam kuadran adalah S+, sementara energi untuk tidak membayangkan diri karena kekecewaan adalah S-, sementara *point*-nya, misalnya, 5 dan arahnya ke kanan maka hasil berbangsa kita adalah -1. Dengan kata

lain, menurut Boni Hargens, kita gagal. Dalam konteks inilah, sebuah kepemimpinan politik penting dalam merangsang pembayangan secara vertikal tersebut.

Agenda ke Depan

Menatap masa depan Indonesia, tampaknya, ada dua pandangan yang sedikit berbeda, yakni antara pandangan yang pesimistis dan yang optimistis. Romo Magnis dan Nur Iman Subono dari Demos merupakan beberapa orang yang optimistis dalam melihat masa depan Indonesia dengan alasan masing-masing. Romo Magnis mengajukan tiga alasan yang mendasari rasa optimistisnya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Satu diantaranya bersifat prinsipil. *Pertama*, sebuah negara dan bangsa seperti Indonesia seyogianya tidak mengharapkan bisa secara lurus tanpa kesulitan apapun dalam 60 tahun menjadi sebuah bangsa besar dan negara yang mantap. Untuk meneguhkan pandangannya ini, Romo Magnis merujuk kasus-kasus seperti Jerman dan Perancis yang pernah mengalami kegagalan untuk mencoba sistem demokrasi. Bahkan, dalam kasus Jerman, percobaan pertama menghasilkan salah satu petaka umat manusia terbesar di dunia, yaitu nazisme, Perang Dunia Kedua, ataupun *holocaust*. *Kedua*, luasnya konsensus demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Barangkali, menurut Romo Magnis, beberapa kelompok Islam tidak terlibat konsensus semacam itu seperti Hizbut Tahrir dan beberapa kelompok lainnya. Namun, sebagian besar rakyat Indonesia sepakat untuk memilih demokrasi.

Dalam beberapa periode mendatang, Islam akan tetap memainkan peran yang cukup penting. Meskipun demikian, dalam pandangan Romo Magnis, Islam fundamentalis atau Islam garis keras tidak mempunyai kemajuan yang mengkhawatirkan. Mungkin, mereka masih akan mengalami peningkatan, tetapi akan sampai pada suatu level tertinggi. Jika

PKS dijadikan ukuran, maka ia tidak akan lebih dari 20%. Sementara itu, Islam moderat atau Islam normal telah mengidentifikasikan dirinya dengan Indonesia beserta strukturnya, dan saat ini dengan Pancasila. Jika dibandingkan dengan masa Orde Lama, yakni pada masa demokrasi terpimpin, maka, menurut Romo Magnis, apa yang terjadi sekarang ini merupakan kemajuan besar. “Demokrasi kita banyak sekali cacat sama sekali tidak perlu disangkal”, demikian Romo Magnis menegaskan, “tetapi ada sesuatu yang positif”. Pada tahun ‘99/2000, misalnya, banyak orang berbicara mengenai disintegrasi bangsa, tetapi sekarang pembicaraan semacam itu tidak ada lagi. Menurut Romo Magnis, bahaya disintegrasi dan masalah masih ada di Papua, tetapi Aceh sudah dapat diatasi dengan baik. Sementara di lain provinsi, tidak ditemukan masalah yang serius. Otonomi daerah barangkali masih menyisakan persoalan, dan masalah pusat dengan daerah belum teratasi. Namun, ini bukan disebabkan oleh otonomi daerah yang salah, tetapi lebih pada implementasinya yang kurang baik. Di sisi lain, konflik-konflik kekerasan sudah jauh berkurang meskipun di beberapa tempat kekerasan masih berlangsung. *Ketiga*, masih kuatnya nasionalisme Indonesia. Dalam pandangan Romo Magnis, nasionalisme Indonesia lebih kuat dan solid dibandingkan dengan yang dibayangkan banyak orang selama ini. Dalam situasi dimana Bangsa Indonesia ditantang, rasa nasionalisme tersebut serta-merta muncul. Konflik horisontal antara Islam dengan Kristen atau antaretnis mungkin masih terjadi, tetapi jika orang-orang Indonesia ke luar negeri dan bertemu maka ikatan-ikatan ke-Indonesia-annya masih sangat kuat. Ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa jika orang-orang Melayu Indonesia di luar negeri merasa lebih dekat dengan orang Batak, Jawa atau Flores daripada dengan Melayu Malaysia. Padahal, budayanya sama.

Rasa optimisme juga diungkapkan oleh Nur Iman Subono dari Demos. Rasa optimisme ini berangkat dari riset-riset Demos yang menemukan eksperimentasi demokrasi di tingkat lokal yang luar biasa. Di beberapa daerah seperti Sumatra Barat dan Bali, rakyat cukup solid untuk melawan elit yang dianggap tidak cukup merepresentasikan kepentingan-kepentingan mereka. Di kota-kota besar, memang masih cukup rentan terhadap politik uang, tetapi di desa-desa dan gunung-gunung mereka cukup solid dalam melawan penguasa.

Di luar yang telah dipaparkan di atas, hampir semua peserta diskusi tampaknya sepakat bahwa demokrasi merupakan suatu pilihan yang harus disukseskan. Oleh karenanya, kemandegan demokrasi yang sekarang tengah berlangsung perlu dilakukan perubahan, dan perubahan-perubahan tersebut hendaknya dilakukan baik dari atas (elit politik) melalui pemimpin yang visioner, dan dari bawah (*grass root*). Perubahan dari atas perlu dilakukan karena bagaimana pun pemimpin yang visioner diperlukan dalam rangka memandu kemana arah perubahan tersebut hendak dilaksanakan. Dalam konteks Indonesia, bagaimana mengimplementasikan Pancasila dan UUD’45. Sementara perubahan-perubahan juga harus dilakukan dari bawah (*grass root*) karena seringkali terjadi perubahan yang datang dari atas (elit politik) tidak pernah terjadi. Merujuk pendapat **Max Lane**, Boni Hargens mengemukakan bahwa perubahan datangnya dari bawah. Oleh karenanya, kita seyogianya tidak percaya pada sistem, terhadap kepemimpinan kolektif karena seringkali mereka tidak mampu membuat perubahan apapun.

Dari hasil diskusi, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang perlu dikerjakan dalam rangka menyukseskan demokrasi Indonesia. *Pertama*, mencegah terjadinya “pembajakan” di aras lokal. Catatan yang diberikan Ivan A. Hadar atas optimisme Romo Magnis bahwa

optimisme tersebut dapat diterima dengan catatan proses demokrasi yang sekarang tengah berlangsung tidak dibajak oleh elit-elit politik yang kemudian memberikan roh atas proses tersebut. Oleh karena itu, menurut Ari Sudjito, pekerjaan rumah terbesar kita salah satunya adalah bagaimana mencegah pembajakan-pembajakan di aras lokal yang sebetulnya dilakukan dengan penuh kecurigaan kepada *society*.

Kedua, perlunya pendidikan politik. Pendidikan politik ini perlu dikerjakan karena setidaknya dua alasan. *Pertama*, kuatnya instrumentalisasi demokrasi dan lemahnya pendidikan politik. Dalam hal ini, Azman Fajar dari Pergerakan Indonesia mengemukakan bahwa proses demokrasi tidak diiringi dengan proses pengorganisasian dan pembangunan kesadaran politik baru rakyat. Sebaliknya, demokrasi hanya menjadi sebuah *event* yang berlangsung setiap lima tahun, dan karenanya tidak mampu melahirkan satu sistem yang membuat kesadaran politik baru di masyarakat. Oleh karena itu, ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan antara pragmatisme dan idealisme maka masyarakat cenderung memilih pragmatisme. Ini terjadi karena lemahnya pendidikan politik. *Kedua*, terjadinya de-ideologisasi dan de-organisasi yang berlangsung selama Orde Baru. Untuk mengatasi hal ini, menurut Imam Yudotomo, perlu adanya model pendidikan politik yang mampu menghidupkan kembali ideologi atau, jika ideologi dirasa menakutkan, maka cita-cita karena cita-cita akan menumbuhkan suatu visi. Selain itu, pendidikan politik juga penting dalam rangka melakukan transfer atas nilai-nilai politik kenegaraan. Dalam hal ini, Boni Hargens mengemukakan bahwa perlu kiranya pendidikan yang menjelaskan mengapa, misalnya, kita harus hormat kepada merah putih, mengapa Pancasila harus dipegang teguh sebagai ideologi negara, dan lain sebagainya.

Ketiga, membuka ruang negosiasi di tingkat *grass root* dan *mapping* atas persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat. Menurut Ari Sudjito, imajinasi demokrasi dalam era reformasi adalah adanya ruang yang tersedia sehingga masyarakat bisa merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Sayangnya, hal ini belum tercermin secara konkret dalam praksis. Oleh karena itu, menurut Ari Sudjito, persoalan yang perlu dikawatirkan bukanlah formalisasi agama karena pada dasarnya hanya merupakan refleksi atas kepentingan elit-elit lokal sebagai alat untuk “jualan”. Namun, kefrustasian masyarakat yang, besar kemungkinan, akan melahirkan disorientasi di tingkat *society* sebagai akibat menularnya kerusakan struktur politik formal ke masyarakat bawah. Sementara pada waktu bersamaan, ketahanan sosial di aras lokal mulai tergerus oleh problem-problem kemiskinan, persoalan kelangkaan, yang tidak mengalami perubahan secara signifikan meskipun telah dilakukan pilkada dan sebagainya. Sementara pada waktu bersamaan, gerakan pro-demokrasi gagal dalam membuat panduan atau *map* untuk menolong masyarakat keluar dari kefrustasian semacam itu. Untuk mengatasi hal ini, menurut Ari Sudjito, lokus negosiasi seyogianya disebar tidak hanya di pusat, tetapi juga di aras lokal. Lebih lanjut, Ari Sudjito menegaskan pentingnya usaha yang ditujukan untuk mencegah kerusakan institusi lokal (*local institution*) atau kapital sosial karena jika tidak maka kerusakan tersebut akan menjadi semakin parah.

Di sisi lain, Ari Sudjito mengemukakan bahwa kebangkitan lokal berdasarkan sentimen etnis atau lokal sangat sedikit sekali. Jika ada, maka hanya *event-event* partai politik dan tidak terekspresikan dalam *policy* ataupun praksis. Oleh karena itu, ruang negosiasi yang sempat dibuka pada awal reformasi harus dihidupkan kembali dalam kerangka membela rakyat atau komunitas dengan desentralisasi.

Dalam kaitan ini, masyarakat atau komunitas harus diubah melalui pendidikan politik, yang berarti mendemokratisasikan mereka.

Keempat, pentingnya *limited state-intervention*. Dalam pandangan Amir Effendi Siregar, demokrasi pada dasarnya menyangkut bagaimana menjamin keseimbangan antara *rule private sector* dengan *state sector*. *State sector* ini diperlukan dalam rangka menjaga keselamatan publik yang dalam UUD '45 sudah digariskan dengan jelas. Menurut Amir Effendi Siregar, negara atau *state* harus diterjemahkan secara modern. Dalam konteks ini, *balancing* tidak dapat dimaknai secara konvensional, yakni pembagian kekuasaan atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, *balancing* harus mampu melahirkan satu institusi negara yang *kuasi yudisial*, yang *kuasi eksekutif*. Di negara-negara Barat, institusi-institusi semacam ini sudah dibentuk guna melakukan *check and balances* secara lebih baik. Dengan demikian, negara tidak lagi diterjemahkan sebagai pemerintah atau *government* semata-mata, tetapi juga lembaga-lembaga negara seperti KPI, KPU, dan lain sebagainya.

Kelima, seperti telah dikemukakan sebelumnya, Islam akan selalu memainkan peranan yang menentukan dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, Islam moderat (NU dan Muhammadiyah) dinilai gagal dalam mengawal demokrasi sehingga membuka ruang bagi kemunculan gerakan-gerakan fundamentalisme Islam. Mengenai hal ini, Saiful Bahari mengatakan bahwa menguatnya gerakan fundamentalisme Islam dapat dilihat dalam dua hal. *Pertama*, kelompok Islam yang cukup besar, yaitu NU dan Muhammadiyah gagal dalam mengartikulasikan simbol-simbol nilai dan pandangan-pandangannya dalam masyarakat yang berada di tingkat paling bawah, dan ini sangat berpengaruh sekali dalam kelanjutan demokrasi karena berkaitan dengan proses kemajuan dan

Di beberapa daerah seperti Sumatra Barat dan Bali, rakyat cukup solid untuk melawan elit yang dianggap tidak cukup merepresentasikan kepentingan-kepentingan mereka. Di kota-kota besar, memang masih cukup rentan terhadap politik uang, tetapi di desa-desa dan gunung-gunung mereka cukup solid dalam melawan penguasa.

penghambatan demokrasi. Oleh karena itu, menurut Saiful, jika kedua kelompok besar ini gagal, maka merupakan masalah serius yang perlu diantisipasi karena dapat mengganggu proses demokrasi yang tengah berlangsung. *Kedua*, implikasi kegagalan ini adalah pengambil-alihan simbol-simbol nilai oleh kelompok-kelompok fundamentalis di wilayah-wilayah yang dulunya didominasi oleh NU dan Muhammadiyah. Situasinya menjadi semakin buruk ketika kegagalan kedua kelompok Islam moderat ini juga diikuti oleh gerakan-gerakan prodemokrasi, yang dalam kenyataannya hanya mampu bermain di tingkat menengah. Menurut Saiful, jika pada era tahun 50-an, 60-an, terdapat ideologi-ideologi sekuler yang begitu mampu mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi dari lapis bawah, maka sekarang kelompok-kelompok pro-demokrasi berada di tingkat menengah. Akibatnya, mereka tidak mempunyai akar dan cabang di tingkat paling bawah sehingga ruang sosial yang berada di lapis bawah hanya dikuasai oleh kelompok yang kemungkinan besar telah bergeser ke fundamentalis. Untuk itu, bagi kelompok Islam moderat, NU dan Muhammadiyah,

perlu melakukan koreksi diri sehingga mereka akan memberikan kontribusi bagi demokrasi di Indonesia secara lebih bermakna. Jika tidak, maka besar kemungkinan kelompok-kelompok fundamentalis akan semakin menguat dan mengakibatkan demokrasi di Indonesia berada dalam masalah.

Penutup

Secara keseluruhan, diskusi dengan tema “Pemimpin Tanpa Visi” ini menghasilkan suatu temuan menarik, terutama dalam rangka memantapkan demokrasi di Indonesia. Dalam catatan penutup ini, penting kiranya dikemukakan kembali pandangan Huntington yang menyatakan bahwa kisah sukses reformasi sangat tergantung pada kehadiran seorang pemimpin yang jenial. Menurutny, reformasi tidak umum terjadi jika talenta politik yang diperlukan untuk itu menjadi jarang. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang visioner dalam mengawal reformasi.

Dalam konteks Indonesia, pemimpin yang visioner diperlukan dalam rangka membangun sebuah bangsa, merangsang rakyat untuk membayangkan diri secara vertikal dan menjawab pertanyaan

berbagai macam persoalan yang merentang dari persoalan kemiskinan, penegakkan hukum, strategi meningkatkan GNP, mengatasi pengangguran, dan sebagainya yang kesemuanya memerlukan filsafat, paradigma, dan visi yang jelas. Tanpa itu, pembangunan tidak akan mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi, tetapi lebih pada usaha melayani kepentingan pasar. Penyelesaian tidak bersifat menyeluruh, tetapi parsial.

Di luar kekurangan tersebut, masih ada perasaan optimistis atas masa depan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, ada beberapa agenda yang perlu dilakukan diantaranya adalah mencegah terjadinya “pembajakan” di tingkat lokal, melakukan pendidikan politik, membuka ruang negosiasi di tingkat *grass root* dan *mapping* atas persoalan yang dihadapi rakyat, perlu adanya intervensi negara yang bersifat terbatas demi menjamin keselamatan dan hak publik, dan bagi kelompok Islam moderat pentingnya melakukan koreksi diri sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi proses demokrasi di Indonesia serta mampu mencegah munculnya gerakan-gerakan fundametalisme Islam.

IVAN A. HADAR**

PENTINGNYA IDEOLOGI*

Seusai peluncuran buku *Making Globalization Work* versi bahasa Indonesia, terjadi perdebatan menarik antara Sang Pengarang yang juga pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2001, Joseph E Stiglitz, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Boediono terkait dengan ideologi.

Sejumlah ekonom di Indonesia, kata Boediono, menuding pemerintah menjual diri demi berpegang pada ideologi liberalisme yang diusung Konsensus Washington. Namun, baginya, menjadi tidak produktif jika mencari jawaban atas persoalan riil melalui perdebatan ideologi. Menanggapi Boediono, Stiglitz mengatakan, pragmatisme tidak dapat dilepaskan dari konteks ideologi yang menyajikan pandangan mendasar tentang bagaimana pemerintah seharusnya berperan (*Kompas*, 19/8/2007).

Ketimpangan dalam arus globalisasi, menurut Stiglitz, perlu dikelola oleh negara-negara berkembang dengan peran pemerintah yang lebih efektif dan efisien, tercermin dalam dorongan pemerintah terhadap pengembangan industri baru, pertanian, bisnis skala kecil serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berbuah kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Sejarah mencatat bahwa, di satu sisi, maraknya perekonomian, tidak melulu disebabkan oleh liberalisme perdagangan.



Krisis ekonomi sebelumnya pun, termasuk yang melanda negeri ini, tidak mampu diatasi oleh pasar. Sementara pada sisi lain, proteksionisme negara telah pula memperparah gejala krisis, ketimbang memperbaikinya.

Secara umum, konsep (neo)liberal diakui bisa bermanfaat dalam upaya mengurangi mentalitas *rent seeking* para birokrat. Namun, pada saat yang sama, ekonomi pasar murni yang meminggirkan peran negara sebagai penyeimbang ini, gagal memenuhi janjinya. Kesenjangan antarnegara kaya dan miskin, serta antara lapis sosial dalam sebuah negara semakin melebar. Tiga contoh berikut, memperjelas keterbatasan dari berbagai solusi yang melulu bertumpu pada premis ekonomi pasar.

Pertama, asumsi neoliberal bahwa pasar modal tidak hanya membantu pemanfaatan kapital secara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja, tidak terbukti. Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar spekulatif yang dige-lembungkan (*spekulativer Marktaufbläuhung*). Fluktuasi kurs di bursa efek, tidak menggambarkan kekuatan ekonomi sesungguhnya dari berbagai perusahaan anggotanya. Tanpa regulasi, pasar modal global bisa mempengaruhi kuat-rapuhnya stabilitas ekonomi sebuah negara, kawasan atau bahkan dunia, seperti yang diperlihatkan oleh “Krisis Asia” yang dampaknya masih terasa bagi Indonesia hingga saat ini.

Kedua, penelitian Pritchett (1996) membuktikan bahwa dalam proses globalisasi yang terjadi bukan konvergensi melainkan kesenjangan yang meluas. Pasar bebas, liberalisasi perdagangan dunia dan investasi serta pasar modal, samasekali tidak berperan dalam memperkecil kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Pemenang proses globalisasi adalah negara-negara kaya anggota OECD, sementara negara berkembang semakin terpinggirkan.

Ketiga, kekuatan pasar tidak mampu mencegah krisis lingkungan global. Meski harus pula diakui, kegagalan yang sama dialami oleh negara, terutama terkait maraknya monopoli dan oligopoli. Ternyata, pasar seperti juga halnya negara, dapat gagal.

Penyebab kegagalan pasar dan pentingnya intervensi negara, berkaitan dengan beberapa hal berikut, yaitu tidak sehatnya persaingan, kesenjangan ekonomi di tingkat nasional dan global, kemiskinan, kerusakan lingkungan, serta ketidakmampuan perusahaan swasta untuk mencukupi kebutuhan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Untuk membendung dampak negatif yang dibawa oleh proses globalisasi neoliberal, diperlukan sebuah negara yang efisien. Tetapi, pada saat yang sama, akibat keterpenggalan antara ekonomi global dan politik nasional, sebuah kebijakan proteksionistis oleh negara diduga akan mengalami kegagalan. Lalu, bagaimana mengatasi dilema tersebut?

Sebenarnya, solusinya terletak pada semakin menyatunya masyarakat global, yang memunculkan berbagai kelembagaan ekonomi dan politik serta terbentuknya *global civil society*. Sebagai instansi politik terpenting, negara dapat berfungsi sebagai mediator kepentingan nasional dalam membendung dampak destruktif proses globalisasi. Pada saat yang sama, negara juga diharapkan berperan sebagai moderator berbagai proses dalam masyarakat sebagai instansi integrasi dan penengah yang mencegah terjadinya fragmentasi dalam masyarakat.

Sementara itu, kelompok kepentingan lokal dapat berperan memperkuat berbagai faktor setempat seperti pendidikan, budaya, infrastruktur serta mengorganisir jaringan lokal seperti perluasan partisipasi politik, seleksi jenis investasi dan penguatan potensi ekonomi lokal.

Pada tingkat regional, kerjasama antarnegara dalam sebuah pakta ekonomi

seperti halnya ASEAN bila dikelola dengan pas, bisa membuka ruang gerak lebih bagi perdagangan sekaligus memperkuat posisi tawar dalam menghadapi persaingan global.

Terakhir, yang tak kalah penting adalah berfungsinya *global governance*. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara negara dan masyarakat sipil di tataran lokal, nasional, dan internasional. Sasarannya, adalah reorganisasi politik dalam semua tataran aksinya melawan logika pasar murni. Negara, masyarakat sipil dan *Global Governance*, idealnya bersekutu dalam membendung dominasi pasar dan ekonomi serta mengurangi dampak buruknya. Kegagalan pasar global, seperti kesenjangan antarnegara dan antar-kelompok masyarakat, kemiskinan, pengangguran dan krisis lingkungan hidup, pada hakekatnya menuntut negara yang efektif dan efisien, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Dari semua argumentasi di atas, terlihat betapa pentingnya ideologi.

Di Indonesia, hingga kini masih terasa adanya kecenderungan alergi terhadap ideologi. Boleh jadi, akibat trauma depolitisasi sekaligus deideologisasi lebih dari 30 tahun rejim Soeharto. Memang benar bahwa, saat ini, hampir semua partai politik menganut azas demokrasi dan kerakyatan. Namun, implementasinya bisa bertolak belakang. Ambil contoh Golkar. Pilar utama perekonomian yang menjadi program partai yang pernah menjadi pendukung utama Orde Baru ini adalah usaha kecil, menengah dan koperasi. Dengan menyandang visi antitesis ekonomi konglomerasi ini, sebenarnya Golkar seharusnya dikategorikan sebagai partai kiri. Namun, sebagai partai pendukung pemerintahan SBY-JK yang saat ini mengambil kebijakan kanan, Golkar pada

kenyataannya adalah partai kanan. Berseberangan dengan visinya sendiri.

Gejala aneh berikut juga terpantau di LSM. Sebuah forum LSM besar yang bergiat dalam upaya penghapusan utang bagi Indonesia, dalam rapat anggotanya misalnya, memilih seorang pengurus non-Indonesia yang berideologi kanan dan tidak setuju adanya penghapusan utang bagi negara berkembang. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bila para aktivis LSM anggota forum memiliki kesadaran ideologis.

Hal ini, selain akibat proses deideologisasi Orde Baru, boleh jadi juga diperkuat dengan berakhirnya konflik Barat-Timur, awal tahun 1990-an ketika dua teori utama pembangunan yaitu modernisasi dan dependensia seakan dicampakkan ke tong sampah sejarah ideologi. Emoh teori ini mengandung bahaya bahwa semua yang berbau ideologi ditinggalkan, sehingga tanpa sadar, kita tidak punya pegangan. Yang dilakukan sekadar mengibarkan bendera kecil dalam pusaran *wind of change* usai Perang Dingin. Padahal, angin yang berhembus, berasal dari arah neo-liberal.

Tentang muatan ideologis neo-klasik dan konsepnya tentang pasar bebas dan demokrasi parlemen, oleh mayoritas ilmuwan, didiamkan. Padahal, selain memang banyak elemen yang mubazir dan salah dalam berbagai teori lain, hal-hal yang berguna juga terlupakan. Ambil misalnya, konsep heterogenitas struktural. Hal ini, dalam era globalisasi, sebenarnya masih tetap penting dan diperlukan untuk memahami fenomena keterbelakangan. Konsep ini misalnya bisa menerangkan, mengapa Bangkok, atau bahkan juga Jakarta, sebagai Metropol-Dunia-Ketiga lebih terkait dengan pasar dunia ketimbang dengan *hinterland*-nya sendiri.

Begitu pula dengan konsep modernisasi yang mendiskusikan *Landreform* sebagai persyaratan pembangunan, mempunyai nilai pencerahan yang tinggi. Yang diperlukan

adalah upaya untuk mencocokkan berbagai teori dan strategi dengan realitas lapangan, dan tidak sekedar menjadi penganut buta pencetus teori. Hal, yang bagi banyak praktisi selama ini, baik dari kubu penganut teori modernisasi maupun dependensia, mungkin karena malas mikir, telah diabaikan.

Dampaknya, berkembang sikap hitam-putih dari dua arah yang berbeda. Mereka yang konservatif, sepenuhnya menolak teori ketergantungan. Jelas salah anggapan bahwa semua masalah Dunia Ketiga, bersumber di negara-negara industri. Sikap ini, menyederhanakan persoalan dengan menempatkan Utara dalam posisi keperkasaan mutlak, sementara Selatan sebagai korban tak berdaya. Hal ini, sama fatalnya dengan analisis Siegfried Kohlhhammer (1993) yang menyatakan Selatan sepenuhnya bertanggungjawab atas segala *misery* yang menjadi tanggungannya kini, sambil melupakan penjajahan, jerat utang luar negeri, proteksionisme, ekspor senjata, pemborosan energi dan sebagainya oleh Utara. Pemutarbalikan fakta tersebut, beda dalam kualitas dengan apa yang misalnya dilakukan oleh Axelle Kabou (1993) dari Kamerun dengan otokritik, karena tidak membebaskan sepenuhnya elite Afrika dari tanggung jawab atas berbagai dilema pembangunan yang terjadi.

Dalam kevakuman teori, antara lain akibat de-ideologisasi, implementasi kebijakan pembangunan dipenuhi oleh sejumlah jargon dan wacana yang kedengarannya progresif, meski bila ditilik lebih dalam bisa diinterpretasikan secara fleksibel. Partisipasi, ketahanan sosial, *good governance* dan *sustainability*, untuk menyebut beberapa yang terpenting, kedengaran sangat inovatif untuk membenarkan kegiatan 'bantuan pembangunan' atau 'kerjasama

Gejala aneh berikut juga terpantau di LSM. Sebuah forum LSM besar yang bergiat dalam upaya penghapusan utang bagi Indonesia, dalam rapat anggotanya misalnya, memilih seorang pengurus non-Indonesia yang berideologi kanan dan tidak setuju adanya penghapusan utang bagi negara berkembang. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bila para aktivis LSM anggota forum memiliki kesadaran ideologis.

pembangunan' yang banyak dikritik dalam dekade 80-an.

Dengan mengambil contoh 'partisipasi', menjadi jelas betapa jargon sejenis masih perlu dipertanyakan. Dulu, ada tuntutan agar pembangunan harus "dari bawah". Kini, formel ajaib 'partisipasi' akan menjamin pelibatan kelompok sasaran dalam berbagai proyek pembangunan. Penggunaan jargon ini menutupi perbedaan antara keterlibatan sukarela dan spontan dengan bentuk-bentuk partisipasi manipulatif dan diarahkan dari jauh. Sebenarnya, yang penting, bukan kegiatan partisipatif itu sendiri, tetapi pertanyaan dalam hal apa dan untuk tujuan apa harus ada partisipasi. Sebagai contoh, sistem Nazi Jerman, yang kejam dan menjadi penyebab Perang Dunia II, pada dasarnya, sangat partisipatif. Masyarakat juga bisa

rajin dilibatkan secara partisipatif dalam proyek pembangunan yang idiotis (dungu). Partisipasi menaikan legitimasi sebuah proyek di negara pemberi bantuan, di samping terbebas dari tanggung jawab bila proyeknya ternyata gagal. Tapi, masyarakat (luas) dunia jangan coba-coba menuntut berpartisipasi dalam menikmati kue pembangunan, apalagi ikut terlibat dalam kemakmuran belahan Utara bumi.

Pertanyaan tentang penyebab dari vakumnya teori dan utopi berbarengan dengan ambruknya model sosialisme negara, juga di kalangan kiri non-ortodoks (*new left*), belum memberikan jawaban memuaskan. Padahal, sosialisme demokrasi, anarkhisme utopis dan renungan Gandhi tentang ekonomi autarki, belum tercemarkan. Bahwa semua itu adalah alternatif terhadap logika

(berproduksi) kapitalistik, mestinya menjadi alasan optimistik, bukannya alasan untuk berkecil hati (*resignation*). Sama halnya dengan, proteksi ekonomi dalam beberapa aspek esensial, tidak hanya ber dampak negatif, tetapi pada sisi lain, paling tidak, hal tersebut membuka kesempatan bagi pembangunan yang mandiri, yang terbebas dari pemaksaan persyaratan neo-liberal perekonomian dunia.

* Tulisan ini adalah elaborasi lanjut dari tulisan penulis dengan judul sama yang dipublikasi di harian Kompas, 30 Agustus 2007

** Koordinator Nasional Target MDGs (BAPPENAS/UNDP). Pendapat pribadi.

Faisal H Basri:

Pemimpin jangan durhaka pada bangsanya

Faisal Basri adalah sosok pemimpin muda yang kuat dalam mempunyai karakter dalam berideologi, baik sebagai ekonom maupun sebagai salah satu agen perubahan di Indonesia.

Ditemui secara marathon di sela-sela kesibukan dalam mendiseminasi gagasan melalui seminar dan kesibukan mengajar di universitas, redaksi kami berhasil melakukan wawancara di dua tempat yang berbeda, Hotel Le Meridien dan Ruang Rapat IRSA tempat Faisal Basri beraktivitas sehari-hari. Berikut petikan wawancara tentang kepemimpinan:

Bagaimana menurut Anda kepemimpinan yang ideal untuk situasi Indonesia saat ini?

Berbicara mengenai kepemimpinan yang ideal, mungkin kita bisa memulainya dari fungsi kepemimpinan itu sendiri. Menurut hemat saya, fungsi kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin memobilisasi seluruh

resources yang ada, sumberdaya yang kita miliki, untuk mencapai satu tujuan secara efektif.

Seperti kita ketahui, tujuan bangsa kita kan antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah *goals*

bangsa kita. untuk membawa bangsa ini mendekat ke *goals*-nya, tanpa *zig zag*. Sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan kemampuan meraciknya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan itu. Dari segi itu, pemimpin juga harus punya komitmen, dalam arti kemampuan memobilisasi sumber daya yang dimiliki bangsanya, di samping kemampuan

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memobilisasi sumberdaya dan mengarahkan ke tujuan-tujuan yang lebih tinggi dengan waktu yang lebih cepat. Capaian-capaian yang lebih tinggi dan lebih cepat yang diupayakan oleh seorang pemimpin harus diarahkan untuk membawa tujuan bangsa ini tetap berada dalam *track*-nya. Itulah indikator dari efektifitas kepemimpinan.

persuasif pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada, dan mewujudkan kebahagiaan buat seluruh rakyatnya.

Seorang pemimpin harus tahu jalan mencapainya dan kendaraan apa yang dia pakai untuk mencapai tujuan itu. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bisa membawa seluruh penumpang di kendaraan itu mencapai tujuan, dan menjamin agar tujuan-tujuan itu selalu terjaga atau berada dalam *track*-nya yang benar. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memobilisasi sumberdaya dan mengarahkan ke tujuan-tujuan yang lebih tinggi dengan waktu yang lebih cepat. Capaian-capaian yang lebih tinggi dan lebih cepat yang diupayakan oleh seorang pemimpin harus diarahkan untuk membawa tujuan bangsa ini tetap berada dalam *track*-nya. Itulah indikator dari efektifitas kepemimpinan.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun institusi sebagai *track*-nya. *Track*-nya adalah peranan institusi dalam artian semua itu harus harus dijabarkan melalui penguatan institusi. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjabarkan tujuan-tujuan bernegara melalui penguatan peran institusi tadi. Artinya, ketika dia sudah tidak memerintah kebijakannya bisa dilanjutkan.

Karena pemimpin yang baik adalah ketika ia sudah tidak memerintah institusinya harus jalan terus. Institusi yang baik adalah yang baik harus didasari oleh ideologi. Oleh karena itu seorang pemimpin harus punya ideologi. Ia harus patuh, tunduk, dan taat pada ideologi yang ditetapkan oleh bangsanya. Apa ideologinya. Ideologi politiknya adalah demokrasi sosial, ideologi ekonominya adalah ekonomi pasar sosial. Nah kalau pemimpin itu membawa ideologi bangsa itu ke arah ideologi kapitalisme-neoliberalisme, artinya dia pemimpin yang durhaka kepada bangsanya.

Menurut Anda, apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia saat ini?

Kriteria pertama seorang pemimpin adalah, ia harus taat asas pada landasan ideologinya. Ia harus orang yang memiliki keyakinan (*belief*), seorang yang memiliki keyakinan yang penuh tanpa pamrih (*one man with it belief, it would be thousand without an interest*). Orang yang punya *belief* yang paling penting, dia yakin landasan ideologinya benar dan bisa dijadikan kendaraan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Kedua, ia seorang yang visioner. Dia juga bisa membawa rakyatnya untuk menghadapi tantangan-tantangan, bukan hanya yang ada sekarang, akan tetapi tantangan yang akan dihadapi bangsanya di masa depan. Ia harus punya kemampuan untuk melakukan pengayaan (*enrichment*) dari orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan peningkatan kapasitas menghadapi perubahan-perubahan yang dinamis. Jadi pemimpin itu menyiapkan bangsanya bukan untuk sekedar menghadapi masalah sekarang, tapi juga berbagai bentuk tantangan yang akan terjadi di masa depan.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, karena situasi sosio-kultural bangsa kita yang sangat heterogen, pemimpin itu harus bersifat inklusif, karena pemimpin yang inklusiflah yang bisa mengajak seluruh rakyat yang berbeda suku, bangsa, agama, latar belakang, dan adat isitiadat itu berjalan sama-sama dalam satu kendaraan untuk mencapai tujuan bangsa, tidak ada yang tercecce.

Keempat, meletakkan dasar-dasar pijakan bagi bangsa ini untuk terus maju dan berkembang ke depan, sehingga dia tidak berorientasi semata-mata pada hasilnya sekarang, karena pemimpin itu adalah pada umumnya, hasil nyata yang dia upayakan baru kelihatan sepuluh-lima belas tahun setelah dia tidak lagi berkuasa. Jadi pemimpin yang baik tidak boleh bersikap, ah yang penting

pokoknya saya bikin aja, saya genjot sekarang, supaya masyarakat memilih saya kembali.

Sementara yang kelima, pemimpin itu harus mampu melahirkan kader-kader pemimpin yang lebih banyak dan memiliki kemampuan yang lebih baik dari dia.

Menurut Anda, konsep dan strategi kebijakan seperti apa yang harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia guna menyelesaikan krisis multidimensi yang dihadapi saat ini?

Sebelum kita bicara konsep dan strategi kebijakan, saya terlebih dahulu ingin mengemukakan persoalan institusi, karena di Indonesia pengertian institusi ini banyak disamakan dengan agensi. Kalau agensi itu kan pemerintahan, departemen, atau dengan kata lain *government agency*.

Sementara insituti itu berisi norma, *value*, peraturan, undang-undang sampai konstitusi yang diyakini secara bersama oleh bangsa itu sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Instutusi adalah sarana yang meng-*create* tata aturan, yang meng-*create* kepastian bagi siapa pun sehingga orang tahu kalau dia berbuat apa dia akan mennghadapi atau mendapat konsekuensi apa.

Bangsa ini sesungguhnya telah meletakkan tujuannya dengan jelas, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Tapi, kita tidak pernah kunjung secara eksplisit, tegas, lugas, memilih kendaraan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi, ya bingung terus. Kan untuk mencapai tujuan harus menggunakan kendaraan. Nah akar soalnya, ada di undang-undang dasar kita yang rancu. Kenapa rancu, karena undang-undang kita disusun bersifat sementara. Kata Bung Karno, nanti kalau sudah pemilu, hasil pemilu itu akan menghasilkan MPR/DPR yang

akan bersidang untuk membuat konstitusi baru yang komprehensif.

Masalahnya, sampai sekarang kita tidak pernah membangun konstitusi baru yang komprehensif itu. Sudah enggak pernah membangun, kemudian tiba-tiba diamandemen dengan cara enggak karuan, sehingga banyak menimbulkan kerancuan. Lihat saja sistem pemerintahan kita sekarang, presidensil enggak, parlementer enggak, federalisme engga, sentralisasi enggak. Bikameral ada, tapi kenyataannya masih unikameral. Peran negara dan peran pasar kacau. Inilah yang membuat segala sesuatunya jadi rancu.

Karena kita tidak pernah tegas merumuskan demokrasi kita seperti apa? Katanya demokrasi Pancasila, tapi juga tidak pernah didefinisikan secara jelas. Nah ini semua yang menimbulkan kerancuan. Kita disebut liberal engga mau, tapi kenyataannya berbagai kebijakan kita amat liberal. Ini yang bikin kita selalu silang sengketa, berpolemik, dan membuat kita lelah. Ketika digulirkan kebijakan privatisasi rame, tarif tol naik rame, semua rame, pemerintah kita bingung karena tidak punya pijakan.

Sebagai bangsa, kita menghadapi hambatan kelembagaan yang cukup serius. Sejarah menunjukkan, negara-negara yang maju sekarang adalah negara-negara yang memiliki kelembagaan politik dan kelembagaan ekonomi yang baik di masa lalu. Artinya, bisa saya katakan kelembagaan politik dan kelembagaan ekonomi yang baik di Indonesia sekarang lah yang akan menjamin Indonesia maju di masa yang akan datang. Kalo kita potret kelembagaan Indonesia sekarang kan kocar kacir. Sehingga banyak orang di negeri ini suka-suka aja bikin visi, karena apa, karena negara ini memang kacau kelembagaannya, jadi kaya orang *ngigau*.

Bagaimana Anda melihat contoh kepemimpinan negara-negara berkembang lain (seperti di negara-negara

kawasan Latin Amerika) dalam menyelesaikan persoalan kepemimpinan?

Secara historis dan sosial, di Amerika Latin itu, setelah merdeka, perusahaan multinasional masih berperan sangat kuat, berkolaborasi dengan elite lokal, yang pada umumnya adalah indo, yang asal-usulnya berasal dari keturunan Spanyol atau Portugis. Nah, kalo dalam konteks Indonesia, pasca kemerdekaan itu perusahaan-perusahaan asing yang hampir seluruhnya peninggalan Belanda itu dinasionalisasi, ditransformasikan ke dalam BUMN, seperti PJKA, Telkom, PTP, dan sebagainya. Sehingga konteksnya, kalau di Latin Amerika itu diametral antara kepentingan publik dan kepentingan perusahaan multinasional, kalau di Indonesia BUMN. Jadi terkesan berontak melawan negara. Nah, berontak melawan negara subversi namanya, jaman pak Harto dulu. Dan kalo kita perhatikan, karakter BUMN ini sama seperti perusahaan multinasional, Pertamina misalnya tidak memiliki kontribusi banyak kepada masyarakat, PLN cuma melistriki empat puluh lima persen penduduk, Telkom hanya melayani empat persen (*fix line*) dari jumlah penduduk, PTP juga engga ada manfaatnya buat rakyat. Tapi di Indonesia sosok yang muncul adalah negara. Jadi solusinya bukan berarti BUMN sebagai perusahaan milik negara harus di privatisasi. Kalau privatisasi jatuhnya ke tangan Aburizal Bakrie atau ke Jusuf Kalla kan sama saja bohong.

Jadi bagaimana menciptakan suatu iklim persaingan yang memungkinkan BUMN-BUMN itu tergerak untuk berubah. Dan terbukti kan, misalnya Telkom atau Jasa Marga setelah ada pesaing mengalami perubahan, tapi yang belum menghadapi pesaing, seperti PJKA atau PLN belum kelihatan karena belum ada perubahan. Masalahnya, jangan sampai BUMN-BUMN ini jadi sarang penghisapan dari politisi.

“Dan terbukti kan, misalnya Telkom atau Jasa Marga setelah ada pesaing mengalami perubahan, tapi yang belum menghadapi pesaing, seperti PJKA atau PLN belum kelihatan karena belum ada perubahan. Masalahnya, jangan sampai BUMN-BUMN ini jadi sarang penghisapan dari politisi.”

Sekarang di Latin Amerika, muncul gugatan terhadap perusahaan multinasional yang menghisap, seperti kontrak-kontrak eksplorasi sumberdaya alam yang engga benar. Tapi saya melihat ada strategi proses nasionalisasi ekonomi yang berbeda antara Venezuela dengan Bolivia. Kalau proses nasionalisasi ekonomi di Venezuela masih ditandai oleh dominannya peran elite (tentara dan jenderal-jenderal) dalam penguasaan BUMN. Jadi di Venezuela mirip dengan Indonesia masa Orde Baru. Model Venezuela menurut saya jelek. Terbukti Venezuela melorot terus dari segi ranking apa pun. Nah di Bolivia proses nasionalisasi ekonominya berlangsung lebih lugas dan lebih baik, karena pemerintah Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales ingin memperjuangkan keadilan. Karena selama ini, elite di Bolivia bersama perusahaan multinasional menjalin persekutuan yang membuat posisi dan peran negara jadi lemah.

Nah, sekarang di Bolivia terjadi penguatan posisi negara, dimana pemerintahan Evo Morales masih membolehkan perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi, tapi kontraknya ditinjau kembali. Nah itu kan yang tidak berani dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus Freeport atau INCO misalnya. Bahkan di INCO itu kasusnya lebih parah dari Freeport.

Padaahal konstitusi kita sudah menggariskan secara lugas, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contoh misalnya, kasus penjualan pengelolaan batu bara Arutmin, KPC, dibeli oleh Bakrie dengan harga sekitar 300 atau 400 juta US dollar, beberapa tahun kemudian dijual 2,5 miliar dollar. Menurut saya, ini engga boleh, karena melanggar konstitusi. Kalau Bakrie sudah tidak mau lagi mengelola, seharusnya pengelolaannya dikembalikan lagi ke negara, biar negara yang melalang.

Sehingga kelebihan profit dari hasil penjualan saham Arutmin, negara yang dapat, bukan Bakrie.

Contoh lain, PT. Aneka Tambang yang punya cadangan nikel di Halmahera. Nah kalo nikelnya cuma dieksploitasi jadi biji nikel saja, Cuma menghasilkan *net present value* (NPP) 3 miliar dollar, tapi kalo nikel itu dijadikan veronikel, maka NPP-nya akan menjadi tujuh kali lipat (sekitar 21 miliar dollar). Nah, kenapa tidak bisa. Karena untuk membakar dari biji nikel menjadi veronikel kan membutuhkan gas. Ironisnya, PT. Aneka Tambang, tidak mendapat pasokan gas. Nah, ini kan berarti pemimpinnya tidak berhasil mendayagunakan sebesar-besarnya *resources* yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Padahal Gasnya kan milik negara (Perusahaan Gas Negara/PGN). Tapi lebih baik di ekspor, daripada membesarkan PT. Aneka Tambang.

Bagaimana pandangan/pengalaman Anda dalam melihat rekrutmen pemimpin di tingkat lokal maupun nasional yang berlangsung saat ini?

Kenapa, yang karena institusi politiknya tidak jelas! Karena institusi politiklah yang melahirkan kesenjangan apa yang dilakukan politisi dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Institusi politik menghasilkan politisi yang tidak peka terhadap konstituennya, karena tidak ada akuntabilitas politisi kepada konstituennya. Sekalipun politisi itu tidak pernah mengunjungi konstituennya, dia tetap bisa terpilih kembali. Kemudian, sentralisme di dalam politik menyebabkan aspirasi dari bawah tidak pernah sampai ke Jakarta.

Ibu Megawati, misalnya, sulit untuk bisa mendengarkan apa yang terjadi dan bergejolak di bawah, karena lapisan-lapisan di birokrasi partai itu sudah demiki sangat tebalnya. Nah, oleh karena itu persoalannya bukanlah pada penyederhanaan jumlah partai. Cara berpikir yang benar kan seharusnya,

bagaimana kita bisa menciptakan sistem politik dan institusi politik yang memungkinkan efektifnya penyerapan aspirasi rakyat. Kalau sekarang kan diskusinya, partai banyak atau sedikit, bukan pada apakah aspirasi rakyat itu dapat ditangkap oleh partai politik secara efektif.

Oleh karena itu, diskusi seharusnya diarahkan bagaimana kita mampu mendesain suatu institusi politik yang memungkinkan aspirasi itu tidak senjang. Nah kalau jawabannya, partai lokal dibolehkan, *why not!* Toh, partai lokal juga akan melakukan pekerjaan politik di tingkat lokal. Jika terjadi pemilu nasional, partai lokal juga kan pada akhirnya harus berafiliasi dengan partai-partai politik di tingkat nasional. Nah sekarang, coba kalau Anda mau bikin partai baru, susahnya setengah mati, berapa miliar biaya yang Anda butuhkan.

Nah, kita harus menyadari, bahwa partai politik itu adalah pilar utama demokrasi. Dan, kenapa sih kita bikin partai, yah untuk menyederhanakan proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh insan-insan politik. Karena, kalau Anda maju jadi gubernur, bupati, atau walikota lewat jalur calon independen, pasti biayanya lebih mahal dari partai politik, wong Anda engga punya infrastruktur. Jadi solusinya adalah menciptakan bukan calon independen sebagai solusi aspirasi rakyat atau tidak, karena calon independen pada hakekatnya bukanlah ancaman, dan tidak boleh dilihat sebagai ancaman. Calon independen adalah *emergency exit*. Seperti kalau terjadi kebakaran di pesawat, kita tahu jalan keluarnya yang aman. Jadi kalau partainya sudah *dablek* semua, proses kepemimpinan kita tetap ada jalan keluarnya, yah si calon independen ini. Jadi calon independen hanyalah balancing untuk memecahkan kebuntuan politik, jadi dia itu darurat sifatnya.

Menurut Anda, apa kira-kira yang menjadi hambatan mendasar dari

sirkulasi kepemimpinan di negeri ini untuk menghadirkan sosok pemimpin yang bersih, memiliki integritas dan visi yang jelas serta bebas KKN?

Dari sisi sirkulasi elite kita merasakan kan selama ini sumpek, mampet. Jadi kaya udara yang muter-muter di sekitar kita saja, jadi alternatif kepemimpinan cuma ada pada figur Megawati, Wiranto, Gus Dur, atau Akbar Tanjung, karena semua sirkulasi udara mampet, engga ada ventilasi. Saya juga tidak tahu, kenapa sistem politik kita cuma menghasilkan kondisi seperti itu. Makanya, dalam konteks manajemen kepemimpinan daerah relevan yang namanya calon independen itu.

Calon independen itulah yang paling tidak sedikit bisa membuka sirkulasi udara itu agar mengalir secara segar. Karena kalo diserahkan kepada partai yang seperti itu hasilnya. Seperti koalisi menjelang pemilu 2009 misalnya, akan terjadi koalisi partai besar lagi, seperti PDIP dengan Golkar dan PPP, nanti bisa saja melawan SBY dengan Demokratnya plus PKS.

Dalam soal koalisi partai besar ini, kita menyaksikan betapa etika dan *fatsoen* politik dari politisi kita tidak jelas. Misalnya, seorang menteri yang notabene anak buah presiden, tidak melakukan koalisi tidak dengan presidennya. Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) melakukan koalisi dengan PDIP, berarti dia sudah tidak percaya dengan presidennya, tapi kenapa juga dia masih mau jadi menteri. Itulah rusaknya etika politik para politisi kita.

Tapi sebenarnya ini karma buat SBY. Karena SBY juga dulu kan anak buah Megawati yang men-*chalanges* bosnya, Hamzah Haz dan Agum Gumelar men-*chalange* bosnya. Nah kalau dia mau men-*chalanges* bosnya, berarti logika politiknya dia menganggap dirinya lebih baik dari bosnya. Harusnya, kalau para menteri itu punya etika politik, dan menganggap dirinya lebih baik dari presidennya, dia harus men-*chalanges*

Misalnya, seorang menteri yang notabene anak buah presiden, tidak melakukan koalisi tidak dengan presidennya. Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) melakukan koalisi dengan PDIP, berarti dia sudah tidak percaya dengan presidennya, tapi kenapa juga dia masih mau jadi menteri. Itulah rusaknya etika politik para politisi kita.

bosnya dari luar kekuasaan, jadi jangan dari dalam kekuasaan. Rusak dong, siapa yang mau kerja, ini kan namanya pembusukan.

Lalu bagaimana dengan soal birokrasi?

Bagi saya, birokrasi fungsi utamanya tidak lebih dari alat eksekutif. Birokrasi pada dasarnya bisa dipengaruhi oleh pemimpinnya. Salah satu keberhasilan dari seorang pemimpin adalah kalau dia berhasil memanfaatkan birokrasi. Birokrasi itu *given*. Jadi pemimpin harus memiliki *direction* yang jelas kepada birokrasi, sehingga birokrasi mau mengikuti kebijakan pemimpinnya.

Menteri itu bukan jabatan profesional, tapi jabatan politik. Jadi menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang duduk di kabinet harus jelas, jika diajak duduk dalam eksekutif atau duduk dalam pemerintahan, konsekuensi partai si menteri harus mendukung kebijakan pemerintahan di parlemen. Masalahnya, dalam konteks ini terjadi banyak kerancuan, partai si menteri kerap kali terlihat tidak mendukung kebijakan pemerintah. Inilah repotnya sistem pemerintahan kita, parlementer tidak, presidensial juga engga. Karena presiden sendiri gamang, untuk meng-*exercise* kekuatan dia sebagai presiden yang dipercaya langsung oleh rakyat, jadinya kebijakan presiden terkesan akomodatif terus.

Makanya dalam konteks kepemimpinan di daerah, calon independen bisa membuat mekanisme rekrutmen kepemimpinan di daerah bisa lebih baik. Jadi calon independen itu bukan untuk menggembosi partai, dia menjadi faktor pendorong untuk menuju perbaikan mekanisme rekrutmen kepemimpinan yang ada di dalam partai politik. Karena pada dasarnya calon independen itu susah dan lebih mahal biaya politiknya, *wong* dia engga punya instrumen.

Ada yang bilang gerakan reformasi yang ada sekarang sudah kebablasan, ada yang bilang sudah salah arah. Lalu ke depan, gerakan apa yang efektif dan bisa memunculkan orang-orang yang memiliki track record bersih dan punya integritas supaya bangsa kita bisa keluar dari kemelut multidimensi seperti saat ini?

Ya, awalnya kan disebabkan gerakan reformasi menganggap musuh utamanya adalah Soeharto, kalo saya kan menganggap musuh bangsa ini rezim, karena rezim—bukan Soeharto semata—yang merusak bangsa ini. Nah, kita keburu puas setelah Soeharto jatuh, tapi rezim engga berubah. Jadi yang sekarang berkuasa sebenarnya Orde Baru jilid II. Siapa ketua DPD, Golkar, Ketua DPR, Golkar, Wakil Presiden, Gokkar, BP Migas dikuasai Golkar, di KPU ada Golkarnya, dimana-mana Golkar.

Golkar berkepentingan untuk berkuasa karena dengan berkuasalah kesalahan masa lalu mereka bisa mereka protek. Jadi salah kita sendiri. Harusnya dulu kan Golkar itu partai terlarang. Sepuluh tahun engga boleh ikut pemilu atau dua kali pemilu. Harusnya kan gitu tuntutan reformasi saat itu. Ada *punishment* yang jelas. Tentu harus melawati proses hukum di pengadilan, yang menunjukkan betapa rezim Golkar di masa Orde Baru itu korup.

Untuk itu, ke depan kita harus menarik garis pemisah yang jelas, antara kekuatan-kekuatan *status quo* dengan kekuatan-kekuatan baru. Syaratnya, kekuatan-kekuatan yang baru itu harus bersatu. PDIP tadinya kita harapkan bisa menjadi ujung tombak oposisi. Tapi akhirnya kerjasamanya juga sama Golkar.

Lalu, apa kira-kira solusi dari Anda dalam mengatasi krisis kepemimpinan yang berlangsung di Indonesia saat ini?

Intinya, perlu ada mekanisme yang bisa membuat sirkulasi kepemimpinan nasional itu lebih lancar. Kan keterlaluhan, kalau bangsa ini cuma mengandalkan pada Gus Dur, Amien Rais, Megawati,

Wiranto, Akbar Tandjung. Jadi menurut saya perlu ada mekanisme demokratisasi di dalam partai politik. Jadi seperti terdapat dalam ketentuan KPU, walaupun katakanlah tidak ada calon independen, partai harus membuka diri seluas-luasnya terhadap warga negara yang hendak mencalonkan diri dalam pilkada. Dan itu harus disertai dengan berita acara, prosesnya itu dilaksanakan apa tidak. Nah disitu kadang-kadang hukum tidak ditegakkan.

Secara empiris, di dunia ini terbukti, bahwa negara-negara yang institusi politik dan ekonominya baik di masa lalu adalah negara-negara yang sejahtera sekarang. Bangsa kita engga bisa membangun institusi politik dan ekonomi dengan cara eksperimen terus, tapi institusi politiknya jelas, institusi ekonominya jelas. Karena itulah yang akan menjamin adanya kesinambungan pembaruan yang lebih pasti, bukan selera rezim. Nah, institusi politik yang bagus, punya beberapa karakteristik, seperti memberikan kebebasan pada warga negaranya untuk turut serta dalam proses politik dan proses ekonomi yang seluas-luasnya, dan juga memberikan kekuasaan kepada seluruh individu untuk memiliki faktor/alat produksi, supaya dia tidak sekedar mengandalkan pada tenaga saja. Jadi intinya, kesejahteraan rakyat yang dilandasi oleh kebebasan individu.

Selanjutnya, institusi yang baik juga harus bisa menciptakan kendala, sehingga para elite, politisi, dan kelompok-kelompok kekuatan tidak menjarah atau merampok aset-aset, kekayaan, atau investasi rakyat. Misalnya, kalau monorel jadi, itu kan sebetulnya Bukaka dan kawan-kawannya merampok aset atau kekayaan rakyat, karena nanti rakyat yang akan membayar proyek itu. Kenapa? karena institusi yang mengaturnya buruk. Jalan tol yang naik adalah ruas-ruas yang dikuasai oleh penguasa. Contoh lain, Bakrie misalnya, tidak punya infrastruktur, tapi bisa dapat

fasilitas SLI, itu kan fakta-fakta dari institusi politik dan ekonominya buruk.

Nah, untuk membangun institusi yang baik, hulunya adalah konstitusi. Jadi harus ada pembaruan konstitusi. Konstitusi kita sifatnya sementara. Bung Karno sendiri mengatakan UUD 45 itu sifatnya sementara, prasyarat untuk kita bisa merdeka aja. Nanti kalau sudah pemilu, kita akan menghasilkan MPR/DPR yang akan membuat konstitusi baru. Dan konstitusi kita jelas-jelas menciptakan ambigu-ambigu, misalnya sistem pemerintah kita apakah parlementer atau presidensial, bikameral atau unikameral, peran negara dengan peran pasar engga jelas. Ini semua yang bikin kacau.

Intinya, konstitusi kita telah menggariskan tujuan kita bernegara kita apa, tapi untuk mencapai itu tidak ditunjukkan secara eksplisit dalam konstitusi kita kendaraan apa yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu, ya engga sampai-sampai. Nah, kalau konstitusinya sudah beres, baru aturan perundangan yang lainnya bisa beres. Kalau kita saksikan sekarang makin banyak proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu sendirinya indikasi apa sih, kan anomali. Jadi yang salah undang-undangnya apa konstitusinya. Kemungkinan besar konstitusinya yang rancu. Maka, kalau pun kita akan kembali melakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945, maka amandemenya harus bersifat komprehensif, bukan yang diusulkan untuk melakukan amandemen karena ada kepentingan elite yang terganggu disana.

Ok, untuk lebih demokratis, dibuatlah aturan tentang DPD misalnya, tapi DPD-nya dikebiri, kan lucu. Peran negara juga sampai detik ini engga jelas. Masa peran negara sampai saat ini masih jadi “tukang kebun” dengan PTP-nya, masa negara bersaing dengan warga negaranya, kan engga mungkin.

Konstitusi itu sebenarnya ngurusin apa sih? Kan untuk melindungi bangsa dan tumpah darah, bagaimana menjamin

hak-hak individu warga negara, bagaimana memobilisasi seluruh *resources* yang ada pada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemudian apa peran negara, peran pasar, dan apa peran pasar. Menurut saya tujuan atau esensi bernegara kita juga harus direvisi. Bukan jargon adil makmur-*gemah ripah loh jinawi*. Tapi tujuan bernegara adalah untuk mencapai kebahagiaan (*happiness*) bagi seluruh rakyat. Lalu, kendaraan untuk mencapai tujuan. Masalahnya, sampai sekarang kita belum mendefinisikan kendaraan, yakni ideologi sebagai falsafah dasar kehidupan kita untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yang mencapai kebahagiaan bagi semua.

Kita tidak mendesain warga bangsa untuk mencapai hakikat dari kehidupan ini, yakni kebahagiaan. Padahal itulah hakekat hidup menurut Aristoteles, menurut Gandhi, menurut Bentham.

Tidak ada negara yang maju di dunia ini, yang tidak gencar melakukan investasi pendidikan dan penelitian. Di negeri ini misalnya, biaya penelitian cuma dianggarkan 300 juta dollar dengan penduduk 222 juta. Sementara Malaysia, menganggarkan penelitian sebesar 1,1 miliar dollar dengan penduduk 17 juta, Singapura dengan jumlah penduduk 3,5 juta menganggarkan penelitian sebesar 2,2 miliar dollar, Cina dengan jumlah penduduk 2 milyar orang menganggarkan untuk biaya penelitian 72 miliar dollar per tahun.

Di Indonesia, lebih sudah Cuma 300 juta dollar, 84,5 persennya dilakukan oleh negara (umumnya proyek penelitian dikerjakan oleh departemen pemerintah), sementara oleh swasta cuma 14,3 persen. Sementara di Cina, 62 persen dilakukan oleh swasta dan negaranya cuma 38 persen. Akhirnya apa, kita jadi negara pembajak, kerena kita lemah dalam penelitian-penelitian yang produktif dan inovatif di bidang sains dan teknologi. Itulah yang mendukung daya saing bangsa, karena selalu ada pembaruan

Secara empiris, di dunia ini terbukti, bahwa negara-negara yang institusi politik dan ekonominya baik di masa lalu adalah negara-negara yang sejahtera sekarang. Bangsa kita engga bisa membangun institusi politik dan ekonomi dengan cara eksperimen terus, tapi institusi politiknya jelas, institusi ekonominya jelas. Karena itulah yang akan menjamin adanya kesinambungan pembaruan yang lebih pasti, bukan selera rezim.

produk, manajemen makin baik, pemerintahnya jadi makin efisien.

Nah, semua itu harus dilandasi oleh cara berpikir yang benar, yaitu ideologi. Ideologi kita apa? Kalau kita telusuri dari *goals* konstitusi kita, sebenarnya ideologi bangsa ini adalah demokrasi sosial dan sistem pasar sosial. Tapi kenyataannya, perilaku kita liberal pada level yang primitif, kapitalisme jaman kuda gigit besi.

Jadi kita harus memulai dari ideologi. Ideologi itulah kendaraan yang masih *missing* di negeri ini. Nah masalahnya, ada salah satu Menko kita pada saat bertemu Joseph Stiglitz dengan lugas menyatakan "*i don't care ideology*"! Saya engga peduli ideologi apa, kata sang Menko, yang penting saya bisa mencapai tujuan. *Statement* ini jelas aneh, tidak mungkin sebuah kebijakan dibuat tanpa landasan ideologi yang jelas. Karena jika Anda menggunakan ideologi kapitalisme primitif dalam kebijakan ekonomi, niscaya akan menghasilkan ketimpangan dalam kehidupan ekonomi negara, itu pasti.

Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa tujuan kita bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks kesejahteraan sosial, Bung Karno menegaskan: (1) tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka, (2) tidak didominasi kaum kapitalis, dan (3) kesejahteraan yang merata keseluruhan rakyatnya, bukan kesejahteraan orang seorang.

Jelas kiranya, landasan ideologi kita bukanlah libertarian, melainkan demokrasi sosial. Dalam kehidupan berekonomi, konstitusi kita sama sekali tak mengindikasikan spirit antipasar, tetapi juga secara tegas tidak menyerahkan seluruh urusan ekonomi pada mekanisme pasar. Jadi tidaklah benar kesan bahwa seiring dengan tuntutan agar pasar lebih banyak

berperan dalam memajukan perekonomian, peran negara harus dikurangi. Justru sebaliknya, semakin besar peran diberikan ke pasar, peran negara harus lebih diperkuat untuk menjamin kesejahteraan yang berkeadilan.

Jadi persoalan yang harus kita rumuskan bukan terletak pada pendikotomian peran pasar versus peran negara, melainkan bagaimana melakukan reorientasi peran negara secara dinamis sejalan dengan tuntutan perubahan yang terus berlangsung di lingkungan internal dan eksternal. Bagaimana peran negara bisa optimal mendayagunakan segala potensi yang dimiliki bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Sejauh ini, kita belum melihat peta jalan yang disiapkan oleh para pemimpin kita untuk mengoptimalkan negara sebagai sarana yang sungguh-sungguh bisa berpihak para rakyatnya, dan mampu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Azman.Launa

Prof Dr. Musa Asy'arie:

Kepemimpinan dan Pemiskinan Bangsa



Dalam harian *Kompas* tanggal 1 September 2007, Prof. Dr. Musa Asy' Arie menulis artikel yang cukup menarik dengan judul "NKRI di Tengah Pemiskinan Bangsa". Dalam artikel tersebut, Prof Dr. Musa Asy' Arie menuliskan terjadinya proses pemiskinan bangsa, yang sebenarnya sangat bertentangan dengan kekayaan alam negeri. Dalam hal ini, kekayaan alam ternyata tidak mempunyai korelasi positif dengan kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, senantiasa didera oleh pemiskinan yang terus berlangsung sebagai akibat penjarahan yang dilakukan oleh kekuasaan konspiratif antara penguasa, pengusaha, dan militer. Akibatnya, kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Menurut Prof. Musa Asy'Arie, fenomena kaya miskin sebenarnya merupakan fenomena permanen yang tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan. Namun, persoalannya apakah jumlahnya sangat besar dan kesenjangannya sangat tajam atautkah tidak? Dalam kasus Indonesia, ternyata tidak hanya jumlah orang-orang miskinnya yang masih banyak, tetapi kesenjangannya juga masih sangat tajam.

Ada tiga pemiskinan yang disinyalir oleh Prof. Dr. Musa Asy'Arie terjadi di Indonesia sekarang ini. *Pertama*, pemiskinan ekonomi. Pemiskinan ini dapat dilihat dari besarnya jumlah orang miskin di Indonesia dan semakin lebarnya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.

Kedua, pemiskinan budaya. Pemiskinan budaya ini dimulai dari semakin mahal biaya pendidikan sehingga hanya golongan yang kaya saja yang dapat menikmati pendidikan. Sementara itu, dalam kehidupan plural seperti Indonesia, pemiskinan budaya terjadi ketika kita tidak mampu lagi menghargai makna pluralitas karena fanatisme kesukuan, kedaerahan, dan bahkan keagamaan sehingga memunculkan kekerasan sebagai akibat fanatisme sempit. Pluralitas tidak memperkaya spiritualitas, tetapi sebaliknya mengalami pendangkalan sehingga memicu konflik dan kekerasan dimana-mana. *Ketiga*, pemiskinan politik. Menurut Prof. Musa Asy'Arie, pemiskinan politik telah berlangsung sejak euforia kebebasan politik pascareformasi yang menyulut berdirinya banyak partai politik, tetapi sayangnya tidak diikuti oleh kesadaran politik. Akibatnya, etika politik bangsa mengalami penggerusan yang hebat oleh kecenderungan *money politics*. Politik adalah kekuasaan dan hanya untuk kekuasaan.

Berkenaan dengan Pancasila, Prof. Dr. Musa Asy'Arie menyatakan bahwa Pancasila sudah diterima sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di dalamnya mengandung filosofi kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan konsensus politik kebangsaan yang disarikan dari berbagai pluralitas yang ada dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Namun dalam praktiknya, Pancasila cenderung diintepretasikan

sesuai dengan kehendak pemimpin yang tengah berkuasa.

Di era reformasi, pembusukan Pancasila mengakibatkan penggerusan ideologi. Oleh karenanya, menurut Prof. Dr. Musa Asy'Arie, orang mempertanyakan aspek otentik Pancasila. Adakah Pancasila sebagai ideologi NKRI menyatu dengan realitas yang secara kasat mata memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia dalam kehidupan yang kian adil dan makmur seperti tujuan NKRI?

Ideologi, sebagaimana ia ditegaskan, seharusnya mempunyai kekuatan pragmatik yang aplikatif dan secara nyata mampu mengubah kualitas hidup sebagian besar masyarakat untuk menjadi semakin adil, semakin makmur, dan semakin cerdas. Jika tidak, maka ideologi apapun bahkan suatu faham keagamaan sekalipun dengan sendirinya akan mengalami pembusukan. Oleh karena itu, Pancasila dan NKRI hanya dapat dipertahankan jika kebijakan pemerintah yang menciptakan pemiskinan ekonomi, budaya, dan politik yang semakin tajam segera diakhiri.

Berdasarkan pandangan-pandangan yang ditulis dalam artikel inilah, tim redaksi kemudian melakukan wawancara secara khusus dengan Prof. Dr. Musa Asy'Arie di sekolah Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Kalijaga, Yogyakarta. Berikut hasil wawancara tersebut.

Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa eksistensi NKRI akan sangat tergantung pada sejauh mana NKRI mampu meraih tujuan-tujuannya. Dalam kaitan ini, apakah sebenarnya yang menjadi tujuan NKRI tersebut?

Menurut saya, eksistensi NKRI ditentukan seberapa jauh keadilan dan kemakmuran diwujudkan di negeri ini. Jika tidak, maka potensi bubar sangat besar sekali. Sebetulnya, gejala daerah yang ingin memisahkan diri kuncinya terletak pada kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut saya, negeri ini

merupakan negeri yang sangat kaya. Hampir tidak ada daerah-daerah yang miskin sumber daya alam kecuali, barangkali, di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, sebenarnya kandungan alamnya tidak begitu miskin. Jadi, menurut saya, semua daerah di Indonesia mempunyai sumber kekayaan yang melimpah. Namun, jika dibandingkan dengan realitas yang ada maka menjadi sangat paradoks. Sebagai contoh, negeri kita ini sebetulnya merupakan negeri agraris yang subur. Potensi pertaniannya sangat luar biasa, dan kita mempunyai tenaga ahli

di bidang pertanian yang sangat banyak. Mereka sangat pandai, tetapi yang menjadi masalah mengapa beras harus impor? Tidak hanya beras, tetapi juga buah-buahan. Bukankah ini merupakan ironi yang luar biasa. Jadi, menurut saya, ini merupakan paradoks yang luar biasa. Sebuah negeri yang kaya, yang kata Koes Plus, tongkat saja bisa menjadi tanaman. Namun dalam kenyataannya, sungguh mengesankan. Nah, pasti ada yang salah. Salah satu faktor penyebabnya adalah manajemen politik. *Pertama*, menyangkut *leadership*. Ini merupakan persoalan yang

paling utama, yakni bagaimana manajemen politik tidak mampu mendayagunakan kekayaan untuk kesejahteraan bangsa. Sebagai contoh, kekayaan Papua dengan *Freeport*-nya. Pertanyaannya adalah berapa triliun negara mendapatkan itu? Seandainya, kekayaan tersebut dikembalikan ke Papua maka tentunya mereka akan kaya raya. Dalam hal ini, nampak jelas betapa tidak ada hubungannya antara kekayaan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, NKRI tanpa keadilan dan kemakmuran hanya akan menunggu waktu untuk bubar, dan ini disebabkan oleh *leadership*.

Leadership yang bagaimana yang seharusnya ada, dan apakah ini berkenaan dengan visi seorang pemimpin?

Menurut saya, *leadership* yang benar-benar memahami filosofi NKRI bukan *leadership* yang pragmatik yang hanya mementingkan kelompok tertentu. Mereka yang mempunyai ikatan yang kuat supaya kekayaan alam yang ada benar-benar mampu menyejahterakan rakyatnya sehingga seharusnya semua sistem yang tidak menuju ke arah sana ditolak. Keberanian untuk inilah yang sebenarnya diperlukan karena ada yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya tahan miskin sehingga mengapa kita tidak mampu menolak? Menurut saya, dengan komitmen ideologis yang tinggi, semua kekayaan alam yang kita miliki dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya, fenomena yang muncul justru sebaliknya. Pabrik-pabrik atau industri-industri diberi kekuasaan untuk mengambil sumber daya alam. Padahal, mereka merusak alam, dan masyarakat sekitar menjadi konsumtif. Oleh karena itu, hanya *leadership* yang kuat, dan memahami dengan baik hakikat NKRI yang akan mampu mendayagunakan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat. Jika kemiskinan dan ketimpangan terus

berlanjut, maka NKRI akan habis. Bisa dibayangkan bagaimana pemiskinan budaya membuat sebuah bangsa yang ramah tiba-tiba menjadi masyarakat yang berdarah-darah, dan ini dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan sempit, kepentingan suku, dan agama yang dipolitisasi. Ini merupakan pemiskinan budaya karena bineka tunggal ika tercerai-berai.

Sebenarnya, bagaimana elit politik memaknai tujuan-tujuan NKRI tersebut sehingga mereka belum mampu membawa Indonesia ke arah kemakmuran?

Sebetulnya, yang menjadi persoalan adalah pembudayaannya. Ketika para pendiri negara merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, tentu mereka mengalami perdebatan intelektual yang luar biasa. Namun, setelah dirumuskan maka yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana rumusan tersebut diimplementasikan? Setelah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dirumuskan menjadi sebuah ideologi negara maka sebenarnya turunannya yang menjadi masalah. Padahal, ketika ideologi tersebut diturunkan ke dalam konsep-konsep politik, pada era Soekarno saja sudah ditarik kemana-mana dari demokrasi liberal-parlementer sampai dengan demokrasi terpimpin. Setelah Soekarno jatuh, masuk ke Soeharto dan ditarik lagi menjadi demokrasi Pancasila yang esensinya adalah otoritarianisme. Menurut saya, antara cita-cita ideal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketika diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan negara maka konsistensi ideologisnya terhadap kedaulatan rakyat semakin jauh. Ada orang yang pernah bercerita bahwa ketika awal-awal negara ini dibangun, seorang hakim masih teguh memegang prinsip-prinsip keadilan dan polisi masih mempunyai kewibawaan. Aparat penegak hukum benar-benar mempunyai penghayatan yang tinggi, tetapi jauh ke belakang penghayatan

semakin pudar dan akibatnya aparat penegak hukum tidak lagi mempunyai wibawa sehingga usaha-usaha yang ditujukan untuk menegakkan hukum menjadi sangat sulit. Pada masa Soeharto, hukum mengalami stagnasi karena hukum pada masa ini adalah kekuasaan. Bukan hukum yang menetapkan salah dan benar atas suatu persoalan, tetapi kekuasaan. Pada masa reformasi ketika kekuasaan tumbang, sebenarnya, kita tidak mempunyai hukum karena hukum tertinggal jauh di belakang. Untuk mengatasi masalah tersebut, dipaculah pembuatan undang-undang sebagai produk hukum. Dalam situasi semacam ini, banyak elit politik lantas menggunakan kesempatan tersebut sebagai ajang korupsi melalui biaya-biaya pembuatan undang-undang.

Tadi dikemukakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah justru mendorong terjadinya pemiskinan. Dalam konteks ini, bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah atau public policy ini dirumuskan dan diimplementasikan sehingga hasilnya bukannya kemakmuran rakyat, tetapi justru menciptakan pemiskinan?

Barangkali karena memang sejak awal negeri ini dibangun tidak dengan landasan yang profesional sehingga masuklah muatan-muatan lokal yang membuat birokrasi tidak mampu melayani rakyat. Sebaliknya, birokrasi berubah menjadi birokrasi kekuasaan yang pokoknya adalah kuasa. Ini karena, asumsinya, dengan kekuasaan semua akan datang. Uang akan datang dan kehormatan akan datang sehingga tidak mendapatkan gaji pun tidak menjadi masalah. Dalam konsep kita, kekuasaan menjadi segala-galanya, dan ini sebenarnya konsep kerajaan. Ketika kita merdeka maka feodalisme yang merupakan peninggalan masa kerajaan tersebut masih tetap ada. Feodalisme berpindah dari keraton ke pemerintah.

Hal ini terjadi karena mereka masih meyakini bahwa kekuasaan merupakan “pulung” yang diberikan kepada seseorang. Dalam pemahaman saya, kekuasaan harus diatur dengan menggunakan aturan yang jelas. Dengan desakralisasi kekuasaan, tidak akan muncul terlalu banyak ritus. Ini perlu dilakukan karena negeri kita ini seperti “negeri upacara”. Akibatnya, terjadi pemborosan yang luar biasa hanya karena demi melakukan upacara.

Bahkan, masuk ke dalam perguruan tinggi. Oleh karena itu, harus ada kesediaan untuk melakukan evaluasi guna melakukan perombakan. Dalam hal ini, dilakukan desakralisasi terhadap kekuasaan karena jika kekuasaan masih dianggap sebagai sesuatu yang sakral maka akan membuat penguasa seakan-akan tidak bisa salah. Hal ini terjadi karena mereka masih meyakini bahwa kekuasaan merupakan “pulung” yang diberikan kepada seseorang. Dalam pemahaman saya, kekuasaan harus diatur dengan menggunakan aturan yang jelas. Dengan desakralisasi kekuasaan, tidak akan muncul terlalu banyak ritus. Ini perlu dilakukan karena negeri kita ini seperti “negeri upacara”. Akibatnya, terjadi pemborosan yang luar biasa hanya karena demi melakukan upacara. Jadi, kekuasaan harus diatur secara rasional. Nah, sekarang kita sedang memulai. Selama kurang lebih 52 tahun kita hanya mempunyai dua orang presiden. Namun sekarang, kita sudah dapat berganti-ganti presiden. Tentu saja, ini merupakan sesuatu yang baik. Persoalannya sekarang adalah bagaimana jebakan-jebakan seremonial kekuasaan dilawan dengan cara menegakkan hukum sehingga Indonesia akan menjadi sebuah negara hukum dalam pengertian sesungguhnya. Dalam arti, kekuasaan tertinggi adalah hukum, dan bukannya kekuasaan sebagai hukum. Selanjutnya, setelah desakralisasi kekuasaan dilakukan dan hukum ditata secara lebih baik maka langkah berikutnya adalah mengembangkan Unit Usaha Kecil (UKM) sebagai basis ekonomi. Ini perlu dilakukan karena sekarang ini basis-basis UKM sudah banyak yang mati. Padahal, jika kita berbicara tentang ekonomi Indonesia, maka UKM. UKM inilah yang menjadi basis ekonomi Indonesia karena sesuai dengan realitas Indonesia. Berikutnya adalah pendidikan harus murah, tetapi berkualitas. Oleh karena itu, negara harus mengambil peran dalam menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas

tersebut. Mahalnya pendidikan membuat hanya orang-orang kaya yang mempunyai banyak uang saja yang mampu mengenyam pendidikan. Padahal, orang-orang yang berpendidikan inilah yang suatu saat dapat menciptakan uang. Sebaliknya, jika pendidikan gagal, maka hanya akan menciptakan kaum buruh yang diekspor ke luar negeri untuk kemudian diberi gelar pahlawan devisa. Ini terjadi karena sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, dan salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesempatan dalam pendidikan. Dulu, ada perdebatan yang cukup menarik antara Widjojo Nitisastro dengan Soejatmoko. Di situ, terjadi perdebatan intelektual mengenai titik tolak pembangunan. Dari manakah seharusnya pembangunan dimulai, apakah pembangunan dari budaya melalui basis pendidikan ataukah pembangunan ekonomi terlebih dulu? Namun, masalahnya adalah jika harus melakukan pembangunan budaya melalui pendidikan maka dari mana sumber dananya? Maka, pembangunan ekonomilah yang akhirnya lebih didahulukan. Kuenya diperbesar, dan setelah itu dibagi menurut teori *trickle down effect*. Sayangnya, *trickle down effect*-nya tidak terjadi. Ketika kuenya sudah besar maka hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sementara itu, negeri-negeri yang lebih mengutamakan pembangunan manusianya seperti Malaysia, misalnya, yang dulunya belajar ke kita, tetapi sekarang mereka lebih maju. Oleh karena itu, orang Malaysia mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri karena mempunyai pendidikan dan sumber daya manusia yang bagus. Tentu saja, ini berlawanan dengan Indonesia. Di negeri ini, pendidikan mahal sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmatinya. Akibatnya, muncul banyak kelas pekerja. Selanjutnya, ketika lapangan pekerjaan dalam negeri tidak mencukupi, maka kelas pekerja ini dikirim ke luar negeri. Akhirnya, kita menjadi penonton di

negeri sendiri. Ini sebenarnya merupakan sesuatu yang menyedihkan, dan bagaimana mungkin NKRI hendak dipertahankan dengan kemiskinan semacam itu?

Jika ditinjau dari aspek budaya, maka ada yang mengatakan bahwa budaya birokrasi kita ini memang berorientasi kekuasaan sebagaimana telah disinggung di awal, dan ini sengaja direproduksi oleh elit-elit politik karena menguntungkan mereka. Selain itu, ada juga yang mengatakan adanya budaya “nrabas”. Bagaimanakah sebenarnya implikasinya bagi politik Indonesia?

Pokok persoalannya adalah apakah kita sudah mampu melakukan reformasi budaya politik ataukah belum? Tampaknya, kita belum melakukan itu karena budaya politiknya masih tetap budaya politik yang mengagungkan kekuasaan. Budaya politik yang sebenarnya tidak rasional. Budaya politik dimana kekuasaan mendapatkan hak-hak yang istimewa. Budaya politik yang belum sepenuhnya berbasis kedaulatan rakyat, dan saya kira ini menjadi persoalan kita semua. Oleh karena itu, hingga detik ini, perubahan-perubahan politik hanya menyangkut perubahan orang saja. Kulturenya tidak pernah berubah. Jika hanya orangnya saja yang berubah, sedangkan budaya politiknya masih merupakan sisa-sisa feodalisme dan juga kekuasaan sebagai sesuatu yang sakral yang menempatkan pemimpin tidak bisa salah, maka akan menghancurkan NKRI. Ini karena NKRI sebenarnya merupakan suatu pluralitas. Namun dalam perkembangannya, kemajemukan menjadi ancaman. Bahkan, kemajemukan dihabisi oleh munculnya kekuatan-kekuatan yang ekstrim, dan, menurut saya, jika kekuatan yang berkuasa menindas pluralitas, maka bukan merupakan Indonesia lagi. Dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali kekuatan-kekuatan ekstrim yang

melihat Indonesia bukan merupakan suatu keragaman, Indonesia bukan lagi penghormatan terhadap perbedaan, pengayaan terhadap keberbagaian. Jika sudah demikian, maka rasanya Indonesia sudah hilang. Dalam hal ini, Anda tidak dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah Jawa sebagaimana Anda juga tidak dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah Islam. Masih banyak di luar Jawa, dan masih banyak di luar Islam yang memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Pluralitas ini harus di-*manage* oleh seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan *leadership* yang kuat. Seorang *leadership* yang mampu *manage* pluralitas sebagai pengayaan spiritual dan bukannya pendangkalan. Sekarang ini, yang terjadi sebaliknya. Kelompok yang kuat melakukan penindasan terhadap yang lemah. Bagaimana mungkin sesama agama saling menghabisi, Ahmadiyah dihabisi oleh sesama muslim. Bukankah ini merupakan pendangkalan? Masih banyak lagi konflik-konflik semacam ini. Bila dibiarkan, maka negeri ini akan hancur.

Ada pendapat salah seorang pengamat yang mengatakan bahwa pembicaraan Indonesia kontemporer tidak akan pernah bisa dilepaskan dari Orde Baru karena pengaruhnya yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut Pak Musa?

Menurut saya, apa yang terjadi pada masa Orde Baru harus dilihat sebagai proses berbangsa. Orde Baru barangkali memang melakukan hal-hal negatif, tetapi bukankah setiap rejim mempunyai sisi positif dan negatif? Pada waktu Orde Baru, kita merasa aman jika bepergian kemana-mana. Jadi, selalu ada plus dan minusnya. Menurut saya, tidaklah bijaksana jika senantiasa menghujat masa lalu. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana menatap masa depan. Kita sudah belajar dengan kegagalan

Soekarno, kita juga sudah belajar dengan kegagalan Soeharto, dan apakah kita akan gagal lagi? Jika demikian, maka kita menjadi bangsa yang tidak pernah dewasa. Kita harus mampu belajar dari masa lalu, dan budaya politik mestinya sudah diubah. Penataan hukum harus jelas, dan tidak perlu mundur. Dalam konteks inilah, diperlukan seorang *leader* yang mampu memberi arah ke depan. Sekarang ini, undang-undang antikorupsi sudah bagus hanya bagaimana ditata sedemikian rupa sehingga hukum benar-benar mempunyai kekuatan. Kemudian, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah bagus karena sudah mampu membatasi kekuasaan presiden hanya dua kali masa pemilihan. Ini harus diteruskan. Perubahan di tangan pemimpin yang lemah maka resikonya sangat besar. Saya pernah menulis di harian *Kompas*, bagaimana beratnya belajar demokrasi di tengah kemiskinan bangsa. Bagaimana mungkin orang disuruh berdebat guna mencari solusi-solusi terbaik dalam situasi ketika perut masih lapar, tidaklah mungkin. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan modal pendidikan dan modal kesejahteraan. Jika orang dengan tingkat pendidikan rendah disuruh berdebat, maka dapat dibayangkan hasil perdebatan itu. Hal yang sama juga terjadi ketika belajar demokrasi pada saat perut masyarakat masih keroncongan, maka pasti akan menimbulkan perkelahian. Inilah, menurut saya, bahaya belajar demokrasi di tengah kemiskinan rakyat. Meskipun demikian, jika proses belajar tersebut berada di tangan seorang pemimpin yang kuat secara intelektual dan moral maka rakyat dapat diajak bertahan. Sebaliknya, jika tidak, maka akan dicemooh orang.

Bagaimana dengan implementasi Pancasila sebagai landasan ideologis berbangsa yang mestinya menjadi dasar setiap pengambilan kebijakan?

Jika kita ingin membangun negeri ini, maka pertanyaannya adalah landasan ideologisnya apa? Mau kemanakah negeri ini hendak dibawa? Dalam hal ini, tidak ada jawaban lain kecuali Pancasila karena kita tidak mungkin kembali ke agama-agama tertentu. Persoalannya adalah bagaimana Pancasila tidak hanya berhenti sekedar sebagai *statement* ideologis, tetapi juga menjadi sesuatu yang bersifat operasional dan membuat hidup lebih baik. Ini karena ideologi apapun jika dalam kenyatannya tidak mampu membuat hidup lebih sejahtera, maka akan menjadi ideologi yang kosong. Jadi, ideologi jangan hanya berhenti dalam bahasa filosofis, tetapi bagaimana ideologi tersebut mengalir ke dalam kebijakan-kebijakan sehingga keluarannya menjadi lebih baik. Jika ideologi tidak mampu membuat hidup lebih baik, maka akan ditinggalkan. Dengan demikian, masalahnya bukan pada Pancasila, tetapi bagaimana Pancasila ketika menjadi sebuah ideologi negara maka diimplementasikan oleh para penyelenggara negara menjadi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup

rakyatnya, bukan kebijakan yang diperdagangkan melalui penerimaan modal-modal asing dan kekuatan-kekuatan lain. Jangan sampai dibiarkan menggunakan sistem yang lain. Inilah kekeliruan Indonesia, dan ini terjadi karena kesalahan dalam memilih pemimpin. Namun, untuk sekarang ini, *ora kesuwen-lah* (tidak terlalu lama, red.) karena jika salah dalam memilih pemimpin dapat diganti dalam waktu lima tahun. Coba dibayangkan seandainya kita mempunyai pergantian pemimpin lima kali saja, maka dari kelima ini kita dapat belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang ada. Dari situ pula, dapat dilihat pemimpin yang mampu mengimplementasikan Pancasila secara benar dan mana yang tidak. Oleh karena itu, saya berharap agar generasi tua tidak mencalonkan diri lagi menjadi pemimpin karena jika tidak maka kita tidak pernah menjadi bangsa yang mampu mendewasakan diri, dan perlu diingat bahwa daya tahan sebuah bangsa yang paling kuat sebenarnya terletak pada kesejahteraan dan intelektualitas.

Prof. Dr. Musa Asy'Arie dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 31 Desember 1951. Pada tahun 1964-1970, menjadi santri di Pondok Tremas Pacitan. Kemudian, melanjutkan pendidikan di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta hingga meraih gelar doktor pada tahun 1991. Mendapatkan gelar guru besar dalam bidang filsafat Islam dari IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2000. Saat ini, selain menjadi dosen di pascasarjana UIN Sunan Kalijaga juga menjadi staff ahli di kementerian komunikasi dan informasi untuk bidang sosial-budaya dan juga sebagai dewan pengawas TVRI.

R. Ramli² dan P. Nuryadin³

Kegagalan Solusi Moneter dan Neoliberal di Indonesia: Kerawanan Lama dalam Bungkus Baru

Pendahuluan

Pertengahan Agustus 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat hebat. Krisis mata uang yang awalnya menyerang Thailand tersebut ternyata dengan cepat menular ke negara-negara lain seperti Malaysia, Korea, dan Indonesia. Sebagai akibat krisis berantai mata uang tersebut, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang jauh lebih parah dibandingkan dengan ketiga negara lain yang mengalami krisis yang sama. Indonesia harus mengalami rentetan krisis mulai dari krisis mata uang, likuiditas, dan perbankan yang selanjutnya diikuti dengan kebangkrutan dunia usaha secara umum. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang hebat, yakni sebesar kurang lebih 12.8%, dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia disamping negara-negara bekas Eropa Timur.

Menanggapi krisis tersebut, banyak kalangan birokrasi mengatakan bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia diakibatkan oleh semata-mata faktor eksternal. Namun sebenarnya, pernyataan ini lebih merupakan sikap yang kurang

bertanggung jawab dan sebagai usaha mencari kambing hitam. Kenyataannya, krisis memang dipicu oleh krisis di Thailand, tetapi menularnya krisis tersebut lebih disebabkan oleh kelemahan struktur ekonomi Indonesia. Selanjutnya, kegagalan mengantisipasi serta akumulasi rentetan *mis-judgement* dan *policy errors* pengambilan kebijakan saat itu membuat krisis berkembang lebih dasyat.

Biaya yang ditimbulkan akibat *policy errors* tersebut sangatlah besar. Selain meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, juga menyulut terjadinya kerusuhan dan penjarahan massal pada Mei 1998, munculnya biaya rekapitulasi bank yang mencapai 650 triliun (termasuk BLBI) dan bertambahnya utang puluhan miliar dollar yang masih membenani Indonesia hingga saat ini. Tentu saja, ini merupakan harga mahal yang harus dibayar atas kegagalan-kegagalan tersebut, yang sebenarnya telah dimulai jauh sebelum krisis. Setelah lebih dari satu dekade, ekonomi Indonesia ternyata belum menampakkan kinerja yang bagus. Dibandingkan dengan negara-negara lain

yang mengalami krisis serupa, Indonesia jauh tertinggal di belakang.

Tulisan ini akan berusaha memaparkan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya, dan mengapa *recovery* ekonomi Indonesia jauh lebih lama dibandingkan dengan negara lain? Dalam konteks ini, akan dipaparkan peranan IMF dalam menjerumuskan ekonomi Indonesia menjadi lebih parah. Selanjutnya, tulisan akan ditutup dengan menarik benang merah menyangkut pelajaran apa yang dapat diambil dari krisis tersebut.

Ekonomi Pra-krisis: Tumbuh Moderat dengan Sejumlah Kerawanan

Telah dikatakan sebelumnya, meskipun krisis distimuli oleh faktor eksternal, tetapi pada perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi Indonesia yang rapuh. Kenyataan ini dapat dilihat dari fakta bahwa negara-negara yang struktur ekonominya kuat tidak mengalami penularan atas krisis mata uang yang terjadi di Thailand. Sebelum krisis, ekonomi Indonesia mempunyai

kerawanan yang sangat beresiko menggoyahkan struktur ekonomi meskipun mengalami pertumbuhan moderat.⁴ Berbagai kerawanan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *Cross Ownership* dan *Cross Management* di Sektor Finansial.

Salah satu kebijakan penting yang mempunyai dampak luas terutama di sektor finansial adalah Paket Deregulasi Finansial Oktober 1988 atau lebih dikenal dengan Pakto 88. Salah satu ketentuan penting dalam pakto tersebut adalah kemudahan perijinan perbankan yang hanya mensyaratkan modal minimal sebesar 10 miliar. Kebijakan ini telah mendorong peningkatan jumlah bank di Indonesia dari semula hanya sekitar 111 bank pada tahun 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1995. Ini berarti telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Sisi positif peningkatan jumlah bank ini adalah turut meningkatnya kredit perbankan ke sektor riil, dan ini telah memacu pertumbuhan ekonomi moderat pada tahun 1990-an. Namun, pertumbuhan ini juga mempunyai dampak negatif, yakni memicu jumlah bank-bank yang sangat agresif serta kepemilikan silang (*cross ownership*) dan manajemen silang (*cross management*) dalam industri keuangan di Indonesia. Pada akhirnya, ini akan mendorong terjadinya konsentrasi kepemilikan di sektor perbankan. Kepemilikan dan manajemen silang ini telah mendorong peningkatan resiko sistemik dan instabilitas ekonomi nasional. Studi ECONIT dan Institut Bankir Indonesia pada tahun 1997 menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan telah mendorong terjadinya pelanggaran dalam pemberian batas maksimum kredit kepada kelompoknya sendiri sehingga resiko sistemik terhadap perbankan sangat tinggi⁵.

2. Rupiah yang *overvalued*.

Sejak tahun 1980-an, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan yang terus meningkat. Pada tahun 1994,

misalnya, defisit transaksi berjalan sebesar US\$ 3,1 miliar. Pada tahun 1995, meningkat dua kali lipat menjadi US\$ 7,2 miliar. Kondisi ini merupakan awan mendung bagi ekonomi Indonesia karena rentan terhadap serangan spekulatif (*speculative attack*) baik oleh spekulan domestik maupun internasional⁶. Kebijakan otoritas moneter yang berusaha mempertahankan nilai tukar rupiah tetap (*fixed exchange rate system*) pada kisaran 2.200-2.300 memperparah kondisi ini. Padahal, dalam situasi transaksi berjalan mengalami defisit semacam itu, mestinya diimbangi dengan nilai mata uang yang fleksibel. Akibatnya, rupiah mengalami *overvalued* minimal sebesar 16%.⁷

3. *Over-leverage* Utang Luar Negeri Swasta

Salah satu komponen utama yang memberikan tekanan terhadap defisit neraca pembayaran adalah besarnya beban cicilan utang luar negeri, termasuk utang luar negeri swasta. Secara konservatif, utang luar negeri swasta diperkirakan sebesar US\$ 60 miliar pada tahun 1997 atau sekitar 50% dari utang luar negeri Indonesia. Jika diperhitungkan utang berjangka pendek, termasuk *promissory notes*, *commercial papers*, dan *other short-term debt instrument* dalam nominasi dolar dan rupiah yang dimiliki oleh pihak asing, maka diperkirakan utang luar negeri swasta sebesar US\$ 75 miliar. Dengan demikian, total utang luar negeri Indonesia mencapai US\$ 135 miliar pada tahun 1997. Jumlah utang sebesar ini telah melampaui sebesar 40% batas-batas aman. Terlebih, sebagian besar utang swasta tersebut digunakan untuk konsumsi dan investasi pada *non-traded sectors* seperti untuk spekulasi di sektor properti dan konsumsi.

Respon Kebijakan semakin Memperparah Keadaan

Dari paparan di atas, tampak bahwa krisis yang melanda Indonesia pada

pertengahan 1997 tidak semata-mata diakibatkan oleh faktor eksternal sebagaimana disangkakan oleh sebagian birokrat, tetapi juga disebabkan oleh struktur ekonomi yang rapuh dan mengandung bahaya. Krisis mata uang pun akhirnya tidak dapat dihindari, dan sayangnya kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi krisis justru membuat situasinya menjadi lebih parah.

Hingga bulan Agustus 1997, rupiah telah mengalami depresiasi sekitar 18%. Respon yang diberikan otoritas moneter untuk mengatasi krisis mata uang tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan uang super ketat. Dalam *Economic Outlook* 1998, yang diterbitkan pada 5 November 1997, Econit menyebutnya sebagai "Gebukan Kusut 97" yang akan menimbulkan krisis baru yang lebih laten dan berbahaya, yaitu krisis likuiditas. Krisis ini akan mempunyai dampak yang lebih luas dibandingkan dengan krisis mata uang yang melanda Indonesia saat itu..

Gebukan Kusut 1997 lebih dasyat dibandingkan dengan Gebrakan Sumarlin tahun 1991. Ini karena Gebrakan Sumarlin hanya mengatur kuantitas pasok uang (*fixing the quantity of money*) dan membiarkan tingkat bunga menentukan harganya sendiri. Sebaliknya, Gebukan Kusut 1997 mengatur tiga hal, yakni kuantitas pasok uang, harga uang, dan alokasi siapa yang mendapatkannya (*fixing the quantity, prices, and distribution of money*). Dampak blunder kebijakan *triple-fixes* ini sungguh berbahaya. Pada tanggal 6 Oktober 1997, misalnya, rupiah anjlok ke titik terendah (Rp. 4000 per US\$) yang mencerminkan persepsi negatif pasar terhadap langkah-langkah otoritas moneter.

Bank Dunia dan pemerintah sendiri menyebut krisis tersebut sebagai krisis kepercayaan. Padahal, krisis kepercayaan jauh lebih sukar diatasi dibandingkan dengan krisis finansial atau *cash-flow*. Krisis finansial dapat cepat diatasi dengan meminjam uang, tetapi krisis

kepercayaan belum tentu dapat diatasi dengan meminjam uang. Sebaliknya, hanya dapat diatasi dengan *credible policy-makers* dan *credible policies*. Oleh karenanya, menyebut krisis tersebut sebagai krisis kepercayaan merupakan usaha untuk menghancurkan diri sendiri (*self-destructive*).

Masuknya IMF: Awal Malapetaka Baru

Didorong oleh perasaan tidak mampu dan tidak percaya diri menyelesaikan krisis yang tengah berlangsung, sejumlah pejabat pemerintah akhirnya memunculkan wacana untuk meminta pertolongan International Monetary Fund (IMF). Bahkan, pada saat itu, banyak media massa dalam dan luar negeri memuat saran-saran agar Indonesia meminta pinjaman pada IMF. Menurut mereka, pinjaman IMF diperlukan guna memulihkan Indonesia dari krisis moneter.

Menurut Econit, ada dua kemungkinan mengapa Indonesia disarankan untuk meminta pinjaman kepada IMF meskipun kondisi Indonesia belum mengalami gawat darurat. *Pertama*, pihak-pihak yang mengajukan saran-saran tersebut (Widjojo, dkk) dengan sengaja menjerumuskan Indonesia ke dalam tahapan yang jauh lebih berbahaya, kemerosotan ekonomi lebih dalam, dan mempunyai implikasi sosial-politik yang luas. Sejalan dengan pikiran ini, usulan untuk membiarkan terjadinya *cross-default* menunjukkan sikap yang picik dan tidak negarawan sebab jika terjadi *cross-default*, maka ekonomi Indonesia akan dijerumuskan untuk meminta pinjaman IMF mengingat *cross-default* akan mengakibatkan *capital-outflow* dadakan dalam jumlah besar, dan untuk menariknya kembali diperlukan pinjaman dari IMF. *Kedua*, pihak-pihak yang menyarankan peminjaman kepada IMF tersebut tidak memahami konsekuensi dan pengalaman-pengalaman historis negara-negara yang pernah menjadi "pasien" IMF. Mereka tampaknya tidak

menyadari bahwa pinjaman IMF mempunyai dampak negatif yang sangat luas dalam bentuk penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis, penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi, serta peningkatan kemiskinan. Dalam hal ini, IMF bukanlah "Dewa Penyelamat", tetapi "Dewa Amputasi" yang akan melakukan amputasi di ruang gawat darurat, dan kemudian memaksa si pasien melakukan diet ketat dengan konsekuensi jangka panjang. Padahal seharusnya, pasien tersebut tidak perlu diamputasi.⁸

Turbulensi ekonomi Indonesia yang terjadi saat itu membuat kreditor-kreditor internasional mengalami kerugian sebagai akibat nilai rupiah yang anjlok dan ketidakmampuan pengutang untuk membayar cicilan. Dalam hal ini, penggunaan pinjaman dari IMF untuk menyelesaikan masalah ketidakmampuan pengutang hanya menguntungkan pihak kreditor lembaga-lembaga keuangan internasional. Sementara dalam jangka panjang, rakyat Indonesialah yang akan membayar dalam bentuk kontraksi *agregat demand* dalam negeri yang berlebihan. Ini karena hanya dengan kontraksi *agregat demand*-lah kita bisa memperoleh surplus finansial sehingga dalam jangka panjang akan mampu membayar kembali kewajiban kepada IMF. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah saran-saran untuk menerima IMF sebenarnya berpihak kepada kreditor ataukah kepentingan masyarakat? Kontraksi moneter jelas akan membantu menyelamatkan sejumlah kreditor dari kerugian, tetapi kontraksi tersebut akan mempunyai dampak luas terhadap penurunan daya beli masyarakat, pergeseran pola kepemilikan aset diantara berbagai kelompok masyarakat, dan akan mempercepat laju "penggusuran ekonomis" golongan pengusaha menengah dan lemah. Kontraksi moneter yang berlanjut akan mengakibatkan banyak perusahaan skala menengah ke bawah mengalami kesulitan

Keterlibatan IMF membuat krisis ekonomi Indonesia semakin parah dan mendalam. Ini disebabkan oleh salah diagnosis dan obat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 minus 12.8 persen. Jika IMF tidak terlibat, maka krisis akan tetap terjadi. Namun, skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara minus 2 hingga 0) pada tahun 1998.

likuiditas dan memperbesar tingkat kebangkrutan mereka.

Keterlibatan IMF membuat krisis ekonomi Indonesia semakin parah dan mendalam. Ini disebabkan oleh salah diagnosis dan obat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 minus 12.8 persen. Jika IMF tidak terlibat, maka krisis akan tetap terjadi. Namun, skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara minus 2 hingga 0) pada tahun 1998.

Akibat saran-saran IMF, pemerintah telah melakukan likuidasi terhadap 16 bank nasional pada November 1997, yang memicu *rush* terhadap puluhan bank besar Indonesia seperti BCA dan Danamon, membuat kolaps sistem perbankan nasional, dan kian menenggelamkan nilai tukar rupiah. Selain itu, saran-saran IMF juga memprovokasi kerusuhan Mei 1998 (*IMF-provoke riots*). Dalam banyak kasus di Amerika Latin dan Afrika, saran-saran IMF telah memicu demonstrasi besar-besaran, kerusuhan massal yang memakan korban jiwa, dan kejatuhan pemerintahan. Disamping itu, dalam kasus Indonesia, keterlibatan IMF meningkatkan angka pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitulasi bank lebih dari Rp. 600 triliun serta tambahan beban utang puluhan miliar dollar. IMF juga memicu kerusuhan sosial sebagai akibat pemangkasan subsidi BBM dan listrik. Pemerintah menaikkan harga BBM antara 75% (minyak tanah) sampai dengan 71% (premium) pada tanggal 4 Mei 1998. Selang beberapa hari kemudian muncul demonstrasi mahasiswa di kota-kota besar seperti Makasar yang kemudian meluas ke Medan, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta, dan puncaknya di Jakarta 12 Mei 1998. Kerusuhan yang diakibatkan oleh saran-saran IMF telah menelan korban jiwa, ratusan gedung rusak, dan ribuan kendaraan hancur. Dengan demikian, Indonesia menambah daftar jumlah

negara yang mengalami kerusuhan sosial sebagai akibat saran-saran IMF.

Proses *Recovery* sangat Lamban

Telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang mengalami kontraksi ekonomi paling buruk pada saat krisis dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Namun, ternyata tidak hanya itu. Dalam perjalanannya, Indonesia ternyata juga merupakan negara paling lambat dalam proses *recovery* ekonomi pasca-krisis. Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan, kemajuan ekonomi Indonesia pascakrisis yang dicapai Indonesia relatif paling lambat. Setahun setelah krisis, Korea mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 9.5 persen, Thailand dan Malaysia masing-masing mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4.4 persen dan 6.6 persen pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dan hanya tumbuh di bawah 1 persen.

Pemulihan cepat ekonomi Korea tidak dapat dilepaskan dari langkah pemerintah Korea untuk melakukan *roll-over* utang luar negeri bank-bank Korea dengan meminta bantuan Robert E. Rubin (Menteri Keuangan AS) dan Alan Greenspan (Gubernur Bank Sentral AS). Upaya tersebut terbukti menurunkan tekanan utang luar negeri Korea dan mengembalikan kepercayaan publik dan investor terhadap kredibilitas pengambilan kebijakan. Dalam kasus Malaysia dan Thailand, segera setelah krisis ekonomi, melakukan ekspansi moneter dan fiskal ala Keynesian seperti pembangunan infrastruktur guna memompakan peningkatan permintaan domestik (*domestic demand*).

Berbeda dengan ketiga negara yang disebutkan di atas, kebijakan pemerintah Indonesia justru bertolak belakang. Atas saran IMF, Indonesia justru melakukan transformasi utang swasta menjadi utang publik. Kebijakan ini telah mendorong peningkatan drastis beban anggaran

negara. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan moneter dan fiskal hanya demi menjamin tersedianya anggaran untuk membayar cicilan utang kepada kreditor, termasuk IMF. Padahal, dalam situasi ekonomi sekarat semacam itu, pemerintah seharusnya mencari berbagai cara untuk memompakan ekonomi dan bukannya malah memperlambatnya dengan mengetatkan kebijakan moneter dan fiskal. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika Indonesia jauh lebih lambat pemulihan ekonominya dibandingkan dengan ketiga negara Asia lainnya yang mengalami krisis.

Harus diakui bahwa instabilitas politik dan keamanan pada waktu itu barangkali turut menyumbangkan kelambanan *recovery* ekonomi Indonesia. Namun, salah diagnosa dan obat yang diberikan IMF untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonom-ekonom Orde Baru⁹ merupakan penyebab utama lambannya proses pemulihan ekonomi. Salah obat tersebut dapat dilihat dalam tiga tahap kebijakan sejak Oktober 1997, yakni sebagai berikut.

Tahap pertama, kebijakan yang disarankan IMF telah menciptakan ketidakstabilan finansial dan kebangkrutan. Faktor penyebabnya adalah kebijakan moneter superketat ketika tingkat bunga antarbank meroket dari 20 persen menjadi 300 persen sejak kuartal ketiga 1997. Kebijakan ini telah menciptakan *liquidity crunch* dalam perbankan Indonesia karena banyak bank yang kemudian hanya mengandalkan sebagian likuiditasnya di pasar uang antarbank. Selanjutnya, saran IMF untuk menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai pada November 1997 justru telah membuat kepercayaan rakyat terhadap perbankan nasional runtuh. Langkah ini memicu *capital outflow* sekitar US\$ 5 miliar yang membuat nilai tukar rupiah semakin jatuh. Depresiasi rupiah yang tidak terkendali tersebut terjadi karena kebijakan sebelumnya yang

mengembangkan kurs rupiah pada 14 Agustus 1997. Dalam situasi yang tidak stabil, sistem nilai tukar rupiah yang diambangkan (*free float*) justru semakin memicu *capital outflow*, dan ini membuat nilai tukar rupiah semakin lemah. Dalam situasi semacam ini, dunia usaha mengalami pukulan ganda, yakni dari nilai tukar yang terus melemah dan tingkat bunga yang super tinggi. Akibatnya, banyak perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, yang kemudian diikuti oleh kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. IMF ternyata justru mendestabilisasi sektor perbankan yang kemudian membuat ekonomi Indonesia mengalami *hard landing*. Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan minus 12.8 persen, terburuk sepanjang sejarah ekonomi Indonesia.

Tahap kedua, transformasi utang swasta menjadi utang publik sebagaimana disarankan IMF telah menciptakan kenaikan utang pemerintah yang luar biasa besar, khususnya utang domestik. Sebelum krisis, total utang Indonesia sebesar US\$ 136 miliar, yang terdiri dari utang pemerintah sebesar US\$ 54 miliar dan utang swasta sebesar US\$ 82 miliar. Namun pada tahun 2001, utang luar negeri pemerintah meningkat menjadi US\$ 74 miliar ditambah utang domestik sebesar Rp. 647 triliun (atau sekitar US\$ 65 miliar). Sebaliknya, utang swasta mengalami penurunan menjadi US\$ 67 miliar sebagai akibat percepatan pembayaran ataupun restrukturisasi. Dengan jumlah utang sebesar itu, telah melebihi PDB Indonesia yang hanya US\$150 miliar. Akibat salah obat IMF, utang Indonesia telah naik dua kali lipat.

Tahap ketiga, dampaknya pada APBN. Untuk tahun 2002, misalnya, pembayaran utang APBN mencapai sekitar US\$13 miliar (Rp. 130 triliun) baik untuk pembayaran utang luar negeri maupun dalam negeri. Anggaran ini lebih dari tiga kali lipat gaji seluruh pegawai negeri dan TNI dan lebih dari 8 kali lipat anggaran

pendidikan. Membengkaknya utang luar negeri ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan moneter BI yang sangat patuh atas saran-saran IMF yang meyakini bahwa pengendalian inflasi hanya dapat dilakukan dengan cara pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga SBI. Padahal, sebagian besar inflasi disebabkan oleh kenaikan harga-harga yang dilakukan pemerintah, dan tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor moneter. Sebaliknya, kebijakan pengetatan tersebut membuat beban APBN semakin membengkak. Pada saat itu, kenaikan suku bunga SBI sebesar 1 persen akan menaikkan defisit APBN sebesar Rp. 2.3 triliun. Dengan demikian, kebijakan mafia ekonomi Orde Baru yang didukung IMF dengan mengandalkan utang luar negeri dibandingkan dengan investasi dalam pembangunan telah menjerat ekonomi Indonesia ke dalam jebakan utang (*debt trap*) yang lebih dalam. Kebijakan tersebut telah membuat negara harus mengambil alih beban utang yang seharusnya dipikul oleh swasta sebagai akibat kebijakan BLBI (Rp. 144 triliun) ataupun rekapitulasi perbankan. Bahkan, kasus BLBI tercatat sebagai skandal keuangan terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Setelah lebih dari Satu Dekade

Krisis 1997/1998 sebenarnya telah meninggalkan hikmah yang dapat dipetik oleh pengambil kebijakan ekonomi. Namun dalam kenyataannya, pengambil kebijakan ekonomi tidak banyak menarik pelajaran dari krisis tersebut. Kebijakan ekonomi masih cenderung konservatif dan terlalu fokus pada usaha menjaga stabilitas indikator finansial dan moneter. Meskipun IMF telah anjak kaki dari Indonesia, tetapi kebijakan konservatif dalam bidang anggaran dan moneter masih terus dipraktikkan sekedar hanya untuk memoles indikator finansial seperti inflasi dan nilai tukar rupiah. Padahal, di negara manapun, target utama sebuah pemerintahan di bidang ekonomi adalah

Padahal, di negara manapun, target utama sebuah pemerintahan di bidang ekonomi adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Ini dapat dicapai dengan mendorong peningkatan investasi dan produktivitas di sektor riil, terutama sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Indikator finansial hanya merupakan target antara untuk mencapai target utama ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja.

pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Ini dapat dicapai dengan mendorong peningkatan investasi dan produktivitas di sektor riil, terutama sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Indikator finansial hanya merupakan target antara untuk mencapai target utama ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja.

Memang upaya untuk menjaga stabilitas sektor finansial merupakan suatu langkah penting untuk ekonomi. Namun, upaya berlebihan untuk menstabilkan indikator finansial selama ini justru kerap mengorbankan sektor riil yang berujung pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Usaha yang ditujukan untuk menekan inflasi berlebihan, misalnya, telah mengorbankan keleluasan ekonomi untuk tumbuh sesuai potensinya. Bahkan, inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga barang yang dikontrol pemerintah (*administered prices*) pun ditekan dengan pengetatan moneter seperti dalam kasus kenaikan harga BBM Oktober 2005.

Sementara itu, ditinjau dari sisi fiskal, anggaran belanja pemerintah yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai stimulus ekonomi justru dibuat sangat ketat, yang tercermin pada defisit anggaran yang sangat rendah. Pada periode 2002-2006, defisit anggaran berkisar antara 0.5 persen-1.7 persen dari GDP, jauh lebih rendah dari batas maksimum yang ditentukan undang-undang sekitar 3 persen. Fokus berlebihan pada target finansial dan moneter telah mengakibatkan sektor riil mengalami pertumbuhan yang sangat lambat selama empat tahun terakhir. Pada periode 2002-2006, indeks produksi industri berskala menengah dan besar di Indonesia hanya meningkat rata-rata sekitar 2.1 persen per tahun. Pada tahun 2006, indeks produksi manufaktur malah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2005. Perkembangan lainnya bahkan menunjukkan gejala awal

proses deindustrialisasi dalam bentuk investasi dan penggunaan kapasitas terpasang yang rendah, relokasi industri ke negara lain, industrialisasi yang berubah menjadi perdagangan produk impor, dan lain sebagainya.

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga menjadi sangat rendah. Daya serap tenaga kerja untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi merosot dari 500 ribu tenaga kerja menjadi hanya sekitar 240 ribu tenaga kerja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pengangguran terbuka mengalami lonjakan dari 9.1 juta orang pada tahun 2002 menjadi 10.5 juta orang pada Februari 2007.

Ironisnya, kemandegan sektor riil tersebut sama sekali tidak tergambarkan dalam sektor finansial. Sejumlah indikator finansial dan moneter justru menunjukkan kinerja sebaliknya. Indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), misalnya, telah meningkat tiga setengah kali lipat dari level 700 pada tahun 2004 menjadi 2.380 pada Juli 2007. Demikian juga, cadangan devisa meningkat drastis dari US\$ 35 miliar pada tahun 2006 menjadi US\$ 51 miliar pada Juli 2007, yang membantu stabilitas nilai tukar rupiah.

Pada Januari dan Mei 2006, kami bersama sejumlah ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) menyatakan bahwa kontradiksi kinerja indikator finansial dengan sektor riil tersebut merupakan situasi yang perlu diwaspadai.¹⁰ Ini karena perbaikan kinerja indikator finansial sangat *vulnerable* jika tidak didukung oleh perbaikan fundamental ekonomi mengingat yang terbentuk pada akhirnya adalah gelembung finansial (*financial bubbles*), terlihat besar, tetapi isinya kosong.

Salah satu penyebab utama kontradiksi sektor finansial dengan sektor riil adalah derasnya aliran modal global dalam bentuk *hot money* ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sampai akhir Juni 2007, jumlah dana asing yang ada dalam instrumen finansial Indonesia

mencapai sekitar Rp. 797 triliun, dan sekitar Rp. 670 triliun (84%) diantaranya ditempatkan di instrumen saham Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Aliran masuk *hot money* tersebut telah memberikan dampak ganda pada perbaikan indikator finansial, yaitu kenaikan nilai aset dan penguatan mata uang rupiah. Indeks harga saham BEJ, misalnya, sejak awal 2006 meningkat drastis dari 1.600 menjadi 2.400 pada pertengahan Juli 2007 atau meningkat sebesar kurang lebih 107 persen. Demikian juga halnya dengan rupiah yang cenderung menguat, sempat menyentuh Rp. 8.600 per US\$ pada pertengahan Mei 1997. Meskipun demikian, gelembung finansial akibat *hot money* tersebut sangat berbahaya karena karakteristiknya seperti pisau bermata dua. Selain dapat menggelembungkan nilai aset finansial dan menguatkan mata uang rupiah, *hot money* pada gilirannya juga dapat menjadi malapetaka bagi sektor finansial Indonesia ketika terjadi arus balik. Terlebih, saat ini, sekitar 65-70 persen transaksi di BEJ dikuasai oleh investor asing. Dalam situasi semacam ini, praktis naik turunnya harga saham berada di bawah kendali asing yang tidak lain merupakan *hedge funds* besar di tingkat global. Oleh karena itu, sedikit guncangan saja (*shock*) baik karena faktor domestik maupun eksternal dapat berakibat pada terjadinya arus balik *hot money*, dan terkoreksinya gelembung finansial yang dapat mengarah pada krisis ekonomi jilid II.

Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia sangat rentan terhadap terjadinya krisis tahap II ini.

1. Peningkatan ekspor dan cadangan devisa Indonesia hanya ditopang kenaikan harga komoditi internasional dan aliran *hot money*.

Selama dua tahun terakhir, cadangan devisa Indonesia meningkat dramatis dari sekitar US\$ 35 miliar pada tahun 2005 menjadi sekitar US\$ 51 miliar. Namun, peningkatan cadangan devisi tersebut

ternyata tidak didukung oleh peningkatan daya saing ekspor (*export competitiveness*) atau peningkatan aliran investasi langsung. Sebaliknya, peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh faktor situasional seperti melambungnya harga komoditi internasional, dan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, aliran *hot money*. Sejak tahun 2004, harga sejumlah komoditi pasar internasional mengalami peningkatan fantastis. Kenaikan ini telah mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia (*price driven export growth*), yang juga meningkatkan cadangan devisa dan membantu kestabilan nilai tukar rupiah. Bahkan pada tahun 2006, ekspor Indonesia menembus angka US\$ 100 miliar. Faktor lain yang turut membantu peningkatan cadangan devisa dan menjaga kestabilan nilai rupiah adalah derasnya aliran *hot money* ke Indonesia yang dipicu oleh selisih tingkat suku bunga domestik dan luar negeri yang semakin tinggi. Sejak pertengahan 2005, jumlah *hot money* yang mengalir ke Indonesia diperkirakan sebesar kurang lebih US\$ 20 miliar.

2. Pertumbuhan semu sektor perbankan

Dalam setahun terakhir, industri perbankan terus mencatat keuntungan. *Net Interest Margin* (NIM) perbankan pada Januari 2007 sebesar 6.6 persen, dan merupakan tertinggi di dunia. Akibatnya, saham-saham perbankan banyak diminati oleh investor dan ikut mendorong kenaikan indeks harga saham di BEJ. Namun, kenaikan tersebut ternyata tidak didukung oleh perbaikan kinerja fundamental seperti peningkatan penyaluran kredit. Selama dua tahun terakhir, pertumbuhan kredit perbankan mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2006, kredit perbankan hanya tumbuh sekitar 14 persen, sementara pada Mei 2007 pertumbuhan kredit hanya sebesar 17 persen. Angka pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis yang berkisar antara 25-30 persen per tahun.

3. Overs-supply property

Fenomena lain yang terjadi selama lima tahun terakhir adalah meningkatnya secara besar-besaran sektor properti, baik untuk kebutuhan residensial, perdagangan, ataupun bisnis. Antara tahun 2002-2006, misalnya, nilai kapitalisasi bisnis properti meningkat rata-rata 45 persen per tahun. Namun, kemajuan pesat di sektor ini tidak diikuti oleh kenaikan permintaan (*overs-supply*). Pasokan bisnis terus meningkat, tetapi aliran investasi langsung beberapa tahun terakhir tidak tumbuh signifikan. Pada tahun 2006, investasi bruto dalam GDP hanya tumbuh sekitar 3 persen. Demikian juga, pasokan properti untuk perumahan dan pusat perbelanjaan terus meningkat, tetapi daya beli masyarakat belum menunjukkan adanya perbaikan sejak inflasi tinggi 17 persen pada Oktober 2005. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika tingkat hunian di hampir semua sektor mengalami penurunan drastis. Menurut data bank Indonesia, tingkat hunian perkantoran sewa di Jakarta menurun 9 persen dari sekitar 89 persen pada tahun 2005 menjadi hanya sekitar 80 persen pada kuartal pertama 2007. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada tingkat hunian pusat perbelanjaan di Jabodetabek yang biasanya mencapai sekitar 94-95 persen, tetapi pada kuartal pertama 2007 telah menurun menjadi hanya sekitar 88 persen. Bahkan, akhir-akhir ini muncul kecenderungan untuk menaikkan harga sewa dan *maintenance cost* guna menutup biaya operasional.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah sebagian besar pembiayaan pembangunan properti berasal dari kredit bank, terutama kredit kepada pembeli properti. Oleh karena itu, tanpa adanya perbaikan di sektor riil maka NPL perbankan berpotensi meningkat tajam. Kasus di Amerika Serikat memberikan pelajaran bahwa salah satu yang dapat dianggap krisis adalah *subprime lending*, yakni orang-orang yang tidak pantas mendapat pinjaman dipaksakan untuk

diberi pinjaman. Akibatnya, begitu terjadi sedikit kenaikan tingkat bunga atau penurunan pendapatan maka si kreditor akan masuk kategori NPL. Dengan demikian, gelembung sektor properti menyimpan resiko kredit macet yang belum terefleksikan dalam NPL saat ini.

4. Harga saham *overvalued*

Indeks harga saham di BEJ telah meningkat dramatis selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2006, kenaikannya mencapai 55 persen, sedangkan pada periode Januari 2007 harga saham mengalami peningkatan sekitar 32 persen. Peningkatan indeks harga saham ini sebagian memang disebabkan oleh tingginya harga komoditi internasional yang mendorong keuntungan pada emiten perkebunan dan pertambangan. Namun, penyebab utamanya adalah derasnya aliran dana jangka pendek (*hot money*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan data Departemen Keuangan, jumlah *hot money* yang mengalir ke pasar saham Indonesia pada periode Jan-Jun 2007 mencapai sekitar US\$ 1.6 miliar. Akibat begitu derasnya aliran *hot money* membuat investor tidak lagi mengindahkan kondisi fundamental emiten-emiten yang ada di BEJ. Ini dibuktikan dengan banyaknya emiten yang *price to earning ratio* (PER)-nya telah luar biasa tinggi. Pada bulan Juli 2007, jumlah emiten yang mencatat PER di atas 100 kali dan bahkan 8 emiten diantaranya memiliki PER lebih dari 400 kali. Peningkatan harga saham yang jauh melebihi kinerja fundamentalnya merupakan gelembung yang sangat berbahaya, terutama jika terjadi arus balik dana-dana jangka pendek. Fenomena seperti ini merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi pada tahun 2007.

5. *Track record* pemerintah yang buruk dalam meredam gejolak

Sampai saat ini, *track record* pemerintah dalam meredam gejolak ekonomi, termasuk gejolak kebutuhan pokok sangat buruk. Setahun terakhir, setiap kali terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok seperti

beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain maka berbagai upaya pemerintah kerap kali tidak efektif untuk meredam gejolak tersebut. Ini terjadi sebagai akibat terutama oleh rendahnya kemampuan anggota kabinet ekonomi dalam menyelesaikan masalah di lapangan. Pada akhirnya, ini akan menyulut instabilitas sosial karena bagaimanapun harga-harga kebutuhan pokok terkait langsung dengan nasib rakyat banyak. Situasinya akan menjadi semakin berbahaya jika gejolak harga merupakan hasil koreksi gelembung finansial yang sangat dikhawatirkan akhir-akhir ini.

6. Dinamika politik domestik yang dimulai lebih awal dari dugaan semula

Sebelumnya, banyak kalangan menduga bahwa dinamika politik menjelang pemilu 2009 baru akan dimulai pertengahan tahun 2008. Namun, fakta kondisi ekonomi riil tidak banyak mengalami kemajuan. Ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Dinamika politik mengalami percepatan dan dimulai lebih awal pada tahun 2007. Salah satu konsekuensi utama percepatan dinamika politik tersebut adalah terpecahnya konsentrasi pemerintah dalam mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang ekonomi. Selain itu, jika terjadi gejolak finansial, maka faktor politik dipastikan dapat semakin memperkeruh situasi seperti yang terjadi pada krisis moneter sepuluh tahun lalu.

Catatan Penutup

Paparan dalam artikel ini memberikan suatu informasi dan fakta menarik bahwasannya krisis moneter yang terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu tidak semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Namun, lebih disebabkan oleh fondasi ekonomi Indonesia yang sangat rapuh. Oleh karenanya, krisis moneter yang terjadi di Thailand dengan cepat menular ke Indonesia dengan skala krisis yang lebih dasyat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelesaikan krisis bukannya menyelesaikan, tetapi malahan membuat situasinya menjadi lebih buruk.

Dihinggapi oleh rasa tidak percaya diri, beberapa pihak menyarankan agar pemerintah Indonesia meminjam IMF guna menyelesaikan krisis. Namun, ironisnya justru menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis yang lebih parah. Ini ditunjukkan oleh kerusakan sistem perbankan nasional, meningkatnya utang pemerintah, meluasnya kerusuhan yang menelan kerugian sangat besar, serta lambannya pemulihan ekonomi Indonesia. Akibatnya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami krisis, Indonesia jauh tertinggal di belakang.

Setelah lebih dari satu dekade krisis ekonomi, tampaknya, Indonesia masih rentan terhadap serangan krisis jilid II. Beberapa faktor mendukung hipotesis ini, tetapi sayangnya pemerintah Indonesia tidak pernah belajar dari blunder-blunder

dalam antisipasi ataupun terapi. Tim ekonomi pemerintah masih cenderung memandang gelembung finansial sebagai prestasi yang membanggakan dan secara langsung atau tidak langsung selalu mempromosikan *hot money* (Iman Sugema, *Bisnis Indonesia*, 3 Agustus 2007, hal. 2). Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *hot money* ini seperti pisau bermata dua yang, pada satu sisi, menggelembungkan aset, tetapi pada sisi lain dapat menghancurkannya.

Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang sangat positif dalam memandang *hot money*, negara-negara Asia lainnya justru mengkhawatirkannya. Sejumlah negara telah mengambil langkah-langkah antisipatif guna meredam aliran *hot money* ini. Pemerintah Cina, misalnya, telah menaikkan pajak transaksi di pasar sahamnya akhir Mei 2007, dan menerapkan sanksi berat kepada bank internasional yang memfasilitasi masuknya dana asing ke Cina dalam jumlah besar. Thailand juga telah mengambil langkah untuk mendepresiasi mata uang Bath karena jika mata uang terlalu kuat akan mengganggu kinerja ekspor yang menyumbang dua per tiga GDP Thailand. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mestinya tidak terlena dan *over-confidence* terhadap gelembung finansial yang terbentuk sebagai akibat aliran *hot money* tersebut karena dapat mengantarkan Indonesia ke krisis jilid II.

¹ Artikel ini hasil resume yang dilakukan oleh tim redaksi atas ijin penulis dari artikel yang diedarkan secara luas ke publik dengan judul: "10 Tahun Krisis Ekonomi, Solusi Moneter dan Neoliberal: "Kerawanan Lama dalam Bungkus Baru".
² Mantan Menko Perekonomian Indonesia; Chairman of the Board ECONIT Advisory Group
³ Senior researcher Econit Advisory Group
⁴ Moderat relatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara Asia yang tinggi (8-10 persen).

⁵ Econit Advisory Group dan Institut Bankir Indonesia. 1997. Studi Struktur dan Kebijakan Strategis Industri Perbankan Indonesia Pasca-Tahun 2000.
⁶ Diungkapkan dalam ECONIT Economic Outlook 1996: A Year of Consolidation. November 1995, Bagian 2 hal. 28
⁷ Diungkapkan dalam ECONIT Economic Outlook 1996: A Year of Consolidation. November 1995, Bagian 3 hal. 17
⁸ Kutipan langsung Econit Public Policy Review (EPPR): Saran untuk Meminta Bantuan IMF:

Penjerumusan atau Ketidaktahuan. 8 Oktober 1997, hal. 3.
⁹ Lihat paper Koalisi Anti Utang: Mafia Berkeley: Kegagalan Indonesia menjadi Negara Besar di Asia, 6 Juni 2006.
¹⁰ Lihat dua paper TIB: (1) Ekonomi Indonesia 2006: Penundaan Kebangkitan Ekonomi, 26 Januari 2006, hal. 3; (2) Perlambatan Pemulihan Ekonomi dan Kesenjangan yang Semakin Lebar, 18 Mei 2006.

Pengantar: Rubrik ini menyajikan profil tentang organisasi-organisasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berdasarkan asas demokras sosial. Redaksi mengundang pembaca untuk menuliskan profil organisasi Anda, sepanjang memenuhi kriteria tersebut.

Pergerakan Indonesia

Pergerakan Indonesia (PI) lahir sebagai bentuk dari aktualisasi dan optimisme pasca pergulatan selama dua tahun setelah pembentukan Komite Persiapan Pergerakan Indonesia (KPPI). Kongres Pertama PI dilaksanakan di Bogor pada 26-28 Agustus 2005, tepat sembilan hari setelah lagu Indonesia Raya dikumandangkan kembali oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai organisasi progresif, salah satu tekad PI adalah tidak mengulang kesalahan dan kegagalan-kegagalan masa lalu dalam membangun organisasi, keprihatinan atas apa yang telah terjadi pada masa lalu pasca reformasi telah membulatkan tekad aktivis PI untuk memperbaiki tatanan politik dan moral politik di Indonesia.

PI adalah sebuah organisasi yang bersifat multikdimensi dimana anggota anggotanya adalah elemen dari berbagai lapisan masyarakat baik aktivis, seniman, penggiat politik dan sebagainya, dalam pidato politik pada Kongress I PI di bogor, Ketua Umum PI Faisal Basri mengemukakan:

".....namun rasanya suatu keniscayaan kalau berhimpunnya kita itu makin lengkap dari berbagai Elemen, dari aktivis, dari kesenian, dari kelompok kebudayaan, politisi juga, sebagai Partai yang ditujukan oleh temen-temen kita yang ada di Kalimantan Tengah dan di tempat-tempat lainnya. Orang Partai boleh beda tapi di PI orang merasa lebih nyaman ketimbang di Partainya sendiri".

Prinsip Dasar

Prinsip Dasar Pergerakan Indonesia adalah Kebangsaan, Kerakyatan, Kemanusiaan, Keberagamaan, Kesetaraan dan Kebersamaan.

Platform PI

I. Analisis Masyarakat, Situasi Nasional dan Internasional

A. Analisis Masyarakat

- Secara objektif, masyarakat Indonesia saat ini menghadapi masalah cukup serius, diantaranya adalah

berkurangnya atau bahkan hilangnya kesempatan untuk hidup layak. Sejauh ini dalam prosesnya, juga tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat, bahkan kemiskinan terus meningkat, secara kuantitatif dan kualitatif. Sebut saja misalnya kondisi petani yang kian menderita berhadapan dengan tingginya biaya produksi pertanian tapi rendahnya harga jual, gaji buruh yang tertinggal oleh peningkatan inflasi, sektor informal semakin besar, dan berbagai persoalan keterbelakangan di bidang pendidikan dan kesehatan.

- Dalam prosesnya, gejala ketidakpuasan masyarakat akan penegakan keadilan dan penegakan hukum juga kian meningkat tajam, dan perlawanan sipil pada negara di sana-sini tidak bisa dielakkan. Sementara disisi lain, telah terjadi pula konspirasi antar-elit politik baik di parlemen maupun di pemerintahan untuk menjaga posisi masing-masing (status quo), yang makin terbuka

melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Keadaan ini makin terpuruk karena fakta pemerintah juga melakukan kompromi politik terhadap kekuatan lama, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan masa lalu yaitu pelanggaran HAM hingga saat ini belum bisa dituntaskan.

- Ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku politik dan struktur kekuasaan yang elitis dan korup makin meningkat, berlangsung di berbagai daerah dan nasional. Elit-elit politik yang berkuasa dinilai hanya mengutamakan kepentingannya sendiri dan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal itu menimbulkan, paling tidak, dua reaksi di kalangan rakyat, yaitu: 1) Apatisme terhadap politik dan sistem demokrasi, dan atau 2) Ketidakpercayaan terhadap aktor-aktor politik yang berbuah pada perlawanan terhadap kekuasaan negara.

- Sejak perubahan struktur politik terjadi menuju pascaotoritarianisme, upaya-upaya penguatan masyarakat sipil dalam kerangka demokrasi di level *grassroot* tidak berjalan secara efektif, bahkan selalu menghadapi kendala dalam berbagai bentuk. Eksistensi institusi sosial kewargaan sebagai *social and political capital* di tengah-tengah masyarakat cenderung belum keluar dari ketidakberdayaan, terutama sebagai dampak kebijakan dan perlakuan masa lalu dalam disain korporatisme.

B. Analisis Situasi Nasional

- Saat ini transisi demokrasi di Indonesia berada pada zona abu-abu (*grey zone*). Hal itu ditandai tidak berlangsungnya demokrasi secara substansial, kendati pun instrumen-instrumen demokrasi telah ada. Problem mendasar bersumber dari

masih menguatnya oligarki politik dalam institusi kenegaraan (birokrasi, parlemen, parpol) maupun masyarakat (ormas), sehingga yang terjadi adalah demokrasi semu dan kebekuan demokrasi. Misalnya keberadaan Pemilu sebagai bentuk formalitas demokrasi namun tidak dapat menjamin kepentingan masyarakat.

- Di tengah situasi krisis, kita mengalami *lack of political leadership* karena ketiadaan visi, tanggung jawab dan inisiatif untuk melakukan langkah-langkah berani dan sistematis untuk keluar dari krisis dan melanjutkan demokratisasi.

- Pada saat yang sama, berlangsung pula restorasi konservatisme politik yang ditandai dengan resistensi terhadap perubahan-perubahan mendasar (radikal) dan progresif dalam melakukan upaya-upaya demokratisasi.

- Pada dimensi politik di tingkat lokal, terjadi keterbelakangan baik dalam sistem, etika, maupun kondisi keuangan daerah. Sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang berlebihan (seperti penetapan pajak dan pungutan yang justru disinsentif untuk pengembangan ekonomi), juga menimbulkan jawara-jawara kecil (*warlords*) yang mempersulit koordinasi lintas-daerah.

- Gagalnya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi karena tidak dijalankan secara demokratis justru kian terancam oleh adanya UU 32/2005 tentang Pemerintah Daerah telah menunjukkan gejala resentralisasi. Resentralisasi ini pada akhirnya akan berisiko terhadap merosotnya agenda pembangunan civil society dan demokrasi di tingkat lokal.

- Semakin meningkatnya fundamentalisme yang berbasis etnis dan atau agama yang memberi ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Aktivitas politik ini telah menggunakan instrumen-instrumen demokrasi baik di tingkat negara maupun *civil society*.

c. Analisis Situasi Internasional

- Kecenderungan unilateralisme di tingkat internasional yang tidak memberikan ruang bagi negara lain sebagai kekuatan penyeimbang

- Terjadinya praktik militerisasi dalam diplomasi internasional dengan mengatasnamakan "*war on terrorism*" yang semakin tidak jelas implementasinya.

- Pada ekonomi politik internasional, terjadi *global social injustice* sehingga perdagangan bebas yang diharapkan membawa *gains from trade*, justru pada praktiknya adalah eksploitasi terhadap sumber daya dalam negeri.

- Menghadapi *global social injustice* tersebut, negara-negara berkembang justru mengalami *lack of regional cooperation*. Hal itu membuat daya tawar (*bargaining power*) dari negara-negara berkembang semakin lemah terhadap negara-negara maju dalam penetapan strategi perdagangan antar-negara.

II. Perjuangan Bidang Politik

1. Penerapan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem distrik dan memungkinkan munculnya partai lokal.
2. Memperjuangkan pluralisme ideologi politik sebagai syarat mutlak berdemokrasi.

3. Pemberlakuan sistem ketatanegaraan Bikameral yang sejati (murni).
4. Memperjuangkan dan mempertegas supremasi sipil.
5. Memperjuangkan sistem dan perilaku politik yang rasional, modern dan demokratis.
6. Memperjuangkan dengan konsisten, otonomi daerah melalui desentralisasi dan demokratisasi yang membangun partisipasi rakyat yang seluas-luasnya terhadap pengambilan keputusan, pembangunan dan proses-proses politik lainnya.
7. Memperjuangkan pembaruan agraria.
8. Memperjuangkan hubungan industrial yang progresif dan adil.
9. Memperjuangkan kesetaraan warga bangsa dengan menjunjung tinggi penegakan hak-hak azasi manusia yang berlandaskan pada penghormatan terhadap prinsip anti-diskriminasi.

III. Perjuangan Bidang Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi dengan sumber daya nasional sebagai kekuatan pokok.
2. Melaksanakan politik-ekonomi dan strategi ekonomi dengan membangun pasar domestik yang terintegrasi, efisien dan kuat (*Domestic-market led development*).
3. Persaingan usaha yang sehat pada sektor *private goods* (barang-barang privat).
4. Kesetaraan (*equality*) dalam distribusi ekonomi.

5. Membangun kembali industri nasional (nasional swasta) yang mengembangkan industri yang berbasis pertanian, barang-barang modal industri sebagai basis pertumbuhan ekonomi, dalam batas-batas yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak atau menjadi monopoli.
6. Membangun sistem jaminan sosial (*social security*).
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Meningkatkan pembangunan *human capital* (pendidikan, kesehatan, rasa aman) dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
9. Memperjuangkan dan mendorong upaya-upaya untuk melepaskan negara dari ketergantungan terhadap utang.
10. Mendorong terjadinya kerjasama ekonomi yang lebih maju diantara negaranegara berkembang.

IV. Perjuangan Bidang Hukum

Dititikberatkan pada pembangunan Sistem Hukum Nasional, yang meliputi tiga komponen: struktural (pembangunan sistem hukum yang dapat menciptakan sutruktur pemerintahan negara yang efisien dan efektif dalam melaksanakan berbagai permasalahan birokrasi), substansial (penciptaan peraturan perundang-undangan yang komprehensif, integral dan sistematis dengan memperhatikan aspek legalitas, efektivitas dan validitas) dan budaya hukum (pembangunan keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum), dengan memperjuangkan tujuan-tujuan sebagai berikut:

Pengurus PI Periode 2005 – 2008

DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL (DEPERNAS)

Ketua : Benny G. Setiono
Sekretaris: Jacobus Eko Kurniawan
Anggota :

1. Ade Indira Damayanti
2. Agus Indra Udayana
3. Arif Arryman
4. Asep Kusmana
5. Esther Indah
6. Franky Sahilatua
7. Kristianus Atok
8. Meilono Suwondo
9. Syumang
10. Tumpal Simaremare
11. Martin Manurung

DEWAN PENGURUS NASIONAL (DPN)

Ketua Umum : Faisal H. Basri
Ketua I : Aditya
Ketua II : Dedi Ekadibrata

Sekretaris Jenderal : Arie Sujito
Wakil Sekjend. : Azwar Zulkarnaen

Bendahara : Albertus Sugeng
Wk. Bendahara : Faisal Andi Mahrawa
Wk. Bendahara : Thomas Nugroho

Bidang Hubungan Internasional, Humas dan Jaringan

Ketua : Gede Mahendra
Anggota :

1. Azman Muchtar
2. Suwendhi
3. Dani P. PIN
4. Santi
5. Iman Pandjaitan
6. Paulus M. Lubis

Bidang Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Sukma Widyanti
Anggota :

1. Erwin Razak
2. Boy Syahbana
3. Asep Kurniawan
4. Thoib Soebhanto

Bidang advokasi dan Pengembangan Organisasi

Ketua : Dwi Djananto
Anggota :

1. SaepulTavip
2. Guntur Tua
3. Jhoni Sarinton
4. Teguh Bangun Santoso
5. Miranti Husein
6. Tanthowi
7. Joze Rizal
8. Noviar

Bidang Kesekretariatan dan Data Base

Ketua : Musjaffa' Maimun
Anggota :

1. Teddy Kroen
2. Ahmad Firdaus

Balitbang

- Wahyu Handoyo
- Nyoman Darma

1. Penegakan keadilan secara umum.
2. Diterapkannya hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu (*equality before the law*).
3. Terciptanya struktur ketatanegaraan (pemerintahan dalam arti luas) yang mendukung pelaksanaan *good governance*.
4. Terciptanya produk peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
5. Terciptanya lembaga peradilan dan penerap hukum (*law enforcer*) yang bersih, independen, dan berwibawa.
6. Terciptanya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang dapat mendukung penegakan keadilan dan proses demokratisasi.

Fungsi

1. Wadah pembangunan kepemimpinan politik rakyat.
2. Wadah pendidikan politik rakyat.

Tujuan

1. Memperjuangkan, menegakkan dan melaksanakan kedaulatan rakyat untuk dapat dijalankan sepenuhnya dalam kebijakan-kebijakan negara.
2. Menumbuhkan kepemimpinan baru yang berasal dari generasi baru dalam politik Indonesia.

3. Menghimpun dan mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan pro-demokrasi Bangsa Indonesia.
4. Memperjuangkan tata dunia yang adil, bebas dari penindasan bangsa antar-bangsa dalam relasi internasional.

Strategi perjuangan

- Pengembangan organisasi yang bertumpu pada pembangunan kekuatan yang bersifat multisektoral.
- Pengembangan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai tingkatan
- Pembangunan kekuatan politik berdasarkan kesamaan landasan program (*platform*)
- Kekuatan utama Pergerakan Indonesia bertumpu pada rakyat kelas bawah dan kelompok/lapisan menengah yang memiliki aset kualitas dan kuantitas (akses pada sumber daya ekonomi, intelektual, budaya dan politik yang tidak terakomodasi [tidak puas] dengan sistem yang berlaku.
- Kelompok sasaran PI adalah : massa rakyat, aktivis media, aktivis-aktivis NGOs, profesional (*urban professional*), budayawan/intelektual, politisi dan pengusaha.
- Penguatan ke dalam organisasi dengan membentuk struktur organisasi hingga tingkat kecamatan, dan basis sektoral.

Bentuk-Bentuk Perjuangan:

- Bentuk perjuangan organisasi dilakukan melalui aktivitas-aktivitas politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Aktivitas

- Pendidikan kader PI
- Sekolah Demokrasi
- Seminar kepemimpinan
- Seminar Politik
- Melaksanakan riset
- Aktif dalam kegiatan kepemudaan nasional dan Internasional
- Tanggap Bencana untuk wilayah Aceh, Jogja, Pangandaran
- DLL

Dalam mengimplementasikan visinya PI melakukan pemberdayaan kepada para aktivis penggiat demokrasi yang menjadi pendukungnya. Berbagai kerjasama baik dengan organisasi local maupun internasional telah memperkuat "barisan" PI sebagai organisasi yang bersifat terbuka, multi dimensi dan berideologi kerakyatan. Namun demikian masih banyak hal yang harus tetap dilaksanakan mengingat pembelajaran bagi rakyat harus dilaksanakan secara berkelanjutan karena besarnya jumlah penduduk Indonesia dan begitu lamanya proses de-ideologisasi telah dilakukan secara sistematis oleh rezim sebelumnya.

Membangun Alter-Hegemon

Judul buku : Beyond US Hegemony?

Penulis : Samir Amin

Penerbit : Strategic Information Research Development

Tahun : 2006

Tebal : 191 halaman

Dunia berbeda masih mungkin. Dan Samir Amin bakal tersenyum dengan perkembangan terbaru di Amerika Latin dan India. Sebab, dalam karyanya *Beyond US Hegemony? Assessing the Prospect for a Multipolar World*, Amin memandang hegemoni AS sudah mencapai titik kulminasi bahaya. Unilateralisme yang menggelingding bersama globalisasi berbungkus kapitalisme neoliberal menyimpan imperialisme, benar-benar membahayakan dunia dan kemanusiaan. Imperialisme, menurut Amin, bukanlah tahapan kapitalisme tetapi ciri khas ekspansi kapitalisme global (h.3). Bentuk kapitalisme yang berlaku kini sangat tidak menyenangkan, dan sebenarnya bisa dihindari.

Namun ini tak membuat Amin, sang Marxis teguh, menolak globalisasi. Malahan dia mengangankan suatu globalisasi yang bersahabat. Dalam benak Amin, ada kerangka alter-globalisasi yang memungkinkan kemunculan blok hegemoni lain. Blok alternatif ini tak mesti harus memangkas tuntutan kapitalisme, pikir Amin. Tetapi blok itu jelas mampu memaksa kapitalisme beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang tidak mesti sesuai dengan logika khas kapitalisme (h.6).

Lantas Amin memulai analisisnya dengan melihat tiga triad kekuatan: Eropa, AS, dan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, AS dengan kekuatan hegemoni militernya selalu berkeinginan menundukkan segala bentuk kekuatan ekonomi dan militer yang menantang dominasinya. Ekonomi AS bak parasit bergelayut pada rekanannya dalam sistem global, tanpa cadangan nasional miliknya sendiri. "Dunia memproduksi", ungkap Amin, "Amerika Utara mengkonsumsi" (h.12). Sedang kekuatan militer AS menginginkan seluruh dunia di bawah kuasanya. Maka dunia, terutama Eropa, harus memilih dua strategi: pertama, terus memasok kapital membiayai konsumsi, investasi, dan defisit pengeluaran militer AS. Kedua, memasok kapital itu untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri (h.13). Keadaan sekarang lebih membuat Eropa memilih opsi pertama. Sedangkan di bidang politik terjadi perbedaan akibat budaya politik berbeda. Maka menurut Amin, tendensi ekonomi dominan, mendukung kesatuan triad. Sedangkan politik mengacu pada pecahnya ikatan triad.

Akibat polah AS ini, Eropa mengalami krisis multidimensi. Krisis ekonomi dalam

liberalisme akibat "ketundukan Eropa terhadap pemimpin Amerika Utara dan kesediaannya untuk membiayai defisit AS dengan mengorbankan kepentingannya sendiri" (h.15). Lalu krisis sosial sebagai perlawanan terhadap konsekuensi neoliberalisme. Terakhir krisis politik yang terlihat melalui penolakan terhadap kehendak berperang AS. Ditambah dengan budaya politik bak jurang dalam antara Eropa dan AS, maka "landasan bagi benturan peradaban antara Amerika Serikat dan Eropa tersedia sudah" (h.22).

Sebagai teoritis sistem dunia, Samir Amin menganalisa seluruh bumi ini dari kacamata geopolitik daripada terpaku pada negara tertentu. Tak heran bila ada kecenderungan menggunakan wacana blok hegemon daripada kelas penguasa. Maka penekanan teoritis lebih diarahkan pada penyeimbangan antara hegemon dan subhegemon.

Cina, sebagai kekuatan baru di mata Amin, tidak lebih sebagai "partisipan pinggiran terdominasi yang dipaksa bermain dengan aturan-aturan imperialisme triad baru" (h.47). Sedangkan di bab 3, kesuksesan Rusia bisa diraih kembali apabila Moskow bersedia berganti poros diplomatik dari kutub Washington

ke Eropa Barat. Pada bab 4 diuraikan harapan bagi globalisasi alternatif ada pada India. Namun dengan syarat New Delhi bisa mengatasi beberapa tantangan: penghapusan sistem kasta, membentuk front pekerja bersatu, mempertahankan keutuhan subbenua India, berfokus politik internasional pada negara-negara Selatan seperti Gerakan Non-Blok.

Pada bab 5, berpegang pada keberhasilan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Samir Amin menggagas kembali perlunya basis baru bagi solidaritas antar bangsa-bangsa Selatan. Di tingkat politik, penolakan terhadap kebijakan 'perang penangkalan' AS dan penutupan semua basis militer asing di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sedang di bidang ekonomi, perlu dilakukan pengendalian transfer

kapital internasional, peregulasian investasi asing, pengembangan pertanian, serta mempertanyakan legitimasi utang eksternal. Tentunya, di tingkat internasional ini, PBB perlu melakukan reformasi sehingga mampu berperan secara lebih efektif. Amin memaparkan proposalnya tentang pembaruan PBB di bab 6.

Di akhir bukunya, Amin optimis bahwa triad imperialisme di bawah pimpinan Amerika Serikat bisa dikalahkan. Namun semuanya tentu dicapai dengan 'ragam politik berbeda' (h. 164). Amin tak henti menyerukan pembahasan landasan bersama bagi suatu aliansi gerakan besar menentang neoliberalisme dan militerisasi globalisasi Amerika. Karya penting yang wajib dibaca. >**hadi mahmudi**

Sumber: *Majalah ADIL Edisi-12, 22 Maret – 4 April 2007*. Dimuat kembali atas seizin Majalah ADIL.